

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan Arsip dinamis yang efektif dan efisien dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan Arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak, maka perlu adanya klasifikasi atau pembatasan terhadap akses Arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan untuk mendukung Pengelolaan Arsip Dinamis Pemerintah Daerah perlu membuat sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang KeArsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang KeArsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 143);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses ArsipDinamis;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.

4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Arsip Daerah Kabupaten adalah Arsip daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar.
7. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
8. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
9. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
10. Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
11. Arsip Inaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
12. Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh pencipta Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Lembaga Kearsipan Daerah.
13. Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip.
14. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan Arsip dinamis yang dihasilkan dan pengelompokannya.
15. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan informasi Arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
16. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap Arsip berdasarkan kewenangan penggunaan Arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
17. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi Arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
18. Terbatas adalah Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
19. Biasa/Terbuka adalah Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
20. Rahasia adalah Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat pada Arsip bersifat sensitif bagi lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap *privacy*, keuntungan kompetitif hilangnya kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi.

21. Sangat Rahasia adalah Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.
22. Informasi Yang Dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya.
23. Penggunaan Arsip adalah adalah kegiatan penyediaan dan pemanfaatan Arsip bagi kepentingan pengguna Arsip yang berhak.
24. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan Arsip dan berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
25. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan Arsip dan berasal dari luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
26. Prosedur Pengaksesan Informasi Publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik.
27. Pejabat Pengelola Informasi Publik adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
28. Berkas Perseorangan adalah Arsip yang tercipta dalam rangka perjalanan karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
29. Arsip Dokumen Kepegawaian adalah Arsip perjalanan karier pegawai negeri yang tercipta dalam proses pembinaan kepegawaian dari pejabat yang berwenang.
30. Arsip Keuangan adalah Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.
31. Nilai Guna Arsip adalah nilai Arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna Arsip.
32. Nilai Guna Primer adalah nilai Arsip yang didasarkan pada kegunaan Arsip bagi kepentingan lembaga / instansi pencipta Arsip.
33. Nilai Guna Sekunder adalah nilai Arsip yang didasarkan pada kegunaan Arsip bagi kepentingan lembaga / instansi lain dan atau kepentingan umum di luar lembaga/instansi pencipta Arsip dan kegunaannya sebagai bahan bukti pertanggungjawaban.

Pasal 2

Ruang lingkup Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis;
b. Akses Arsip Dinamis; dan
c. Pengelolaan Arsip

Pasal 3

(1) Asas Klasifikasi keamanan dan Akses Arsip Dinamis Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan.
(2) Asas gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan di lapangan.

(3) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyusunan dan penerapan pedoman serta standar operasional prosedur, sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

BAB II
KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Arsip yang tercipta di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diklasifikasikan menjadi informasi:
   1. Biasa / Terbuka;
   2. Terbatas;
   3. Rahasia; dan
   4. Sangat Rahasia.
b. tingkat Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berbeda dalam teknik pengamanannya, semakin tinggi tingkat Klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan Pemerintah Daerah.
c. tingkat Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat Klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya berdasarkan kewenangan penggunaan Arsip terkait dengan pelaksanaan tugas.

Pasal 5

Setiap pegawai Pemerintah Daerah hanya dapat mengakses Arsip yang berada pada tanggungjawab tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

Publik dapat mengakses informasi Pemerintah Kabupaten Banjar yang dikategorikan terbuka/biasa sebagai hasil dari kewenangan hukum serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip yang tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja, yang tercipta dan dimiliki oleh semua Perangkat Daerah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Bagian Kedua
Klasifikasi Keamanan

Pasal 7

(1) Sarana Klasifikasi keamanan dan Akses Arsip Dinamis Pemerintah Daerah menggunakan sarana perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (s*oftware*).

(2) Perangkat keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. sarana penyimpanan Arsip konvensional berupa *filling cabinet*/rak Arsip untuk menyimpan Arsip Biasa/Terbuka dan Terbatas, dan brankas atau lemari besi untuk Arsip Rahasia dan Sangat Rahasia;
   b. sarana penyimpanan Arsip media baru berupa lemari Arsip sesuai dengan tingkat Klasifikasi informasi; dan
   c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat Klasifikasi informasi.

(3) Perangkat lunak (*software*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. daftar Arsip Aktif, Arsip Inaktif, terjaga dan vital; dan

b. aplikasi pengelolaan Arsip Aktif dan Arsip Inaktif

Bagian Ketiga
Pengamanan

Pasal 8

(1) Pengamanan ruang simpan Arsip secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas (*CCTV*), kunci pengamanan ruangan dan media simpan Arsip.

(2) Pengamanan Arsip kategori Biasa/umum/Terbuka disimpan pada rak besi, Arsip kategori terbatas di simpan pada *filing cabinet*, dan Arsip kategori Rahasia di simpan pada lemari besi.

Pasal 9

(1) Pengamanan informasi Arsip Dinamis Pemerintah Daerah meliputi penciptaan daftar Arsip Terbatas dan daftar Arsip Rahasia.

(2) Tujuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada di *Records Center* dan *Central File*.

Pasal 10

Tabel Klasifikasi Keamanan Arsip dan Pengamanan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
AKSES ARSIP DINAMIS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

(1) Arsip Dinamis Pemerintah Daerah dapat diakses oleh Iengguna internal dan Pengguna Eksternal.

(2) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. Bupati sebagai pimpinan tingkat tertinggi di Kabupaten, dapat mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya;

b. Wakil Bupati sebagai pimpinan tingkat tinggi, tidak dapat mengakses informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang satu level dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin;

c. Sekretaris Daerah sebagai pimpinan tingkat tinggi di Daerah, dapat mengakses Arsip dibawah kewenangannya, tapi tidak dapat mengakses informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang satu level dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin;

d. Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati sebagai pimpinan tingkat tinggi, dapat mengakses seluruh Arsip sesuai bidangnya setelah mendapatkan izin dari pimpinan tinggi yang terkait;

e. Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat eselon III (Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Bagian) sebagai pimpinan tingkat menengah, dapat mengakses seluruh Arsip dibawah kewenangannya, namun tidak dapat mengakses informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang satu level diluar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin;

f. Pejabat eselon IV (Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian), Fungsional Arsiparis, dan Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai pejabat pelaksana, hanya dapat mengakses seluruh Arsip yang berada pada tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya dengan tingkat Klasifikasi biasa/terbuka; dan

g. pengawas internal merupakan unit kearsipan pada pencipta arsip yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip pada pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut;

a. pengawas eksternal merupakan lembaga dan/atau unit kearsipan bekerjasama dengan lembaga atau unit yang menyelenggarakan fungsi pengawasan sesuai dengan wilayah kewenangannya sehingga mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

b. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses Arsip pada pencipta Arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegak hukum; dan

c. publik dapat mengakses informasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dikategorikan biasa/terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Bagian Kedua
Kategori Arsip Dinamis

Pasal 12

Arsip Dinamis Pemerintah Daerah terbagi menjadi tiga (3) kategori yang meliputi:

a. Biasa/Terbuka;

b. Terbatas;

c. Rahasia; dan

d. Sangat Rahasia.

Pasal 13

Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk ke dalam kategori Arsip Biasa/Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, merupakan Arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berlaku tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Daerah antara lain:

a. Arsip Dinamis yang meliputi urusan pertanian;

b. Arsip Dinamis yang meliputi urusan perdagangan dan perindustrian;

c. Arsip Dinamis yang meliputi urusan perhubungan;

d. Arsip Dinamis yang meliputi urusan kelautan dan perikanan;

e. Arsip Dinamis yang meliputi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

f. Arsip Dinamis yang meliputi urusan lingkungan hidup;

g. Arsip Dinamis yang meliputi urusan bencana, kecelakaan dan kondisi bahaya;

h. Arsip Dinamis yang meliputi urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah;

i. Arsip Dinamis yang meliputi urusan pendidikan dan kebudayaan;

j. Arsip Dinamis yang meliputi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak;

k. Arsip Dinamis yang meliputi urusan komunikasi informatika, persandian dan statistik;

l. Arsip Dinamis yang meliputi urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi;
m. Arsip Dinamis yang meliputi urusan perencanaan pembangunan;
n. Arsip Dinamis yang meliputi urusan perpustakaan dan kearsipan;
o. Arsip Dinamis yang meliputi urusan pariwisata dan ekomoni kreatif;
p. Arsip Dinamis yang meliputi urusan sosial;
q. Arsip Dinamis yang meliputi urusan pemerintahan daerah;
r. Arsip Dinamis yang meliputi urusan kesehatan;
s. Arsip Dinamis yang meliputi urusan pendidikan dan pelatihan;
t. Arsip Dinamis yang meliputi urusan kependudukan dan keluarga berencana;
u. Arsip Dinamis yang meliputi urusan kepemudaan dan olahraga;
v. Arsip Dinamis yang meliputi urusan pengadaan;
w. Arsip Dinamis yang meliputi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
x. Arsip Dinamis yang meliputi fungsi kepegawaian aparatur sipil negara (asn) dan pejabat negara, keuangan, non keuangan dan non kepegawaian yaitu, perencanaan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi, pengawasan, perlengkapan, pendidikan dan pelatihan, dan teknologi informasi.

Pasal 14

Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk ke dalam kategori Arsip Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, merupakan Arsip yang dari segi bobot informasinya apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja unit teknis Pemerintah Daerah, yang meliputi:

a. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi kepegawaian seperti *personal file*, rekam medis pegawai;
b. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi perlengkapan dan layanan pengadaan barang/jasa seperti dokumen pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;
c. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Inspektorat Daerah seperti Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Eksternal serta Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Independen;
d. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi keuangan seperti berkas pengelolaan anggaran di setiap unit kerja;dan
e. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi kearsipan seperti daftar Arsip vital dan daftar Arsip terjaga.

Pasal 15

Arsip Dinamis Pemerintah Daerah yang termasuk ke dalam kategori Arsip Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan Arsip yang apabila diketahui oleh Pihak yang tidak berhak mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja Pemerintah Daerah, yang meliputi:

a. Arsip Dinamis yang tercipta berkenaan dengan masalah keorganisasian, administrasi kepegawaian dan hukum seperti kasus/sengketa hukum, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan *personal file*;
b. Arsip Dinamis yang tercipta dari Perangkat Daerah seperti sertifikat tanah, rancang bangun instalasi telepon, instalasi listrik, daftar Arsip vital dan lain-lain; dan
c. Arsip Dinamis yang tercipta dari Inspektorat, seperti tindak lanjut hasil pengawasan.

BAB IV
PENGELOLA ARSIP

Pasal 16

(1) Pengelola Arsip meliputi Pejabat Fungsional Arsiparis dan Pengelola Arsip Aktif (PAA) di *Central File* Pemerintah Daerah.

(2) Fungsional Arsiparis sebagai pengelola Arsip inaktif berperan dalam Pengamanan Arsip di *Records Center* (Pusat Arsip) dalam menetapkan hak Akses Arsip.

(3) Fungsional Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip Aktif (PAA) mempunyai wewenang dan tanggung jawab mengelola Arsip di *central file*.

Pasal 17

(1) Pejabat Fungsional Arsiparis dan/atau pengelola Arsip yang bertugas mengelola Arsip dipilih dari pegawai yang profesional, baik dalam substansi kearsipan maupun dalam dedikasi dan integritas sehingga memiliki kompetensi serta mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
(2) Pejabat Fungsional Arsiparis dan/atau pengelola Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 27 Agustus 2021

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 27 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 39

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 38 TAHUN 2021
TANGGAL : 27 AGUSTUS 2021

TABEL KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

1. SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP FASILITATIF FUNGSI KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANJAR

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
I	FUNGSI KEUANGAN					
	A. RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBD-P)					
	1. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)					
	a. Kebijakan Umum, Strategi, Prioritas dan Renstra – Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) – Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja)	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. KUA beserta Nota Kesepakatannya	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Nota Kesepakatan PPA	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Prioritas Plafon Anggaran	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)					
	a. Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Dokumen RKA-SKPD	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan					
	a. Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD: – Nota Keuangan Pemerintah dan materi RAPBD	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	b. Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang Raperda APBD	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Dokumen Rancangan Penjabaran APBD beserta lampirannya	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Gubernur tentang RAPBD beserta penjabarannya	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Hasil Evaluasi Gubernur tentang RAPBD	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	g. Penetapan Perda APBD oleh Gubernur beserta Penjabarannya	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	h. Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)					
	a. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan					
	1) Kebijakan Umum, Strategi, Prioritas dan Renstra Perubahan – Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) – Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja)	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2) Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3) KUA Perubahan beserta Nota Kesepakatannya	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4) Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	5) Nota Kesepakatan PPA Perubahan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	6) Prioritas Plafon Anggaran Perubahan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan					
	1) Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan yang telah disetujui Sekretaris Daerah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2) Dokumen RKA-SKPD Perubahan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan kepada Dewan					
	1) Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD Perubahan: - Nota Keuangan Pemerintah - Materi RAPBD	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2) Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3) Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang Raperda APBD Perubahan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4) Dokumen Rancangan Penjabaran APBD Perubahan beserta lampirannya	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5) Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Gubernur tentang RAPBD Perubahan beserta penjabarannya	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	6) Hasil Evaluasi Gubernur tentang RAPBD Perubahan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	7) Penetapan Perda APBD Perubahan oleh Gubernur beserta Penjabarannya	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	8) Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD Perubahan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	A. PENYUSUNAN ANGGARAN					
	1. Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten/Kota	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	B. PELAKSANAAN ANGGARAN					
	1. Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Pendapatan					
	a. Pendapatan Asli Daerah					
	1) Surat Ketetapan Pajak Daerah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2) Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah antara lain: – Pajak Restoran – Pajak Hiburan – Pajak Reklame – Pajak Penerangan Jalan – Pajak Mineral Bukan Logam Bantuan – Pajak Parkir – Pajak Air Tanah – Pajak Sarang Burung Walet – PBB Sektor Perdesaan dan perkotaan – Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB)	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	3) Surat Ketetapan Retribusi Daerah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4) Bukti Penarikan Retribusi, antara lain:					
	a) Retribusi Jasa Umum – Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal,	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	– Retribusi Pelyanan Persampahan/ Kebersihan – Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil – Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat – Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – Retribusi Pelayanan Pasar – Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran – Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta – Retribusi Pengujian Kapal Perikanan		serta penegak hukum		penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	
	b) Retribusi Jasa Usaha – Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan – Retribusi Tempat Pelelangan – Retribusi Terminal – Retribusi Tempat Khusus Parkir – Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa – Retribusi Penyedotan Kakus – Retribusi Rumah Potonng Hewan – Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal – Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga – Retribusi Penyebrangan diatas Air – Retribusi Pengolahan Limbah Cair – Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	c) Retribusi Perizinan Tertentu – Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol – Retribusi Izin Gangguan – Retribusi Izin Trayek	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	d) Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	e) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	5) Bukti Penerimaan Jasa Layanan kesehatan Masyarakat	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	6) Dokumen Rasionalitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	7) Bukti Penerimaan SKPD dari Badan Layanan Umum	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	8) Bukti Penerimaan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	9) Bukti Penerimaan Bunga dan atau Jasa Giro pada Bank	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Dokumen Penerimaan Dana Perimbangan:					
	1) Dana Bagi Hasil yang Bersumber dari Pajak dan Bukan Pajak	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2) Dana Bagi Hasil untuk Kabupaten	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3) Dana Alokasi Umum (DAU)	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4) Dana Perimbangan untuk Daerah Yang Tidak Menerima DAU	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5) Dana Alokasi Khusus (DAK)	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Dokumen Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah:					
	1) Alokasi Dana Penyesuaian	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2) Dana Otonomi Khusus dan Dana Bantuan Operasional Sekolah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3) Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4) Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5) Penerimaan Hibah Yang Bersumber dari APBN, Pemerintah Daerah lainnya atau Sumbangan Pihak Ketiga	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	g. Dokumen Piutang Daerah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	h. Dokumen Pengelolaan Investasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Belanja					
	a. Dokumen Belanja Langsung – Belanja Pegawai – Belanja Barang Jasa – Belanja Modal	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Dokumen Belanja Tidak Langsung – Pegawai – Hibah – Belanja Bagi Hasil – Subsidi – Bunga – Bantuan sosial – Bantuan keuangan – Belanja tidak terduga	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Pembiayaan Daerah					
	a. Bukti Penerimaan Pembiayaan – SiLPA	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	– Dana Cadangan – Dana Bergulir – Pinjaman Daerah – Pengalihan Piutang PBB P2 menjadi PAD					
	b. Bukti Pengeluaran Pembiayaan – Investasi Jangka Panjang Dalam Bentuk Dana Bergulir – Penyertaan Modal pada BUMD – Penambahan Penyertaan Modal pada BUMD – Pengeluaran dari Dana Cadangan – Pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM) – Penyertaan Modal kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Daerah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Dokumen Penatausahaan Keuangan – Surat Penyediaan Dana (SPD) – Surat Permohonan Pembayaran (SPP) – Surat Perintah Membayar (SPM) – Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	6. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana – Buku Kas Umum (BKU) – Buku Kas Pembantu (BKP) – Ringkasan Perincian Pengeluaran Objek – Rekening Koran Bank – Laporan Pertanggungjawaban Fungsional dan Administrasi – Bukti penyetoran Pajak – Register Penutupan Kas – Berita Acara Pemeriksaan – Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan Termasuk Arsip Data Komputer (ADK) – Laporan Pendapatan Negara – Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) Bulanan/Tiwulan/Semesteran	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	7. Daftar Gaji	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	8. Kartu Gaji	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	9. Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	10. Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari : – Laporan Realisasi Anggaran (LRA) – Neraca – Laporan Arus Kas – Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	C. PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI					
	1. Dokumen Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri *(Blue Book)*	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (*Green Book*)	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Dokumen *Memorandum of Understanding* (MoU), dan dokumen sejenisnya	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Dokumen *Loan Agreement* (PHLN) seperti : D*raft Agreement, Legal Opinion* , Surat menyurat dengan *Lender*	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Dokumen Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, a.l. : Usulan Luncuran Dana	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	6. Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya : – *Reimbursement*	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	– *Direct Payment/Transfer Procedure* – *Special Commitment/ L/C Opening* – *Special Account/Imprest Fund*					
	7. Dokumen Otorisasi Penarikan Dana *(Payment Advice)*	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	8. Dokumen Realisasi Pencairan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, antara lain: SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya.	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	9. *Replenishment* (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain: *No Objection Letter* (NOL), *Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization* (WA), *Statement of Expenditure* (SE)	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	10. *Staff Appraisal Report*	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	11. *Report* /Laporan yang terdiri dari: – *Progress Report* – *Monthly Report* – *Quarterly Report*	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	12. Laporan Hutang Daerah : – Laporan Pembayaran Hutang Daerah – Laporan Posisi Hutang Daerah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	13. *Completion Report/Annual Report*	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	14. Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	D. PENGELOLAAN APBD/DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)					
	1. Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan: – Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran – Pejabat Pembuat Komitmen – Kuasa Pengguna Barang/Jasa – Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	– Pejabat Penandatanganan SPM – Bendahara Penerimaan/Pengeluaran – Pengelola Barang termasuk berita acara serah terima jabatan					
	E. SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD)					
	1. Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Dokumen Kebijakan Akuntansi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/ Triwulanan/Semesteran	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	F. PENYALURAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN					
	1. Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara atas Pengguna Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Spesimen Tanda Tangan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya: - SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil – Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l. : Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank – Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	3. Buku Rekening Bank	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	4. Keputusan Pembukuan Rekening	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	5. Pembukuan anggaran terdiri dari : Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan Daftar Pembukuan Pencarian/ Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP) dan Rekening Koran	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	G. PENERIMAAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN					
	1. Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Berkas Penerimaan Pajak termasuk pph 21, pph 22, PPh 23, dan PPn, Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	H. PENGELOLAAN ANGGARAN PEMILU					
	1. Dokumen Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan PEMILU dari APBD					
	a. Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Provinsi, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Berkas Pembahasan RKA pilkada dan Bantuan Pemilu	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Provinsi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Provinsi dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	g. Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	h. Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	i. Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	I. PELAKSANAAN ANGGARAN PILKADA DAN ANGGARAN BIAYA BANTUAN PEMILU					
	1. Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Berkas Setor Sisa Dana Pilkada/Pemilu termasuk Setor Komisi Pengadaan Barang/Jasa, Rabat, Bunga, Jasa Giro	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/ Pergeseran/Revisinya	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	J. PELAKSANAAN ANGGARAN OPERASIONAL PEMILU					
	1. Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/ Revisinya	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD Provinsi, Panwasda dan Pemegang Uang Muka Cabang (PUMC) PPK dan Panwas	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Berkas Penyaluran Biaya Pemilu ke PPK, PPS dan KPPS termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	K. PEMERINTAHAN DESA					
	1. Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Program Kerja Pemerintah Desa : a. Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa b. Rencana Kerja Perangkat Desa	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	3. Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Bukti Pungutan Desa	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Dokumen Pembebasan Eks Tanah Kas Desa : a. Peraturan Desa tentang Pembebasan Tanah Kas Desa b. Pemohonan tentang Pembebasan Tanah Kas Desa c. Hasil persetujuan/rapat d. Rekomendasi Bupati tentang persetujuan pembebasan tanah e. Persetujuan Bupati tentang hasil musyawarah harga tanah kas Desa f. Proses Pelepasan Hak Tanah Kas Desa g. Pembelian Tanah Pengganti h. Musyawarah tanah Hak Milik untuk dibeli menjadi pengganti i. Rekomendasi Bupati tentang Persetujuan Pembebasan Tanah j. Pelepasan Tanah Hak Milik menjadi Kas Desa	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	6. Dokumen Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa a. Sewa Tanah Kas Desa tidak berubah fungsi b. Sewa Tanah Kas Desa berubah fungsi 1) Peraturan Desa tentang sewa tanah kas Desa 2) Penawaran dari Penyewa 3) Rekomendasi Bupati tentang ijin penyewaan tanah kas Desa 4) Permohonan Ijin Gubernur 5) Ijin Gubernur	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	7. Dokumen Perubahan Peruntukkan Tanah Kas Desa a. Peraturan Desa tentang perubahan peruntukkan Tanah Kas Desa b. Rekomendasi Bupati tentang persetujuan pembebasan tanah c. Ijin tertulis Gubernur	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	8. Surat Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Pamong	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	9. Lain-lain Pendapatan Asli Desa	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	10. Pembukuan Kas Desa a. Buku Kas Umum b. Buku Bantu Pengeluaran	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	11. Bukti Pengeluaran Keuangan Kas Desa	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	12. Laporan Keuangan Kas Desa	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	13. Pertanggungjawaban Kepala Desa (Laporan Keuangan Tahunan Desa)	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	L. PEMERIKSAAN/PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH					
	1. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional: a. LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) b. MHP (Memorandum Hasil Pemeriksaan) c. Tindak Lanjut/ Tanggapan LHP	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah : a. Tuntutan Perbendaharaan b. Tuntutan Ganti Rugi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	M. PERIMBANGAN KEUANGAN					
	1. KEBIJAKAN					
	Rumusan kebijakan di bidang dana perimbangan, non dana perimbangan, pajak daerah dan retribusi daerah, dan pembiayaan meliputi:	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Penyiapan Bahan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Perumusan Kebijakan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Penetapan dalam bentuk Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK)	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2. DANA PERIMBANGAN: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)					
	a. Pendataan informasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Perencanaan Alokasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Rincian Rencana Alokasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. NON DANA PERIMBANGAN : Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Keistimewaan DIY, Dana Desa, Dana Darurat					
	a. Pendataan informasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Perencanaan Alokasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Rincian Rencana Alokasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. HIBAH DAERAH					
	a. Pendataan Informasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Perencanaan Alokasi Hibah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Alokasi Hibah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Perumusan Perjanjian Hibah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. PEMBIAYAAN DAERAH			Terbuka		
	a. Persetujuan/Penolakan atas usulan Penerbitan Obligasi Daerah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Persetujuan/Penolakan atas usulan Pinjaman Daerah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Persetujuan/Penolakan atas pelampauan defisit APBD	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	6. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	a. Pendataan Informasi terkait pengembangan potensi daerah PAD	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	b. Sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang PDRB	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Rekomendasi Hasil Sinkronisasi Raperda PDRD	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Penghitungan potensi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	7. PELAKSANAAN TRANSFER					
	a. Transfer Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH)	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Transfer Non Dana Perimbangan (Dana Otsus,DID, Dana Keistimewaan, Dana Desa)	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Transfer Hibah Daerah, Pinjaman Daerah, dan Dana Darurat	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Rekonsiliasi Transfer	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	8. LAPORAN KEUANGAN					
	a. Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Laporan Keuangan Pembiayaan, Hibah, dan Dana Darurat	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	9. EVALUASI KEUANGAN DAERAH					
	a. Evaluasi Dana Desentralisasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Biasa /Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Penilaian Kinerja Keuangan Daerah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	10. PENGEMBANGAN PENDANAAN DAERAH					
	a. Pengembangan Pendanaan Perkotaan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengembangan Pendanaan Perdesaan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pengembangan Pendanaan Daerah Otonom Baru (DOB)	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Kawasan Ekonomi Khusus dan Perbatasan, Kawasan Daerah Tertinggal dan Rawan Bencana	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	11. DATA KEUANGAN DAERAH DAN DATA NON KEUANGAN DAERAH					
	a. Pengumpulan data	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Verifikasi dan pengolahan data	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Informasi Keuangan Daerah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	12. PEMANTAUAN, SUPERVISI DAN EVALUASI					
	Pemantauan Dan Evaluasi di Bidang Perimbangan Keuangan, meliputi:					
	a. Penyiapan Bahan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pelaksanaan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Laporan Pelaksanaan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	13. SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS					
	Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Di Bidang Perimbangan Keuangan, meliputi:					
	a. Penyiapan Bahan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pelaksanaan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Laporan Pelaksanaan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	14. KAJIAN DAN DISEMINASI					
	Kajian dan Desiminasi Di Bidang Perimbangan Keuangan, meliputi:					
	a. Penyiapan Bahan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pelaksanaan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Laporan Pelaksanaan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Hasil Kajian	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
					penyelenggaraan negara, dan/atau ketertiban umum.	
	15. BAHAN MASUKAN NOTA KEUANGAN					
	Bahan masukan penyusunan nota keuangan di bidang perimbangan keuangan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

2. SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP FASILITATIF FUNGSI KEPEGAWAIAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANJAR

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
II.	KEPEGAWAIAN					
	B. Kebijakan di bidang manajemen kepegawaian					
	1. Pengkajian, Pengusulan Kebijakan, dan Naskah Akademik 2. Penyusunan kebijakan 3. Perumusan kebijakan 4. Pemberian masukan dan dukungan 5. Penetapan kebijakan 6. Memorandum of Understanding	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Unit pengolah terkait
	C. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara					
	1. Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara a. Bahan penyusunan rencana kebutuhan b. Analisis Kebutuhan 1) Aparatur Sipil Negara 2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) c. Pengolahan data kebutuhan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Perencanaan Pertimbangan Formasi a. Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN b. Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			dan eksternal serta penegak hukum		pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
	4. Standarisasi Jabatan a. Informasi Jabatan b. Kompetensi Jabatan c. Klasifikasi Jabatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	D. Formasi dan Pengadaan Pegawai					
	1. Formasi ASN a. Usulan formasi disertai dengan: 1) Analisa Jabatan 2) Beban Kerja b. Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN c. Persetujuan Formasi d. Penetapan Formasi e. Penetapan Formasi Khusus	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Pengadaan ASN a. Proses Rekrutmen ASN b. Penetapan Pengumuman Kelulusan c. Berkas Lamaran yang tidak diterima d. Nota Usul Pengangkatan ASN e. Open Bidding (Seleksi Terbuka Jabatan)	Biasa/ Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Sistem Rekrutmen ASN	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	a. Pengelolaan sistem rekrutmen 1) Standar dan prosedur sistem rekrutmen dan seleksi pegawai 2) Kisi kisi dan materi soal kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian 3) Evaluasi dan analisis kelayakan materi kompetensi	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	b. Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi 1) Pelayanan teknis dan administrasi seleksi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian 2) Kompetensi kepegawaian 3) Penyelenggaraan dan pengolahan seleksi a. Penyiapan dan pengelolaan sertifikat kelulusan b. Pengelolaan laporan dan evaluasi seleksi		dan eksternal serta penegak hukum		mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
	E. Mutasi Pegawai					
	1. Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN/BKD	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	2. Usulan Kenaikan pangkat/golongan/jabatan	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	3. Usulan Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural/fungsional	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	4. Penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan hukum pegawai	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	5. Usulan Peninjauan Masa Kerja	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional,	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
					dan/atau ketertiban umum.	
	6. Berkas Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	1. Usulan Tugas Belajar/Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/Magang/Ujian Dinas/Praktek Kerja di Instansi lain/Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta 1) Perencanaan dan penyusunan analisis kebutuhan 2) Pelaksanaan 3) Pelaporan 4) Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)/Sertifikat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Usulan Penyesuaian ijazah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Penyusunan sistem karier	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	4. Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	5. Angka Kredit a. Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit b. Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	F. Kinerja Aparatur Sipil Negara	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	1. Hasil penilaian kinerja dan standar kerja a. Sistem penilaian kerja ASN b. Standar kinerja jabatan pegawai ASN c. Penilaian kinerja pegawai ASN	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	2. Pengelolaan database dan analisis sistem informasi kinerja pegawai ASN a. Pengelolaan database penilaian kinerja pegawai ASN b. Analisis sistem informasi kinerja pegawai ASN c. Teknis penilaian kinerja ASN	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	3. Hasil Evaluasi dan pemantauan penilaian kinerja dan standar kinerja jabatan pegawai ASN	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	G. Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	1. Kode Etik Pegawai	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	2. Disiplin a. Penegakan Disiplin	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	b. Peningkatan Disiplin		dan eksternal serta penegak hukum		terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	
	3. Pemberhentian	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	a. Pemberhentian Dengan Hormat					
	b. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	c. Pemberhentian Sementara	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	4. Pensiun ASN a. Administrasi Pensiun ASN 1) Administrasi Pensiun ASN 2) Perekaman dan Pemeliharaan data pensiun b. Penetapan Pensiun ASN c. Penetapan Pertimbangan teknis pensiun ASN d. Pensiun Pejabat Negara dan Janda/ Dudanya 1) Administrasi pensiun Pejabat Negara (Sekretariat) 2) Penyiapan pensiun pejabat negara (Setneg/Setkab) 3) Penetapan pensiun janda/duda pejabat negara (BKN)	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	H. Bantuan Hukum	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	1. Pemberian Bantuan Hukum	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	2. Bantuan Hukum Pegawai	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	I. Status dan Kedudukan Pegawai					
	1. Pertimbangan status kepegawaian a. Analisis status kepegawaian b. Penyusunan pertimbangan status kepegawaian	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	2. Pertimbangan kedudukan kepegawaian a. Analisis kedudukan kepegawaian b. Penyusunan pertimbangan kedudukan kepegawaian	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	3. Penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	4. Perselisihan/sengketa kepegawaian	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	J. Sistem Informasi Kepegawaian					
	1. Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian					
	a. Pengolahan Data 1) Pengelolaan database kepegawaian ASN 2) Penyelesaian permasalahan data kepegawaian ASN	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	b. Informasi Kepegawaian 1) Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian ASN 2) Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian non ASN 3) Pengembangan dan pemanfaaatan kartu pegawai elektronik	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	2. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	3. Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektonik	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	a. Arsip kepegawaian elektronik 1) Verifikasi dan distribusi arsip kepegawaian 2) Perekaman dan arsip kepegawaian	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	3) Pengelolaan arsip kepegawaian elektronik		dan eksternal serta penegak hukum		penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	
	b. Arsip Kepegawaian Fisik	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	K. Pengawasan dan pengendalian					
	1. Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan b. Monitoring dan Evaluasi c. Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	2. Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan b. Monitoring dan Evaluasi c. Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	3. Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan b. Monitoring dan Evaluasi c. Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	4. Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan b. Monitoring dan Evaluasi c. Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	5. Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			eksternal serta penegak hukum		penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	
	6. Berkas Sanggahan terhadap permasalahan Tenaga honorer	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	L. Administrasi Pegawai	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	1. Surat Perintah Dinas/Surat Tugas	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Cuti Alasan Penting	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	4. Cuti Besar dan Cuti Diluar Tanggungan Negara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	5. Dokumentasi Identitas Pegawai a. Usul Penetapan Karpeg/KPE/Karis/Karsu b. Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan c. Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	6. Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	7. Berkas Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/tunjangan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	M. Kesejahteraan Pegawai					
	1. Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai/BPJS	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	4. Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	5. Berkas tentang Layanan Pakaian Dinas	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	6. Berkas tentang Layanan Pegawai yang meninggal karena Dinas	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	7. Berkas tentang Pemberian Tali Kasih	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	8. Berkas tentang Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	9. Berkas tentang Layanan Olahraga dan Rekreasi	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	10. Berkas tentang Medical Record	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	N. Administrasi Perseorangan	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	1. Berkas perseorangan Aparatur Sipil Negara a. Berkas Lamaran yang diterima b. Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya c. Nota Persetujuan / Pertimbangan Kepala BKN d. SK Pengangkatan CASN e. Hasil Pengujian Kesehatan	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	f. Surat Tanda Lulus Pelatihan Prajabatan g. SK Pengangkatan ASN h. SK Peninjauan Masa Kerja i. SK Kenaikkan Pangkat j. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/ Menduduki Jabatan dan Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan k. SK Pengangkatan dalam Jabatan atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/ Fungsional l. SK Perpindahan Wilayah Kerja m. SK. Perpindahan Antar Instansi	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	n. SK. Cuti di luar Tanggungan Negara (CLTN) o. Berita Acara Pemeriksaan p. SK Hukuman Jabatan / Hukuman Disiplin ASN q. SK Perbantuan/Dipekerjakan di luar Instansi Induk r. SK Penarikan Kembali dari Perbantuan / Dipekerjakan s. SK Pemberian Uang Tunggu t. SK Pembebasan dari Jabatan Organik diangkat sebagai Pejabat Negara u. SK Pengalihan ASN v. SK Pemberhentian Sebagai ASN w. Surat Keterangan Pernyataan Hilang x. Surat Keterangan Kembali ASN yang dinyatakan Hilang y. SK Penggantian Nama z. Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran aa. Akta Nikah / Cerai bb. Akta Kelahiran cc. Isian Formulir PUASN dd. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ASN dan Jabatan ee. Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol / Ormas/ LSM ff. Surat Keterangan Mutasi Keluarga gg. Surat Keterangan Meninggal Dunia/hilang hh. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan ii. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional jj. Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus kk. Surat Pemberitahuan Kenaikkan Gaji Berkala ll. Surat Tugas/Izin Belajar Dalam/ Luar Negeri mm. Surat Izin Berpergian Ke Luar Negeri nn. Kartu Daftar Ulang (Kardaf) ASN oo. Ijazah / Sertifikat pp. SK Penempatan / Penarikan Pegawai qq. SK Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk rr. Surat Pertimbangan Status ASN ss. SK Pengaktifan Kembali Sebagai ASN					

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	tt. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah uu. SK. Pensiun	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	2. Berkas perseorangan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan perjajian Kerja)	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	3. Berkas perseorangan Pejabat Negara dan Pejabat lainnya yang disetarakan	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	a. Bupati dan Wakil Bupati	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	c. Pejabat negara lainnya yang ditentukan Undang-Undang	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	4. Berkas perseorangan Sekretaris Daerah Kabupaten	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	5. Berkas perseorangan Kepala Desa	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	6. Berkas perseorangan ASN yang berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	O. Penilaian Kompetensi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	1. Berkas Penilaian Kompetensi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Hasil Penilaian Kompetensi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

3. SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP FASILITATIF FUNGSI NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANJAR

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
III	FUNGSI NON KEUANGAN NON KEPEGAWAIAN					
	A. HUKUM					
	1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	a. Penyiapan kebijakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Perumusan dan penyusunan bahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	d. Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Program Legislasi / Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemda) a. Bahan/materi program legislasi daerah dari SKPD b. Program legislasi daerah / Propemperda	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Peraturan Daerah termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai dengan diundangkan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	4. Peraturan Bupati termasuk naskah akdemik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	5. Keputusan / Ketetapan Bupati termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	6. Keputusan Sekretaris Daerah termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	7. Instruksi / Surat Edaran Bupati	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	8. Instruksi / Surat Edaran Kepala SKPD / Pejabat Eselon II dan III Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	9. Surat Perintah Bupati	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	10. Surat Perintah Pejabat setingkat Eselon II dan III	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	11. Dokumentasi Hukum : Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dan Peraturan peraturan lain yang dijadikan sebagai referensi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	12. Standar, Pedoman, Prosedur Kerja, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis yang bersifat nasional/regional/instansional	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	13. Nota kesepahaman / Memorandum of Understanging (MoU)/ Kontrak/ Perjanjian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	14. Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum a. Berkas yang berhubungan dengan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum b. Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan hukum	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	15. Kasus / Sengketa Hukum					
	a. Pidana Berkas tentang kasus/sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran - Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis - Berkas pembelaan dan bantuan hukum - Telaah hukum dan opini hukum	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Perdata Berkas tentang kasus/sengketa Perdata, baik kejahatan maupun pelanggaran - Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis - Berkas pembelaan dan bantuan hukum - Telaah hukum dan opini hukum	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Tata Usaha Negara Berkas tentang kasus/sengketa Tata Usaha Negara, baik kejahatan maupun pelanggaran - Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis - Berkas pembelaan dan bantuan hukum - Telaah hukum dan opini hukum	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	d. Arbitrase Berkas tentang kasus/sengketa Arbitrase, baik kejahatan maupun pelanggaran - Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis - Berkas pembelaan dan bantuan hukum - Telaah hukum dan opini hukum	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	e. Sengketa adat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	16. Bantuan / Konsultasi Hukum / Advokasi Berkas tentang pemberian bantuan / konsultasi hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	B. HUBUNGAN MASYARAKAT					
	1. Keprotokolan a. Penyelenggaraan acara kedinasan (Upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari hari besar) b. Buku tamu c. Agenda kegiatan pimpinan Lemabaga Instansi d. Kunjungan dinas dalam dan luar negeri 4. Kunjungan dinas pimpinan organisasi/instansi (Pejabat Negara dan Eselon I) 5. Kunjungan dinas Pejabat lain/pegawai e. Daftar nama/alamat kantor/pejabat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Dokumentasi/liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media: kertas/foto/video/rekaman suara/multimedia	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi kelembagaan : a. Kliping koran	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	b. Brosur/leaflet/poster/plakat c. Pengumuman/pemberitaan		dan eksternal serta penegak hukum		terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
	4. Hubungan antar Lembaga Negara dan badan Pemerintah/Instansi a. Hubungan antar Lembaga Pemerintah b. Hubungan dengan Organisasi sosial/LSM c. Hubungan dengan Perusahaan d. Hubungan dengan perguruan tinggi/sekolah termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG) / Praktek Kerja Lapangan (PKL) e. Forum Kehumasan (Bakohumas/Perhumas) f. Hubungan dengan media massa: 1) Siaran pers/konfrensi pers/press release 2) Kunjungan wartawan/peliputan 3) Wawancara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	5. Dengar pendapat/hearing DPRD	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	6. Bahan/materi pidato/sidang DPRD, Muspida Kabupaten	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	7. Penerbitan majalah, buletin, koran, dan jurnal	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	8. Publikasi melalui media cetak maupun elektronik	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	9. Pameran/sayembara/lomba, Festival, pembuatan spanduk dan iklan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	10. Penghargaan/ tanda kenag-kenangan administrasi pemberian penghargaan/tanda kenang-kenangan kepada masyarakat yang memiliki jasa prestasi besar	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	11. Ucapan terima kasih, ucapan selamat, belasungkawa, permohonan maaf	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
		Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	C. ORGANISASI					
	1. Susunan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Uraian Jabatan, Tugas dan Fungsi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	4. Tata Laksana : a. Standar Operasional Prosedur b. Mekanisme Kerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	5. Pembinaan dan Evaluasi Organisasi a. Evaluasi Organisasi, Tugas dan Fungsi b. Evaluasi Uraian Jabatan, Analisa beban kerja c. Uraian Tata Laksana	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	6. Pengembangan Kinerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	D. PENGAWASAN / INSPEKTORAT					
	1. Rencana Pengawasan a. Rencana Strategis Pengawasan b. Rencana Kerja Tahunan c. Rakor Pengawasan Tingkat Nasional	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Pelaksanaan Pengawasan a. Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan Tindak Lanjut (TL) b. Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang tidak memerlukan Tindak Lanjut (TL)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	c. Laporan Hasih Audit Investigasi (LHAI), yang mengandung unsur tindak pidana korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut d. Laporan perkembangan Penanganan Surat Pengaduan masyarakat e. Laporan Pemutahiran Data f. Laporan Perkembangan Barang Milik Negara g. Laporan Hasil Pemeriksaan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Laporan Hasil Pemeriksaan Non Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (Non PKPT) h. Laporan Hasil Pemeriksaan Reksus (Pemeriksaan Khusus) i. Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) j. Review Renja k. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah l. Review Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah m. Review Renstra n. Review DPA o. Hasil Evaluasi Tindak Lanjut	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	E. PERLENGKAPAN					
	1. Rencana Kebutuhan Barang a. Usulan Kebutuhan BMN satuan Kerja/Wilayah/Kementerian b. Dokumen Pemetaan Rencana Kebutuhan BMN c. Dokumen Analisis Kebutuhan BMN lima tahunan d. Dokumen Persetujuan Kebutuhan BMN	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2. Pengadaan Barang dan Jasa/Hibah a. Pengadaan barang Persediaan (Barang habis pakai) b. Pengadaan Aset Tetap c. Dokumen Pekerjaan Konstruksi d. Dokumen Jasa Konsultasi dan jasa lainnya e. Dokumen Pengadaan Hibah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Penyimpanan dan Penyaluran a. SK Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan - Surat Pemberitahuan Pemeriksaan barang - Berita Acara Pemeriksaan barang - Surat Jalan Pengiriman Barnag ke Gudang - Berita Acara serah terima Hasil Pekerjaan - Berita Acara Serah Terima Barang dari PPK ke - Kabag Penyimpanan dan Penyaluran - Buku Persediaan - Laporan Persediaan per semester b. Penyaluran Barang Milik Negara (BMN) - Surat Permohonan Permintaan barang dan Unit Kerja - Bon Permintaan Barang - Surat Pemberitahuan Pengiriman barang dari penyedia	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	- Surat Pemberitahuan Barang Pengiriman Barang - Bukti Pengiriman Barang - Berita Acara Serah Terima barang	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	4. Penatausahaan BMN a. Daftar Barang Ruangan (DBR) b. Daftar Barang Lainnya (DBL) c. Kartu Identitas Barang (KIB) d. Laporan Barang Kuasa Pengguna e. Laporan Barang Pengguna f. Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan g. Laporan Perkembangan BMN	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	5. Penghapusan barang Milik Negara (BMN) a. Berkas Usulan Penghapusan BMN b. Penetapan Penghapusan BMN c. Risalah Lelang d. Dokumen Penarikan BMN e. Berita Acara Serah Terima BMN ke Masyarakat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	6. Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN a. Berkas Usulan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN b. Kontrak/Perjanjian Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Penetapan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	7. Penetapan status penggunaan BMN a. Berkas Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN b. Penetapan Status Penggunaan BMN c. Berkas Usulan pengalihan Status Penggunaan BMN d. Penetapan pengalihan Status Penggunaan BMN	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	8. Bukti-bukti Kepemilikan Asset a. Sertifikat tanah b. IMB c. Gambar/Denah bangunan/instalasi listrik, air dan gas dan As Built Drawing d. BPKB e. STNK	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	F. PENDIDIKAN DAN LATIHAN					
	1. Pedoman-pedoman kediklatan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	2. Kurikulum-kurikulum diklat	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	3. Modul-modul diklat	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	4. Panduan fasilitator	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	5. Saran/Rekomendasi penyelenggaraan Diklat	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	6. Notulen Sosialisasi/Rapat koordinasi kebijakan Diklat	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	7. Akreditasi Lembaga Diklat - Surat Permohonan akreditasi - Laporan hasil Verifikasi lapangan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	- Berita acara rapat verifikasi - Berita acara rapat Tim Penilai - Surat Keputusan Penetapan Akreditasi - Sertifikat Akreditasi - Laporan Akreditasi Lembaga Diklat	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	8. Sertifikat sumber daya manusia kediklatan - Surat Permohonan akreditasi - Laporan hasil Verifikasi lapangan - Berita acara rapat verifikasi - Berita acara rapat Tim Penilai - Surat Keputusan Penetapan Sertifikasi - Sertifikat Sertifikasi - Laporan sertifikasi individual	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	9. Sistem Informasi diklat - Data lembaga diklat - Data prasarana Diklat - Data sarana Diklat - Data pengelola Diklat - Data penyelenggara Diklat - Data Widyaiswara - Data program diklat	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	10. Registrasi sertifikat / STPL peserta Diklat a. Surat permohonan kode registrasi b. Buku registrasi c. Surat penyampaian kode registrasi	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	11. Rencana tahunan Diklat	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	12. Rencana penyelenggaraan Diklat	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	13. Penyelenggaraan Diklat - Surat pemanggilan peserta - Surat Keputusan Tim Penyelenggara Dillat - Surat Keputusan tim Pengajar Diklat - Panduan Diklat - Laporan Panitia Penyelenggara Diklat - Sambutan Pembukaan Penyelenggaraan Diklat - Daftar peserta Diklat - Bahan ajar Diklat	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	- Daftar hadir peserta Diklat - Daftar hadir widyaiswara - Formulir Evaluasi Diklat - Formulir Evaluasi Widyaiswara - Hasil Formulasi Evaluasi peserta Diklat - Sertifikat/STTPL - Sambutan penutupan Diklat	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	14. Laporan penyelenggaraan Diklat					
	15. Evaluasi penyelenggaraan Diklat	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	16. Evaluasi alumni pasca Diklat	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	G. TEKNOLOGI INFORMASI					
	1. Rencana Strategis/master plan Pembangunan Sistem Informasi (SIM)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Dokumentasi Arsitektur - Sistem Informasi - Sistem Aplikasi - Infrastruktur	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Dokumentasi Implementasi : - Sistem Informasi - Sistem Aplikasi - Infrastruktur	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	4. Perekaman dan Pemutakhiran Data : - Formulir Isian - Daftar Petugas Perekaman - Jadwal Pelaksanaan - Laporan hasil perekaman dan pemutakhiran data	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	5. Migrasi Sistem Aplikasi dan Data : - Perencanaan Migrasi - Pelaksanaan Migrasi - Berita Acara Kegiatan Migrasi - Daftar Sistem Aplikasi dan Data yang dimigrasi - Laporan hasil migrasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	6. Dokumen hosting : - Formulir permintaan hosting - Laporan hasil uji kelayakan - Laporan pelaksanaan hosting	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	7. Layanan *Back-up* Data Digital	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

3. SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP SUBSTANTIF PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANJAR

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
I.	URUSAN PERTANIAN					
	A. KEBIJAKAN					
	Kebijakan di bidang Hortikultura, Sarana Prasarana Tanaman Pangan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	1. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Penyiapan Bahan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Perumusan Kebijakan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Penetapan berbentuk NSPK	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	B. PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	1. Perbibitan Ternak					
	a. Produksi Bibit Ternak Ruminansia 1) Produksi Bibit Ternak Ruminansia Besar 2) Produksi Bibit Ternak Ruminansia Kecil	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia 1) Produksi Bibit Ternak Unggas 2) Produksi Bibit Aneka Ternak	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak 1) Penilaian Bibit Ternak 2) Pelepasan Bibit Ternak	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Mutu Bibit ternak 1) Sertifikasi Bibit Ternak 2) Pengawasan Mutu Bibit Ternak	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	e. Pengembangan Bibit Ternak 1) Analisis Pengembangan Bibit Ternak 2) Kelembagaan Pengembangan Bibit Ternak	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Surat Rekomendasi & Persetjuan Pemasukan/ Pengeluaran	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Pakan Ternak					
	a. Bahan Pakan 1) Bahan Pakan Asal Hewan 2) Bahan Pakan Asal Tumbuhan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pakan Hijauan 1) Budidaya Pakan Hijauan 2) Kawasan Penggembalaan dan Integrasi Ternak	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pakan Olahan 1) Produksi Pakan Olahan 2) Pengolahan Pangan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Mutu Pakan 1) Sertifikasi Pakan 2) Pengawasan Pakan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Budidaya Ternak					
	a. Ternak Potong 1) Identifikasi Sumber Daya Tanaman Semusim 2) Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Ternak Perah 1) Penyiapan Perbenihan Tanaman Semusim 2) Bimbingan Peredaran Benih Tanaman Semusim	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	c. Ternak Unggas dan Aneka Ternak 1) Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Semusim 2) Penerapan Teknologi Budidaya Tenaman Semusim	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Usaha dan Kelembagaan 1) Pemberdayaan Tanaman Semusim 2) Kelembagaan Tanaman Semusim	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Kesehatan Hewan					
	a. Pengamatan Penyakit Hewan 1) Epidemiologi dan Ekonomi Veteriner 2) Penyidikan Penyakit Hewan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan 1) Pencegahan Penyakit Hewan 2) Pemberantasan Penyakit Hewan 3) Rekomendasi MBM	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Perlindungan Hewan 1) Analisis Risiko Penyakit Eksotik 2) Kesiagaan Darurat Penyakit Hewan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan 1) Kelembagaan Kesehatan Hewan 2) Sumber Daya Kesehatan Hewan 3) Laporan THL 4) Proposal Poskeswan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Pengawasan Obat Hewan 1) Mutu Obat Hewan 2) Peredaran Obat Hewan 3) Pendaftaran Obat Hewan 4) Rekomendasi Obat Hewan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	5. Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen					
	a. Pasca panen 1) Teknologi Pasca panen 2) Sarana Pasca panen	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	b. Higien Sanitasi 1) Penerapan Higiene Sanitasi 2) Inspeksi Higiene Sanitasi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan 1) Pengawasan Sanitary 2) Pengawasan Keamanan Produk Hewan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan 1) Zoonosis 2) Kesejahteraan Hewan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan 1) Pengujian Produk Hewan; 2) Registrasi dan Sertifikasi Produk Hewan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Surat Rekomendasi & Persetjuan Pemasukan/ Pengeluaran	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	C. PERKEBUNAN					
	1. Tanaman Semusim	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	a. Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya 1) Identifikasi Sumber Daya Tanaman Semusim 2) Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Perbenihan 1) Penyiapan Perbenihan Tanaman Semusim 2) Bimbingan Peredaran Benih Tanaman Semusim	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Budidaya 1) Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Semusim 2) Penerapan Teknologi Budidaya Tenaman Semusim	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	d. Pemberdayaan dan Kelembagaan 1) Pemberdayaan Tanaman Semusim 2) Kelembagaan Tanaman Semusim	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Tanaman Rempah dan Penyegar					
	a. Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya 1) Identifikasi Sumber Daya Tanaman Rempah dan Penyegar 2) Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah dan Penyegar	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Perbenihan 1) Penyiapan Perbenihan Tanaman Rempah dan Penyegar	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2) Bimbingan Peredaran Tanaman Rempah dan Penyegar					
	c. Budidaya 1) Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Rempah dan Penyegar 2) Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Rempah dan Penyegar	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pemberdayaan dan Kelembagaan 1) Pemberdayaan Tanaman Rempah dan Penyegar 2) Kelembagaan Tanaman Rempah dan Penyegar	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Tanaman Tahunan					
	a. Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya 1) Identifikasi Sumber Daya Tanaman Tahunan 2) Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Tahunan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Perbenihan 1) Penyiapan Perbenihan Tanaman Tahunan 2) Bimbingan Peredaran Benih Tanaman Tahunan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	c. Budidaya 1) Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Tahunan 2) Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Tahunan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pemberdayaan dan Kelembagaan 1) Pemberdayaan Tanaman Tahunan 2) Kelembagaan Tanaman Tahunan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Perlindungan Perkebunan					
	a. Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim 1) Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim 2) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar 1) Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar 2) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan tanaman tahunan 1) Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan 2) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran 1) Dampak Perubahan Iklim 2) Pencegahan Kebakaran	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	5. Pascapanen dan Pembinaan Usaha					
	a. Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar 1) Teknologi Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar 2) Penerapan Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pascapanen Tanaman Tahunan 1) Teknologi Pascapanen Tanaman Tahunan 2) Penerapan Pascapanen Tanaman Tahunan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan 1) Bimbingan Usaha Perkebunan 2) Perkebunan Berkelanjutan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik 1) Gangguan Usaha Perkebunan 2) Penanganan Konflik	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	D. HORTIKULTURA					
	1. Perlindungan Hortikultura	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	a. Perlindungan Tanaman Buah 1) Teknologi Perlindungan Tanaman Buah 2) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat 1) Teknologi Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat 2) Pengendalian Organisme Tumbuhan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	c. Perlindungan Tanaman Florikultura 1) Teknologi Perlindungan Tanaman Florikultura	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Perbenihan Hortikultura	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	a. Penilaian Varietas	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	1) Bahan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Penilaian Varietas	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2) Bahan Penyiapan Bahan Penyusunan Kebijakan di Bidang Penilaian Varietas	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3) Bahan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Teknis di Bidang Penilaian Varietas	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	4) Bahan Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Penilaian Varietas	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	5) Bahan Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis di Bidang Penilaian Varietas	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	6) Bahan Penyiapan Bahan Evaluasi di Bidang Penilaian Varietas	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	7) Bahan Penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	8) Bahan Penyiapan dan pemeliharaan dokumen seksi Penilaian Varietas	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Pengawasan Mutu Benih					
	1) Bahan Penyipan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi pengawasan mutu benih	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2) Bahan Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan mutu benih tanaman Hortikultura	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3) Bahan Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan mutu benih tanaman Hortikultura	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	4) Bahan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, Prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan mutu benih tanaman hortikltura	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	5) Bahan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang pengawasan mutu benih tanaman hotikultura	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	6) Bahan Penyiapan bahan evaluasi di bidang pengawasan mutu benih tanaman hortikultura	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	7) Bahan Tugas Kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	1. Perluasan dan Pengelolaan Lahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	a. Basis Data Lahan 1) Identifikasi Lahan 2) Analisis dan Penyajian Data Lahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Pengendalian Lahan 1) Identifikasi dan Analisis Lahan 2) Rekomendasi Teknis pengendalian lahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan 1) Identifikasi dan Analisis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan 2) Bimbingan Teknis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Perluasan Kawasan Tanaman Pangan 1) Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan tanaman pangan 2) Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan tanaman pangan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Perluasan Kawasan Hortikultura 1) Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan hortikultura 2) Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan hortikultura	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2. Pengelolaan Air Irigasi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	a. Pengembangan Sumber Air 1) Air Permukaan 2) Air Tanah	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air 1) Pengembangan Jaringan 2) Optimasi Air	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup 1) Iklim 2) Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Kelembagaan 1) Identifikasi Kelembagaan 2) Pengembangan Kelembagaan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Pupuk Pestisida					
	a. Pupuk Organik dan Pembenah Tanah 1) Tanaman Pangan 2) Hortikultura dan Perkebunan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pupuk Anorganik 1) Tanaman Pangan 2) Hortikultura dan Perkebunan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pestisida 1) Pestisida Kimia 2) Pestisida Hayati	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pengawasan Pupuk dan Pestisida 1) Pengawasan Pupuk 2) Pengawasan Pestisida	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Alat dan Mesin					
	a. Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian 1) Tanaman Pangan dan Hortikultura 2) Perkebunan dan Peternakan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin 1) Tanaman Pangan dan Hortikultura 2) Perkebunan dan Peternakan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	c. Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian 1) Kelembagaan 2) Pelayanan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	E. TANAMAN PANGAN					
	1. Perbenihan Tanaman Pangan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	a. Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih 1) Penilaian Varietas 2) Pengawasan Mutu Benih	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Produksi Benih Serealia 1) Padi 2) Serealia Non Padi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi 1) Aneka Kacang 2) Aneka Umbi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Kelembagaan Benih 1) Kelembagaan Produksi 2) Kelembagaan Pengawasan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Budidaya Serealia	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	a. Padi Irigasi dan Rawa 1) Padi Irigasi 2) Padi Rawa	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering 1) Padi Tadah Hujan 2) Padi Lahan Kering	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Jagung 1) Intensifikasi Jagung 2) Pengembangan Jagung	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Serealia 1) Intensifikasi Serealia Lain 2) Pengembangan Serealia Lain	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Budidaya Aneka Kacang dan Umbi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	a. Kedelai 1) Intensifikasi Kedelai 2) Pengembangan Kedelai	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Ubi Kayu 1) Intensifikasi Ubi Kayu 2) Pengembangan Ubi Kayu	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Aneka Kacang 1) Intensifikasi Aneka Kacang 2) Pengembangan Aneka Kacang	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Aneka Umbi 1) Intensifikasi Aneka Umbi 2) Pengembangan Aneka Umbi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Perlindungan Tanaman Pangan					
	a. Pengelolaan Data Organisme Pengganggu Tumbuhan 1) Monitoring dan Analisis Data organisme pengganggu tumbuhan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2) Evaluasi dan Pelaporan data organisme pengganggu tumbuhan.					
	b. Teknologi pengendalian organisasi pengganggu tumbuhan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Pascapanen Tanaman Pangan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	a. Padi 1) Teknologi pascapanen padi. 2) Sarana pascapanen padi.	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Jagung dan Serealia Lain 1) Teknologi pascapanen jagung dan serealia lain. 2) Sarana pascapanen jagung dan serealia lain.	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Kedelai dan Aneka Kacang 1) Teknologi pascapanen kedelai dan aneka kacang. 2) Sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang.	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	d. Aneka Umbi 1) Teknologi pascapanen aneka umbi. 2) Sarana pascapanen aneka umbi.	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	F. PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN					
	1. Pengolahan Hasil Pertanian	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	a. Tanaman Pangan 1) Serealia 2) Aneka Kacang dan Aneka Umbi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Hortikultura 1) Tanaman Buah dan Sayuran 2) Tanaman Florakultura dan Tanaman Obat	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Perkebunan 1) Tanaman Semusim 2) Tanaman Tahunan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Peternakan 1) Ruminansia 2) Non Ruminansia	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Mutu dan Standariasi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	a. Standardisasi 1) Tanaman Pangan dan Hortikultura 2) Perkebunan dan Peternakan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu 1) Tanaman Pangan dan Hortikultura 2) Perkebunan dan Peternakan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Akreditasi dan Kelembagaan 1) Tanaman Pangan dan Hortikultura 2) Perkebunan dan Peternakan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Kerjasama dan Harmonisasi 1) Tanaman Pangan dan Hortikultura 2) Perkebunan dan Peternakan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Pengembangan Usaha dan Investasi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	a. Kemitraan dan Kewirausahaan 1) Kemitraan 2) Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Investasi 1) Tanaman Pangan dan Hortikultura 2) Perkebunan dan Peternakan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Promosi Dalam Negeri 1) Daya Saing 2) Eksibisi dan Ekspo	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Promosi Luar Negeri 1) Daya Saing 2) Eksibisi dan Ekspo	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Pemasaran Domestik					
	a. Informasi Pasar 1) Analisis Pasar 2) Deseminasi Informasi Pasar	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga 1) Pemantauan Pasar 2) Stabilisasi Harga	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Sarana dan Kelembagaan Pasar 1) Sarana Pasar 2) Kelembagaan Pasar	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Jaringan Pemasaran 1) Akses Pasar 2) Sarana Pemasaran	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	G. PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN					
	1. Administrasi meliputi : Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Hasil Penelitian,Pengkajian, dan Pengembangan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	a. Hasil Penelitian dan Pengembangan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	b. Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Diseminasi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	a. Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Pubikasi lainnya	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Bimbingan Teknis Penelitian,Pengkajian, dan Pengembangan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	6. Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	7. Data Penelitian dan Pengembangan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	8. Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	H. KETAHANAN PANGAN					
	1. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	a. Ketersediaan Pangan 1) Analisis Ketersediaan Pangan 2) Sumberdaya Pangan	Biasa/terbuka Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal	Terbuka Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait Unit pengolah terkait
	b. Akses Pangan 1) Analisis Akses Pangan 2) Pengembangan Akses Pangan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Kerawanan Pangan 1) Analisis Kerawanan Pangan 2) Penanggulangan Kerawanan Pangan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Distribusi dan Cadangan Pangan					
	a. Distribusi Pangan 1) Analisis Distribusi Pangan 2) Kelembagaan Distribusi Pangan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	b. Harga Pangan 1) Analisis Harga Pangan Produsen 2) Analisis Harga Pangan Konsumen	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Cadangan Pangan 1) Cadangan Pangan Pemerintah 2) Cadangan Pangan Masyarakat	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan					
	a. Konsumsi Pangan 1) Pola Konsumsi Pangan 2) Kebutuhan Konsumsi Pangan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Penganekaragaman Pangan 1) Pengembangan Pangan Lokal 2) Promosi Penganekaragaman Pangan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Keamanan Pangan Segar 1) Pengawasan Keamanan Pangan Segar 2) Kelembagaan Keamanan Pangan Segar	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan a. Pengelolaan Lembaga Ketahanan Pangan b. Dewan Ketahanan Pangan c. Penghargaan Ketahan Pangan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
II.	URUSAN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN					
	I. URUSAN PERDAGANGAN					
	A. Kebijakan Bidang Perdagangan Kebijakan tentang Perdagangan,Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Unit pengolah terkait
	1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Penyiapan bahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Perumusan kebijakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	4. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	5. Penetapan dalam bentuk NSPK	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	B. PERDAGANGAN					
	1. Perdagangan Dalam Negeri	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	a. Bina Usaha - Kelembagaan - Penguatan Usaha	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Jasa Perdagangan - Perdagangan berbasis elektronik - Perdagangan berbasis jasa distribusi dan bisnis	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan - Usaha dagang asing - Keagenan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Informasi Perusahaan - Pendaftaran Perusahaan - Seksi Analisa LKTP	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Pelaku Pasar - Pengecer - Pemasok	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	2. Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	a. Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah 1) Iklim usaha 2) bimbingan teknis	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	b. Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	1) Fasilitasi usaha produktif 2) Pemasaran		dan eksternal serta penegak hukum		mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	
	c. Pengembangan Produk Lokal 1) Penelaahan potensi produk 2) Fasilitasi penguatan produk	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	d. Pencitraan Produk Dalam Negeri 1) kerja sama peningkatan penggunaan produk dalam negeri 2) peningkatan promosi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Logistik dan Sarana Distribusi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	a. Pengembangan Sarana Distribusi 1) Perencanaan 2) Bimbingan Teknis Pengembangan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengelolaan sarana distribusi 1) Bimbingan teknis pengelolaan 2) Evaluasi pengelolaan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Kerja sama pengembangan sistem logistik 1) Pemerintah 2) Lembaga non pemerintah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik 1) Informasi logistik 2) Bimbingan teknis penyedia jasa logistik	Rahasia	Penentu Kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	4. Bahan Pokok dan Barang Strategis					

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	a. Informasi Pasar 1) Informasi harga - Pengumpulan - Pengolahan data - Penyiapan - Penyajian informasi - Analisis 2) Informasi non harga - Pengumpulan - Pengolahan data - Penyiapan - Penyajian informasi - Analisis	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	b. Hasil Industri 1) Gula dan tepung 2) Minyak goreng dan garam	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Barang Strategis 1) Hasil agro 2) Hasil industri	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	d. Bahan Pokok Agro 1) Serelia 2) Hewan dan non serelia	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	C. STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
	1. Standarisasi					
	a. Kelembagaan dan informasi standar - Hubungan kelembagaan - Informasi standar	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Kerjasama Standarisasi - Kerjasama regional - Kerjasama bilateral dan multirateral	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	c. Perumusan dan penerapan standar - Penerapan Standar - Perumusan Standar	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	d. Tata usaha - Kepegawaian - Keuangan - Perencanaan dan Program - Inventaris Kantor/BMAN	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Pemberdayaan Konsumen					
	a. Kerjasama, informasi, dan publikasi - Kerja sama - Informasi dan publikasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Analisa penyenlenggara perlindungan konsumen - Konsultasi Hukum - Analisis	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Bimbingan konsumen dan pelaku usaha - Bimbingan konsumen - Bimbingan pelaku usaha	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	d. Fasilitas kelembagaan - Pemberdayaan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat - Pemberdayaan badan penyelesaian sengketa konsumen	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Pengawasan Barang beredar dan jasa					

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	a. Produk pertambangan dan aneka industri - Produk pertambangan dan olahan - Produk aneka industri	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Produk pertanian, kimia dan kehutanan - Produk pertanian dan kehutanan - Produk kimia dan olahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Jasa - Jasa Distribusi - Jasa bisnis	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	d. Kerjasama - Kerja sama baik lembaga pemerintah dan non pemerintah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Metrologi					
	a. Sarana dan Kerjasama - Sarana metrologi legal - Kerja sama metrologi legal	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Kelembagaan dan penilaian - Kelembagaan metrologi legal - Penilaian kelembagaan metrologi legal	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. UTTP dan Standar Ukuran - Besaran Massa, Listrik dan tekanan suhu - Besaran arus, panjang dan volume	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	d. Pengawasan - Pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapanya - Pengawasan barang dalam keadaan terbungkus dan satuan internasional	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	e. Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran - Bimbingan Mutu - Pelayanan Teknis	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	f. Balai Pengujian UTTP - Bimbingan Mutu - Pelayanan Teknis	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	D. PERDAGANGAN LUAR NEGERI					
	1. Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan a. Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan 1. Ekspor produk tanaman pangan, perikanan, dan peternakan - Tanaman pangan - Perikanan dan peternakan 2. Perkebunan - Tanaman Tahunan - Tanaman Semusin 3. Holtikultura, rempah-rempah, dan tanaman obat - Hortikultura - Rempah-rempah dan tanaman obat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	4. Kehutanan - Hasil kayu dan produk kayu - Hasil hutan bukan kayu	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2. Ekspor Produk Industri dan Pertambangan a. Produk TPT, aneka dan jasa - Produk tekstil dan produk teksti (TPT) - Produk aneka dan jasa b. Produk logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika - Logam dan mesin - Alat transportasi dan elektronika c. Produk Industri Agro dan kimia - Produk industri agro - Produk kimia d. Produk migas dan pertambangan - Migas - Produk pertambangan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Impor a. Impor Barang Modal - Mesin dan peralatan mesin - Alat Angkut b. Barang pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan - Barang pertanian dan kehutanan - Barang kelautan dan perikanan c. Barang aneka industri dan bahan baku industri - Barang aneka industri - Bahan baku industri d. Barang konsumsi - Barang konsumsi tahan lama - Barang konsumsi tidak tahan lama e. Barang kimia, tambang dan limbah - Barang kimia dan bahan berbahaya - Barang tambang dan limbah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	4. Fasilitasi Ekspor dan Impor					
	a. Kerjasama Internasional - Kerjasama Multilateral dan regional, termasuk bilatera	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	- Pembiayaan perdagangan b. Sumber pembayaran dan sistem pembayaran - Penjaminan pembiayaan ekspor dan impor c. Prosedur dan dokumen - Prosedur ekspor dan impor - Dokumen ekspor dan impor d. Penunjang perdagangan internasional		penegak hukum		terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
	- Sarana dan prasarana - Regulasi e. Pelayanan perdagangan - Analisa pelayanan perdagangan - Fasilitasi pelayanan perdagangan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	5. Pengamanan Perdagangan a. Monitoring Hambatan Perdagangan - Monitoring - Evaluasi b. Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan - Hambatan teknis perdagangan c. Penanganan Tuduhan - Dumping - Subsidi - Safeguard	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	E. PENGEMBANGAN EKSPORT NASIONAL					
	1. Pasar dan Informasi Ekspor a. Pengembangan pasar b. Pengembangan sistem informasi ekspor - Pengelolaan data ekspor - Pengumpulan - Pemutakhiran data eksportir, importir, dan hargakomoditi - Pengolahan - Analisis data informasi ekspor berupa neraca perdagangan c. Pelayanan informasi ekspor - Pelayanan pelaku usaha - Publikasi informasi ekspor	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2. Produk Ekspor dan Ekonomi Kreatif a. Hasil industri manufaktur - Mesin, logam, elektronika, dan telematika - Pangan, tekstil dan produk tekstil, alat kesehatan dan aneka b. Produk agro - Kehutanan dan perkebunan - Pertanian dan perikanan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Jasa - Jasa bisnis dan profesi - Jasa konstruksi dan distribusi d. Ekonomi kreatif - Media dan iptek - Seni budaya dan desain	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Kerjasama Pengembangan Ekspor a. Luar negeri - Pemerintah - Non Pemerintah b. Dalam Negeri - Pemeirintah - Non Pemerintah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Promosi dan Citra a. Promosi b. Perencanaan dan pemantauan citra - Perencanaan - Pemantauan dan evaluasi c. Penerapan citra - Penerapan citra dalam dan luar negeri	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	F. Perdagangan Berjangka Komoditi					
	1. Perniagaan a. Bina Usaha - Kelembagaan dan pelaku penunjang - Pelaku pasar b. Pengawasan transaksi - Kelembagaan dan pelaku penunjang - Pelaku pasar	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	c. Pengawasan keuangan dan audit - Pemantauan dan evaluasi keuangan - Audit kepatuhan dan keuangan					
	2. Analisa Pasar a. Pengkajian pasar - Pengkajian pasar fisik dan penyerahan - Posisi dan pelaporan b. Pengembangan pasar - Kelembagaan dan produk - Tata tertib dan kontrak	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Sistem informasi - Teknologi informasi - Data	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Pasar Fisik dan Jasa a. Pembinaan pasarlelang dan sistem resi gudang - Pembinaan penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang - Pembinaan pelaku sistem resi gudang b. Pengawasan pasar lelang - Pengawasan transaksi - Pengawasan penyelenggara dan pelaku pasar lelang c. Pengawasan sistem resi gudang - Pengawasan pengelola agunan dan lembaga sertifikasi - Pengawasan lembaga penjamin dan agen penjual	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	G. BIMBINGAN TEKNIS	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	H. EVALUASI	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	II. URUSAN PERINDUSTRIAN					
	A. KEBIJAKAN Kebijakan mengenai idustri manufaktur, industri agro, industri unggulan berbasis teknologi tinggi, industri kecil menengah, pengembangan perwilayaham industri, kerjasama industri internasional, pengkajian kebijakan iklim dan mutu industri meliputi :	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Penyiapan kebijakan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Perumusan dan penyusunan bahan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Masukan dan Dukungan Kebijakan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Penetapan NSPK	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	B. IKLIM USAHA DAN KERJASAMA					
	1. INDUSTRI MANUFAKTUR	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, logam Lainnya	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	1. Industri Material Logam : - Logam besi - Logam bukan besi - Logam lainnya	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Industri Kimia Dasar - Anorganik dasar - Organik dasar	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Industri Kimia Hilir - Kimia anorganik hilir - Kimia organik	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Industri Tekstil dan Aneka - Tekstil - Pakaian jadi, tekstil lainnya Alas kaki, kulit, dan aneka	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2. INDUSTRI AGRO	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	a) Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan - Kayu dan rotan - Selulosa dan karet - Hasil perkebunan non pangan lainnya	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b) Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan - Hasil tanaman pangan - Hasil perkebunan - Hasil laut, perikanan, dan peternakan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c) Industri Minuman dan Tembakau - Hasil holtikultura dan minuman ringan - Hasil tembakau - Hasil susu dan minuman lainnya	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	a) Alat Transportasi Darat - Kendaraan roda empat atau lebih - Kendaraan roda dua dan kereta api - Industri komponen	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan - Industri perkapalan - Industri kedirgantaraan dan alat pertahanan - Industri bangun	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Elektronika dan Telematika - Industri software - Industri peralatan TIK, perkantoran dan elektronika profesional - Industri elektronika konsumsi dan komponen	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Permesinan dan Alat Mesin Pertanian - Industri mesin, peralatan listrik, dan alat kesehatan - Industri mesin perkakas pabrik, alat mesin pertanian, dan alat berat	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	4. INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Industri Kecil dan menengah Wilayah I, Wilayah II(Jawa Bali), Wilayah III (Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	a) Industri Pangan, - Pangan - Industri kimia dan bahan bangunan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b) Industri kerajinan dan sandang - Kerajinan - Sandang	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c) Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika - Industri produk logamdan alat angkut - Industri kreatif telematika dan elektronik	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	C. PROMOSI INDUSTRI					
	1. INDUSTRI MANUFAKTUR	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	a) Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, logam Lainnya	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	1. Industri Material Logam : - Logam besi - Logam bukan besi - Logam lainnya	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Industri Kimia Dasar - Anorganik dasar - Organik dasar	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Industri Kimia Hilir - Kimia anorganik hilir - Kimia organik	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Industri Tekstil dan Aneka - Tekstil - Pakaian jadi, tekstil lainnya Alas kaki, kulit, dan aneka	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. INDUSTRI AGRO	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	a) Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan - Kayu dan rotan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	- Selulosa dan karet - Hasil perkebunan non pangan lainnya					
	b) Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan - Hasil tanaman pangan - Hasil perkebunan - Hasil laut, perikanan, dan peternakan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c) Industri Minuman dan Tembakau - Hasil holtikultura dan minuman ringan - Hasil tembakau - Hasil susu dan minuman lainnya	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	a) Alat Transportasi Darat - Kendaraan roda empat atau lebih - Kendaraan roda dua dan kereta api - Industri komponen	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	a) Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan - Industri perkapalan - Industri kedirgantaraan dan alat pertahanan - Industri bangun	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b) Elektronika dan Telematika - Industri software - Industri peralatan TIK, perkantoran dan elektronika profesional - Industri elektronika konsumsi dan komponen	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c) Permesinan dan Alat Mesin Pertanian - Industri mesin, peralatan listrik, dan alat kesehatan - Industri mesin perkakas pabrik, alat mesin pertanian, dan alat berat	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Industri Kecil dan menengah Wilayah I, Wilayah II(Jawa Bali), Wilayah III (Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	a) Industri Pangan, - Pangan - Industri kimia dan bahan bangunan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b) Industri kerajinan dan sandang - Kerajinan - Sandang	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c) Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika - Industri produk logamdan alat angkut - Industri kreatif telematika dan elektronik	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	D. STANDARISASI DAN TEKNOLOGI					
	1. INDUSTRI MANUFAKTUR	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	a) Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, logam Lainnya	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	1. Industri Material Logam : - Logam besi - Logam bukan besi - Logam lainnya	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Industri Kimia Dasar - Anorganik dasar - Organik dasar	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Industri Kimia Hilir - Kimia anorganik hilir - Kimia organik	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Industri Tekstil dan Aneka - Tekstil - Pakaian jadi, tekstil lainnya Alas kaki, kulit, dan aneka	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. INDUSTRI AGRO	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	a) Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan - Kayu dan rotan - Selulosa dan karet - Hasil perkebunan non pangan lainnya	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b) Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan - Hasil tanaman pangan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	- Hasil perkebunan - Hasil laut, perikanan, dan peternakan					
	c) Industri Minuman dan Tembakau - Hasil holtikultura dan minuman ringan - Hasil tembakau - Hasil susu dan minuman lainnya	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	a) Alat Transportasi Darat - Kendaraan roda empat atau lebih - Kendaraan roda dua dan kereta api - Industri komponen	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b) Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan - Industri perkapalan - Industri kedirgantaraan dan alat pertahanan - Industri bangun	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c) Elektronika dan Telematika - Industri software - Industri peralatan TIK, perkantoran dan elektronika profesional - Industri elektronika konsumsi dan komponen	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d) Permesinan dan Alat Mesin Pertanian - Industri mesin, peralatan listrik, dan alat kesehatan - Industri mesin perkakas pabrik, alat mesin pertanian, dan alat berat	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Industri Kecil dan menengah Wilayah I, Wilayah II(Jawa Bali), Wilayah III (Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	a) Industri Pangan, - Pangan - Industri kimia dan bahan bangunan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	b) Industri kerajinan dan sandang - Kerajinan - Sandang	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c) Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika - Industri produk logamdan alat angkut - Industri kreatif telematika dan elektronik	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	E. HAK DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL					
	1. INDUSTRI MANUFAKTUR	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	a) Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, logam Lainnya	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	1. Industri Material Logam : - Logam besi - Logam bukan besi - Logam lainnya	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Industri Kimia Dasar - Anorganik dasar - Organik dasar	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Industri Kimia Hilir - Kimia anorganik hilir - Kimia organik	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	4. Industri Tekstil dan Aneka - Tekstil	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	- Pakaian jadi, tekstil lainnya Alas kaki, kulit, dan aneka		dan eksternal serta penegak hukum		dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
	2. INDUSTRI AGRO	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	a) Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan - Kayu dan rotan - Selulosa dan karet - Hasil perkebunan non pangan lainnya	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b) Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan - Hasil tanaman pangan - Hasil perkebunan - Hasil laut, perikanan, dan peternakan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c) Industri Minuman dan Tembakau - Hasil holtikultura dan minuman ringan - Hasil tembakau - Hasil susu dan minuman lainnya	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	a) Alat Transportasi Darat - Kendaraan roda empat atau lebih - Kendaraan roda dua dan kereta api - Industri komponen	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	b) Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan - Industri perkapalan - Industri kedirgantaraan dan alat pertahanan - Industri bangun	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c) Elektronika dan Telematika - Industri software - Industri peralatan TIK, perkantoran dan elektronika profesional - Industri elektronika konsumsi dan komponen	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	d) Permesinan dan Alat Mesin Pertanian - Industri mesin, peralatan listrik, dan alat kesehatan - Industri mesin perkakas pabrik, alat mesin pertanian, dan alat berat	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	4. INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Industri Kecil dan menengah Wilayah I, Wilayah II(Jawa Bali), Wilayah III (Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	a) Industri Pangan,	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b) Industri kerajinan dan sandang	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c) Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	F. INDUSTRI HIJAU					
	1. INDUSTRI MANUFAKTUR	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	a) Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, logam Lainnya	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	1. Industri Material Logam : - Logam besi - Logam bukan besi - Logam lainnya	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Industri Kimia Dasar - Anorganik dasar - Organik dasar	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Industri Kimia Hilir - Kimia anorganik hilir - Kimia organik	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Industri Tekstil dan Aneka - Tekstil - Pakaian jadi, tekstil lainnya Alas kaki, kulit, dan aneka	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. INDUSTRI AGRO	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	a) Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan - Kayu dan rotan - Selulosa dan karet - Hasil perkebunan non pangan lainnya	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b) Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan - Hasil tanaman pangan - Hasil perkebunan - Hasil laut, perikanan, dan peternakan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c) Industri Minuman dan Tembakau - Hasil holtikultura dan minuman ringan - Hasil tembakau - Hasil susu dan minuman lainnya	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	3. INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	a) Alat Transportasi Darat - Kendaraan roda empat atau lebih - Kendaraan roda dua dan kereta api - Industri komponen	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b) Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan - Industri perkapalan - Industri kedirgantaraan dan alat pertahanan - Industri bangun	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c) Elektronika dan Telematika - Industri software - Industri peralatan TIK, perkantoran dan elektronika profesional - Industri elektronika konsumsi dan komponen	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d) Permesinan dan Alat Mesin Pertanian - Industri mesin, peralatan listrik, dan alat kesehatan - Industri mesin perkakas pabrik, alat mesin pertanian, dan alat berat	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Industri Kecil dan menengah Wilayah I, Wilayah II(Jawa Bali), Wilayah III (Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	a) Industri Pangan, - Pangan - Industri kimia dan bahan bangunan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b) Industri kerajinan dan sandang - Kerajinan - Sandang	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c) Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	- Industri produk logamdan alat angkut - Industri kreatif telematika dan elektronik					
	G. ANALISIS INDUSTRI UNGGULAN KABUPATEN/KOTA					
	Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	H. MONITORING DAN EVALUASI KOMPETENSI INTI INDUSTRI (PROVINSI DAN KAB/KOTA)					
	Monitoring dan Evaluasi Kerja sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	I. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG					
	Pengembangan Kawasan Industri Wilayah Industri I, II, III	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	J. FASILITASI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI					
	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	K. KERJA SAMA INDUSTRI INTERNASIONAL					
	Ketahanan Industri	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	L. STANDARISASI					
	Penyiapan Penerapan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	M. TEKNOLOGI DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
	1. Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
III.	URUSAN PERHUBUNGAN					
1.	KEBIJAKAN Kebijakan teknis dan strategis Bidang Perhubungan	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Unit pengolah terkait
	a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Penyiapan kebijakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Perumusan dan penyusunan bahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Penetapan dalam bentuk NSPK	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
2.	PERHUBUNGAN DARAT					
	A. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	1. Jaringan Transportasi Jalan : a. Jaringan Prasarana dan Pelayanan : penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang - penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C - penetapan lokasi terminal barang utama - standar pelayanan minimal pengoperasian terminal	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	- jaringan trayek angkutan antar kota/propinsi - jaringan lintas pada jaringan jalan primer - penetapan kelas jalan primer - kualifikasi teknis petugas terminal - jaringan transportasi jalan sekunder	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengembangan Transportasi Jalan : - sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan - pengembangan transportasi jalan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Sarana Angkutan Jalan					
	a. Pengujian Kendaraan Bermotor - pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor - sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor - sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor - akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Teknologi Kendaraan Bermotor : - sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor - pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor - persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor - harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Lalu lintas jalan					
	a. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas : - analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan - manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Perlengkapan Jalan : - Pedoman teknis perlengkapan jalan - penimbangan kendaraan bermotor di jalan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	- akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor					
	- kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor - pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Angkutan jalan					
	a. Angkutan Penumpang : - tarif angkutan penumpang kelas ekonomi - izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara - izin trayek antar kota antar propinsi - izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/propinsi - penilaian kinerja perusahaan angkutan umum - pemberian subsidi angkutan umum - angkutan perintis - penghargaan perusahaan angkutan umum	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Angkutan Barang : - tarif angkutan barang - izin operasi angkutan barang tertentu - pembinaan angkutan barang - tarif angkutan barang - izin operasi angkutan barang tertentu - pembinaan angkutan barang	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Pengendalian operasioanl					
	a. Monitoring Operasional : - pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	b. Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil: - Pedoman Teknis - penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) - Bimtek PPNS - Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	B. Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan					
	1. Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan					
	a. Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan - Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan - Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan - Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan - Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan) - pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	a. Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan b. Usaha dan Investasi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	3. Pelayanan Usaha					
	Pelayanan usaha mikro, kecil dan menengah	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Kemitraan Usaha					
	Kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Ketenagakerjaan pengelolaan dan pemasaran					
	a. Tenaga kerja pengolahan b. Tenaga kerja Pemasaran	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	6. Informasi dan Promosi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	C. KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU - PULAU KECIL					
	1. Rencana tata ruang dan zona wilayah II a. Rencana tata ruang	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Konservasi kawasan dan jenis ikan 1) Jejaring data, dan informasi konservasi a) Jejaring konservasi b) Tenaga Kerja Pemasaran 2) Konservasi Wawasan ii. Perancangan konservasi kawasan iii. Perlindungan dan pelestarian kawasan 5. Konservasi jenis ikan i. Perlindungan dan pelestarian jenis ikan 6. Pemanfaatan kawasan dan jenis ikan i. Pemanfaatan kawasan dan jenis ikan ii. Pemanfaatan jenis ikan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Pesisir dan Lautan 1) Mitigasi dan bencana Lingkungan 2) Pendayagunaan sumberdaya kelautan a) Jasa Kelautan 3) Penanggulangan perencanaan sumber daya pesisir dan laut	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	A. Penanggulangan pencemaran sumber daya 4) Rehabilitas dan reklamasi					
	d. Pendayagunaan pulau - pulau terkecil 1) Identifikas pulau - pulau terkecil 2) Pengelolaan eksosistem pulau - pulau terkecil 3) Investasi dan promosi pulau - pulau kecil a) Promosi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	e. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha 1) Akses permodalan a) Askes perbankan 2) Akses ilmu pengetahuan dan teknologi 3) Sosisal budaya masyarakat a) Peningkatan peran masyarakat 4) Pengembangan usaha nikro, kecil dan menengah a) Pelayanan Usaha nikro,kecil dan menengah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	D. PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN					
	1. Pengawasan sumber daya perikanan a. Pengawasan penangkapan ikan wilayah timur 1) Pengawasan penangkapan ikan wilayah timur II b. Pengawasan pengangkutan , pengolahan, dan pemasaran 1) Pengawasan usaha pengangkutan,pengelolahan dan pemasaran wilayah timur c. Pengawasan usaha budidaya 1) Pengawasan usaha wilayah timur	Terbatas	Pejabat Terkait	Terbatas	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit pengolah terkait
	2. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan a. Pengawasan ekosistem pengairan dan kawasan konservasi 1) Pengawasan ekosistem pengairan b. Pengawasan pencemaran pengairan	Terbatas	Pejabat Terkait	Terbatas	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	1) Pengawasan pencairan pesisir laut dan pesisir pantai 2) Pengawasan pencemaran peairan umum dan pedalaman c. Pengawasan pesisir dan pulau - pulau terkecil					
IV.	URUSAN PERIKANAN					
	A. KEBIJAKAN Rumusan Kebijakan di bidang Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Karantina Ikan Langkah kebijakan : 1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2. Penyiapan bahan 3. Perumusan kebijakan 4. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5. Penetapan kebijakan	Biasa/Terbuka	Publik	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit pengolah terkait
	B. PERIKANAN TANGKAP					
	1. Sumber Daya Ikan					
	a. Data dan Statistik Perikanan Tangkap 1. Pengumpulan dan pengolahan 2. Analisis dan penyajian	Biasa/Terbuka	Publik	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit pengolah terkait
	b. Pelabuhan Perikanan 1. Identifikasi dan Penyiapan Pelabuhan Perikanan - identifikasi dan analisis - penyiapan bangunan 2. Tata Operasional Pelabuhan Perikanan - Tata laksana pelabuhan perikanan - Pengusahaan dan pelayanan 3. Pengendalian Pembangunan Pelabuhan Perikanan - Bimbingan pembangunan pps, ppn, dan ppp	Biasa/Terbuka	Publik	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	- Bimbingan pembangunan ppi dan pelabuhan swasta 4. Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan - Tata laksana dan sarana - Keselamatan pelayaran					
	c. Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan 1. Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan - Verifikasi pengusahaan penangkapan ikan - Administrasi pengusahaan penangkapan ikan 2. Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan - Penerbitan dokumen penangkapan ikan - Tata laksana dokumen penangkapan ikan	Alokasi Usaha Penangkapan Ikan	Terbatas	Pejabat Terkait	Terbatas	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.
	d. Pengembangan Usaha Penangkapan 1. Kenelayanan - Identifikasi dan kapasitas nelayan - Bimbingan nelayan	Biasa/Terbuka	Publik	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit pengolah terkait
	C. PERIKANAN BUDIDAYA					
	1. Prasarana dan Sarana Budidaya					
	a. Lahan dan Air 1) Identifikasi potensi 2) Penataan	Terbatas	Pejabat Terkait	Terbatas	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit pengolah terkait
	b. Prasarana dan Sarana Budidaya Air Payau 1) Standarisasi 2) Pemantauan dan evaluasi c. Prasara dan sarana Budidaya Air Laut 1. Standarisasi 2. Pemantauan dan evaluasi	Biasa/Terbuka	Publik	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit pengolah terkait
	d. Minapolitan Budidaya 1. Identifikasi potensi 2. Pemanfaatan potensi	Terbatas	Pejabat Terkait	Terbatas	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2. Perbenihan					
	a. Induk 1) Pengelolaan induk ikan air tawar 2) Pengelolaan induk ikan air payau dan laut b. Perbenihan Skala Kecil 1) Perbenihan skala kecil ikan air tawar c. Perbenihan Skala Besar 1) Perbenihan skala besar ikan air tawar 2) Perbenihan skala besar ikan air payau	Biasa/Terbuka	Publik	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit pengolah terkait
	d. Standarisasi dan Sertifikasi Perbenihan 1) Standarisasi perbenihan 2) Sertifikasi perbenihan e. Informasi dan Distribusi Perbenihan 1) Informasi perbenihan 2) Distribusi perbenihan	Terbatas	Pejabat Terkait	Terbatas	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit pengolah terkait
	3. Produksi	Terbatas	Pejabat Terkait	Terbatas	Tidak memiliki dampak yang dapat	Unit pengolah
	a. Budidaya air tawar 1) Standarisasi 2) Penerapan teknologi budidaya air tawar b. Budidaya ikan hias 1) Standarisasi 2) Penerapan teknologi budidaya ikan hias				merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	terkait
	c. Sertifikasi 1) Penerapan sertifikasi 2) Monitoring dan evaluasi sertifikasi d. Data dan statistik perikanan budidaya 1) Pengumpulan dan pengolahan data 2) Analisis dan penyajian data statistik	Biasa/Terbuka	Publik	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit pengolah terkait
	4. Kesehatan Ikan dan Lingkungan					
	a. Hama dan penyakit ikan 1) Metode dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan 2) Monitoring dan evaluasi hama dan penyakit ikan	Biasa/Terbuka	Publik	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	b. Perlindungan lingkungan budidaya 1) Pengendalian lingkungan budidaya 2) Rehabilitasi lingkungan budidaya					
	c. Pengendalian Residu 1) Perencanaan pengendalian residu 2) Tindak lanjut pengendalian residu	Terbatas	Pejabat Terkait	Terbatas	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit pengolah terkait
	5. Usaha Budidaya a. Pelayanan usaha 1) Perizinan 2) Pemantauan dan evaluasi b. Kelembagaan dan ketenagakerjaan 1) Kelembagaan 2) Ketenagakerjaan c. Infomasi usaha dan promosi 1) Informasi usaha 2) Promosi	Biasa/Terbuka	Publik	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit pengolah terkait
	D. PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
	1. Pengolahan Hasil a. Standarisasi - Analisis standar - Penerapan standar b. Pengembangan produk - Pengembangan produk skala mikro,kecil,dan menengah - Pengembangan produk skala besar c. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah - Bimbingan teknik usaha mikro, kecil, dan menengah - Identifikasi dan evaluasi sentra pengolahan produk d. Sarana dan Prasarana	Biasa/Terbuka	Publik	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit pengolah terkait
	2. Usaha dan investasi a. Pelayanan usaha - Pelayanan usaha mikro, kecil, dan menengah - Pelayanan usaha besar	Biasa/Terbuka	Publik	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	b. Kemitraan usaha - Kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah - Kemitraan usaha besar - Ketenagakerjaan pengolahan dan pemasaran - Tenaga kerja pengolahan - Tenaga kerja pemasaran c. Investasi dan permodalan - Investasi - Permodalan d. Informasi dan promosi - Informasi - Promosi					
	E. KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL					
	1. Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II a. Rencana tata ruang	Biasa/Terbuka	Publik	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit pengolah terkait
	2. Konservasi kawasan dan Jenis Ikan a. Jejaring data, dan informasi konservasi 1) Jejaring konservasi 2) Tenaga kerja pemasaran b. Konservasi Wawasan 1) Perancangan konservasi kawasan 2) Perlindungan dan pelestarian kawasan c. Konservasi Jenis Ikan 1) Perlindungan dan pelestariajn ikan	Biasa/Terbuka	Publik	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit pengolah terkait
	3. Pesisir dan Lautan a. Mitigasi bencana lingkungan 1) Mitigasi bencana pesisir dan lautan 2) Adaptasi dampak perubahan iklim b. Pendayagunaan sumber daya kelautan 1) Benda muatan kapal tenggelam 2) Jasa kelautan c. Penanggulangan pencemaransumber daya pesisir dan laut 1) Penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir.	Biasa/Terbuka	Publik	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	d. Rehabilitasi dan reklamasi 1) Rehabilitasi					
	4. Pendayagunaan Pulau-Pulau Terkecil a. Identifikasi pulau-pulau terkecil 1) Identifikasi potensi pulau-pulau terkecil b. Pengelolaan ekosistem pulau-pulau terkecil 1) Mitigasi dan adaptasi c. Investasi dan promosi pulau-pulau kecil 1) Promosi	Biasa/Terbuka	Publik	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit pengolah terkait
	5. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha a. Akses permodalan 1) Akses Perbankan b. Akses ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa/Terbuka	Publik	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit pengolah terkait
	c. Sosial Budaya Masyarakat 1) Peningkatan peran masyarakat d. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 1) Pelayanan usaha mikro, kecil dan menengah					
	F. PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Biasa/Terbuka	Publik	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit pengolah terkait
	i. Pengawasan Sumber Daya Perikanan a. Pengawasan penangkapan ikan wilayah timur 1) Pengawasan penangkapan ikan wilayah timur II b. Pengawasan pengangkutan, pengolahan dan pemasaran 1) Pengawasan usaha pengangkutan, pengolahan dan pemasaran wilayah timur c. Pengawasanusaha budidaya 1) Pengawasan usaha wilayah timur	Biasa/Terbuka	Publik	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	ii. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan a. Pengawasan ekosistem pengairan dan kawasan konservasi 1) Pengawasan ekosistem pengairan 2) Pengawasan kawasan konservasi b. Pengawasan pencemaran pengairan 1) Pengawasan pencemaran pesisir laut dan pesisir pantai 2) Pengawasan pencemaran perairan umum dan pendalaman	Biasa/Terbuka	Publik	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit pengolah terkait
	iii. Pengawasan pesisir dan pulau-pulau terkecil	Biasa/Terbuka	Publik	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
V.	URUSAN PENANAMAN MODAL					
	1. KEBIJAKAN					
	a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan b. Penyiapan Kebijkan c. Perumusan Kebijakan d. Masukan dan Dukungan Kebijakan e. Penetapan NSPK	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Unit pengolah terkait
	2. PERENCANAAN					
	a. Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya 1) Agribisnis a) Tanaman Pangan,Perkebunan dan Kehutanan b) Kelautan,Perikanan dan peternakan 2) Energi a) Energi Terbarukan b) Energi Tak Terbarukan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	3) Sumber Daya Mineral a) Mineral Logam b) Mineral Non Logam					
	b. Perencanaan Industri Manufaktur 1) Industri Logam, Mesin,Tekstil dan Aneka a) Industri Logam Dan Mesin b) Industri Tekstil dan Aneka 2) Industri Kimia a) Industri Kimia Dasar b) Industri barang Kimia dan Farmasi 3) Industri Alat Transportasi dan Telematika a) Industri Alat Transportasi b) Industri Telematika	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Perencanaan Jasa dan kawasan ekonomi 1) Jasa Perdagangan dan Pariwisata a) Jasa Perdagangan b) Jasa Pariwisata 2) Jasa Kesehatan, Pendidikan,Ketenaga Kerjaan, dan Jasa Lainnya a) Jasa Kesehatan ,Pendidikan, dan Ketenaga Kerjaan b) Jasa lainnya 3) Kawasan Ekonomi a) Kawasan ekonomi Khusus b) Kawasan Ekonomi Lainnya	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	d. Perencanaan Infra Struktur 1) Infra Struktur Transportasi Darat, Jalan dan Jembatan a) Infra Struktur Transportasi, Darat, Jalan dan Jembatan b) Infra Struktur Jalan dan Jebatan 2) Infra Struktur Energi dan Sumber Daya Air a) Infrastruktur Energi b) Infarastruktur Sumber Daya Air 3) Infrastruktur Transportasi Laut, Udara dan Infra Struktur Lainnya a) Infrastruktur Transportasi Laut b) Infra Struktur Transportasi Udara dan Infrastruktur Lainnya	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. PEGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
	a. Deregulasi Penanaman Modal 1) Sektor Primer a) Pertanian, Kelautan dan Perikanan b) Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan 2) Sektor Tersier a) Pariwisata, Perdagangan dan Telekomunikasi b) Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Jasa Lainnya	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Pegembangan Potensi Daerah 1) Sektor Primer dan Tersier a) Sektor Primer b) Sektor Tersier 2) Sektor Sekunder a) Sektor Industri Logam, Mesin Transportasi dan Telematika b) Industri Agro, Kimia, Tekstil dan aneka	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Pemberdayaan Usaha 1) Pembinaan dan penyuluhan a) Pembinaan b) Penyuluhan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2) Kemitraan Usaha a) Sektor Primer b) Sektor Sekunder 3) Pelayanan Usaha a) Sektor Primer dan Tersier b) Sektor Sekunder				dan fungsi lembaga pemerintahan.	
	4. PROMOSI PENANAMAN MODAL					
	a. Pengembangan Promosi 1) Analisis Strategi Promosi a) Analisis Target Promosi b) Analisis Target Daya Saing Promosi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Promosi Sektoral 1) Promosi Industri Sumber Daya Alam, Jasa Dan Kawasan 2) Promosi Industri Manufaktur a) Industri Logam, Barang Logam, Mesin dan Elektronik b) Industri Manufaktur Lainnya 3) Promosi Infra Struktur a) Infrastruktur Transportasi, Jalan, dan Jembatan b) Infrastruktur Energi, Sumber Daya Air, dan Infra Struktur lainnya	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Pameran dan Sarana Promosi 1) Pameran a) Penyusunan Program dan Monitoring b) Penyelenggaraan dan Evaluasi 2) Media Cetak a) Materi Promosi b) Publikasi dan Distribusi 3) Media Elektronik a) Materi Promosi b) Pelayanan Informasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	5. PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
	a. Pelayanan Aplikasi 1) Aplikasi Sektor Primer dan Tersier a) Aplikasi Baru b) Aplikasi Perluasan c) Aplikasi Perubahan 2) Kerjasama Dunia Usaha Internasional a) Aplikasi Baru b) Aplikasi Perluasan c) Aplikasi perubahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Pelayanan Perizinan 1) Perizinan Sektor Primer dan Tersier a) Pertanian Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana b) Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi c) Pertambangan dan Energi, Pertambangan dan aneka Jasa	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2) Perizinan Sektor Sekunder a) Industri Mesin Logam dan Barang Logam b) Industri Kimia dan barang Kimia c) Industri Aneka	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Pelayanan Fasilitas 1) Perizinan Sektor Primer dan Tersier a) Pertanian ,Peternakan, Perkebunan,Pariwisata dan Prasarana b) Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi c) Pertambangan dan Energi, Pertambangan dan aneka Jasa 2) Perizinan Sektor Sekunder a) Industri Mesin Logam dan Barang Logam b) Industri Kimia dan barang Kimia c) Industri Aneka	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
VI	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP					
	1. KEBIJAKAN Kebijakan dibidang Tata Lingkungan, Pegendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Sampah, Penataan Hukum Lingkungan, Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas.	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Unit Pengolah Terkait
	a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan - Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup Wilayah - Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup Sektor - Kajian dampak Lingkungan - Pengembangan Perangkat kebijakan	Terbatas	Penentu kebijakan, Pelaksana kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	b. Penyiapan Bahan	Terbatas	Penentu kebijakan, Pelaksana kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	c. Pemberian Masukan dan Dukungan dalam Penyusunan Kebijakan	Terbatas	Penentu kebijakan, Pelaksana kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	d. Pengumpulan dan pengolahan Data	Terbatas	Penentu kebijakan, Pelaksana kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	e. Penetapan dalam bentuk NSPK	Terbatas	Penentu kebijakan, Pelaksana kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	2. TATA LINGKUNGAN					
	a. Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1) Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan a) Dokumentasi Inventarisasi b) Pedoman Inventarisasi c) Penetapan Ekoregion d) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) e) Pedoman Penyusunan RPPLH Provinsi, RPPLH Kabupaten/Kota 2) Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam a) Evaluasi pemanfaatan dan Pencadangan Sumber daya Alam b) Kebijakan pemanfaatan Sumber Daya Alam	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	b. Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor 1) Evaluasi Penerapan 2) Perencanaan Lingkungan Hidup	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	c. Ekonomi Lingkungan 1) Perencanaan 1. Valuasi ekonomi 2. Internalisasi Lingkungan 2) Perencanaan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	d. Dampak Lingkungan 1) Bimtek Dampak Lingkungan 2) Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	a) Penilaian dokumen lingkungan b) Pemeriksaan Dokumen Lingkungan					
	3) Evaluasi dan Tindak Lanjut a) Evaluasi b) Tindak Lanjut	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	3. PENGENDALIAN PENCEMARAN					
	a. Pemantauan dan Pengawasan 1) Manufaktur Prasarana dan Jasa a) Industri kimia b) Industri Logam , Elektronika dan Mesin c) Aneka Industri d) Prasarana Dan jasa 2) Pertambangan Energi, Minyak dan Gas 3) Agro Industri dan Usaha Skala Kecil a) Peternakan dan Perikanan b) Perkebunan c) Kehutanan Dan Holtikultura d) Usaha Skala Kecil 4) Udara Sumber Bergerak a) Transportasi Air dan Udara b) Transportasi Darat c) Transportasi Kereta Api dan kendaraan Berat	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	b. Evaluasi dan Pegembangan 1) Manufaktur, Prasarana dan Jasa a) Industri Kimia b) Industri Logam, Elektronika dan Gas c) Aneka Industri d) Prasarana Dan jasa 2) Pertambangan Energi, Minyak dan Gas 3) Agro Industri dan Usaha Skala Kecil a) Peternakan dan Perikanan b) Perkebunan c) Kehutanan Dan Holtikultura d) Usaha Skala Kecil 4) Udara Sumber Bergerak	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	a) Transportasi Air dan Udara b) Transportasi Darat c) Transportasi Kereta Api dan kendaraan Berat					
	4. PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PERUBAHAN IKLIM					
	a. Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan 1. Pengembangan a) Sumber daya genetik b) Keamanan hayati 2. Pemanfaatan a) Sumber daya genetik 3. Pengelolaan Sumber Daya Genetik a) Pengembangan dan Pemanfaatan b) Pemantauan dan Pengawasan 4. Keamanan Hayati a) Pengembangan dan Pengelolaan b) Pemantauan dan Pengawasan 5. Pengendalian kerusakan Lahan a) Lahan Budidaya b) Lahan Non Budidaya	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	b. Kerusakan Ekosistem Perairan Darat 1) Kerusakan Ekosistem a) Sungai b) Kerusakan Ekositem c) Pengelolaan Kualitas Air 2) Rawa a) Rawa Gambut b) Rawa Bukan Gambut	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	c. Pengendalian Kerusakan Pesisir dan aut 1) Pencegahan 2) Penaggulangan 3) Pemulihan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	d. Mitigasi dan pelestarian Fungsi tmosfer 1) Perangkat mitigasi 2) Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	a) Laporan Inventarisasi GRK Nasional b) Data Bidang Inventarisasi GRK 3) Pengendalian Bahan Perusak Ozon a) Surat Rekomendasi Kepada Infortir Terdaftar dan Bahan perusak Ozon					
	b) Hibah Bantuan Luar negeri Terkait Program Perlindungan Lapisan Ozon c) Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	e. Adaptasi Perubahan Iklim 1. Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim a) Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan Iklim b) Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim 2. Kerentanan Perubahan Iklim a) Identifikasi dan Analisis Kerentanan Perubahan Iklim b) Media Kliring Kerentanan Perubahan Iklim	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	5. PENGELOLAAN B3, LIMBAH, DAN SAMPAH					
	a. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun 1) Registrasi dan Notifikasi a) Registrasi b) Notifikasi 2) Pemantauan a) Sektor Industri b) Sektor Non Industri 3) Evaluasi dan Tindak Lanjut a) Sektor Industri b) Sektor Non Industri	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	b. Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun 1) Pengumpulan dan pemanfaatan 2) Pengangkutan dan Pengolahan 3) Penimbunan dan Dumping 4) Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	a) Notifikasi b) Rekomendasi Limbah Lintas Batas					
	c. Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3 1) Pemantauan a) Sektor Industri b) Manufaktur c) Agroindustri d) Prasarana, Jasa dan Non Institusi 2) Tanggap darurat dan pemelihan Kontaminasi a) Pertambangan Energi b) Manufaktur c) Agroindustri d) Prasarana Jasa dan Non Intuisi	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	d. Pengelolaan Sampah 1) Pembatasan sampah 2) Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah 3) Pembentukan Dewan Adipura 4) Penetapan pemenang adipura	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	6. HUKUM LINGKUNGAN					
	a. Hukum Administrasi Lingkungan 1) Pengelolaan dan pengembangan pengaduan a) Pengelolaan pengaduan b) Pengembangan pengaduan 2) penaatan hukum administrasi lingkungan a) Penerapan hukum administrasi lingkungan b) Pengembangan hukum administrasi lingkungan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	b. Penyelesaian Sengketa Lingkungan 1) Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan a) Administrasi gugatan b) Gugatan 2) penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	a) Kerugian negara dan masyarakat b) lembaga penyedia jasa Penyelesaian sengketa lingkungan hidup					
	c. Penegakan hukum pidana lingkungan 1) penyidikan a) Administrasi penyidikan b) Pelaksana penyidikan 2) Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut a) Koordinasi penuntutan b) Evaluasi dan tindak lanjut	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	d. Perjanjian Internasional Lingkungan 1) Pendapat Hukum perjanjian nasional a) Pendapatan Hukum Proses pengesahan perjanjian Internasional b) Tindak lanjut perjanjian Nasional 2) Evaluasi Perjanjian Nasional a) Evaluasi perjanjian Internasional Pencemaran b) Evaluasi perjanjian Internasional Perusakan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
VII	URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH					
	A. KEBIJAKAN Kebijakan dalam Kelembagaan Koperasi dan UKM, Produksi, Pembiayaan, Pemasaran dan Jaringan Usaha, Pengkajian Sumber Daya UKMK Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Pengembangan Sumber Daya Manusia, MOU (Perjanjian Kerja Sama), Gerakan Kewirausahaan Nasional, Penetapan Bantuan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	1. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Penyiapan Bahan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Perumusan Kebijakan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Penetapan Berbentuk NSPK	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	B. MONITORING DAN EVALUASI	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	C. KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM					
	1. Organisasi dan Badan Hukum Koperasi a. Organisasi Koperasi dan UKM - Organisasi Koperasi - Organisasi UKM	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Badan Hukum Koperasi - Penatausahaan Badan Hukum Koperasi - Evaluasi Badan Hukum Koperasi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Penelaahan Kasus Hukum - Kasus Hukum Koperasi - Kasus Hukum UKM	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2. Tata laksana Koperasi dan UKM a. Tata laksana Koperasi - Tata laksana Koperasi Primer - Tata laksana Koperasi Sekunder b. Tata laksana Usaha Kecil dan Menengah - Tata laksana Usaha Kecil - Tata laksana Usaha Mengah c. Klasifikasi Koperasi dan UKM - Klasifikasi Koperasi - Klasifikasi UKM	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Keanggotaan Koperasi a. Partisipasi Usaha dan Permodalan - Partisipasi Usaha - Partisipasi Permodalan b. Partisipasi Pengawasan - Rapat Anggota - Pengawasan c. Pengembangan Anggota - Kaderisasi - Penyuluhan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Pengendalian dan Akuntabilitas a. Pengendalian - Pengendalian Intern - Tindak Lanjut Hasil Pengendalian b. Bidang Akuntabilitas dan Akuntansi - Akuntabilitas - Akuntansi dan Audit c. Monitoring dan Evaluasi - Monitoring - Evaluasi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	D. PRODUKSI 1. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura a. Tanaman Pangan - Padi - Palawija	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	b. Hortikultura - Buah-Buahan dan Tanaman Obat - Tanaman Hias dan Sayur c. Sarana - Sarana Produksi - Sarana Pengolahan					
	2. Kehutanan dan Perkebunan a. Kehutanan - Hutan Produksi - Hutan Kemasyarakatan b. Perkebunan - Tanaman Semusim dan Rempah-Rempah - Tanaman Keras c. Sarana - Sarana Produksi - Sarana Pengolahan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Perikanan dan Peternakan a. Perikanan - Perikanan Tangkap - Perikanan Budidaya b. Peternakan - Ternak Besar - Ternak Kecil c. Sarana - Sarana Produksi - Sarana Pengolahan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Industri Kerajinan dan Pertambangan a. Industri - Sandang, Logam dan Elektronika - Pangan, Kimia dan Aneka b. Kerajinan - Logam - Non Logam c. Pertambangan dan Migas - Pertambangan Umum - Pertambangan Migas	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	5. Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha a. Ketanagalistrikan dan Konstruksi - Listrik - Konstruksi b. Aneka Usaha - Jasa Umum - Angkutan c. Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi - Pariwisata - Pos dan Telekomunikasi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	E. PEMBIAYAAN					
	1. Program Pendanaan a. Program Pendanaan Jangka Pendek - Program Pendanaan Koperasi Jangka Pendek - Program Pendanaan UKM Jangka Pendek b. Program Pendanaan Jangka Menengah dan Panjang - Program Pendanaan Koperasi Jangka Menengah dan Panjang - Program Pendanaan UKM Jangka Menengah dan Panjang c. Program Pendanaan Usaha Mikro dan Dana Bergulir - Program Pendanaan Usaha Mikro - Program Pendanaan Dana Bergulir	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2. Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam a. Pengembangan dan Pengendalian KSP - Pengembangan Kelembagaan KSP - Pengendalian Kelembagaan KSP b. Pengembangan dan Pengendalian USP Koperasi - Pengembangan USP Koperasi - Pengendalian USP Koperasi	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Pengembangan dan Pengendalian USP-LKM - Pengembangan USP-LKM - Pengendalian USP-LKM	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Urusan Permodalan a. Pengembangan Permodalan Sendiri - Permodalan Sendiri Koperasi - Permodalan Sendiri UKM b. Pengembangan Permodalan Luar - Permodalan Bank - Permodalan Non Bank c. Pengembangan Kredit Program - Kredit Program Bank - Kredit Program Non Bank	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Asuransi dan Jasa Keuangan a. Asuransi - Asuransi Koperasi - Asuransi UKM b. Perpajakan - Perpajakan Koperasi - Perpajakan UKM c. Jasa Keuangan dan Kredit Komersial - Jasa Keuangan dan Kredit Komersial Bank - Jasa Keuangan dan Kredit Non Komersial Bank	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	5. Pembiayaan dan Penjaminan Kredit a. Lembaga Pembiayaan - Modal Ventura - Sewa Guna Usaha dan Anak Piutang b. Penjaminan Kredit - Penjaminan - Asuransi Kredit c. Pasar Modal - Obligasi - Modal Penyertaan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	6. Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	F. PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA					
	1. Perdagangan Dalam Negeri a. Pengadaan - Pengadaan Sektor Formal - Pengadaan Sektor Informal	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Distribusi - Distribusi Sektor Formal - Distribusi Sektor Informal	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pengembangan - Pengembangan Sektor Formal - Pengembangan Sektor Informal	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Ekspor dan Impor a. Ekspor - Ekspor Koperasi - Ekspor UKM b. Impor - Impor Koperasi - Impor UKM c. Hubungan Perdagangan Internasional - Hubungan Perdagangan Multilateral dan Regional - Hubungan Perdagangan Bilateral	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	3. Sarana dan Prasarana Pemasaran a. Sarana - Pengembangan Pasar Tradisional - Pengembangan Sentra Pemasaran b. Prasarana - Lembaga Perantara - Fasilitasi HAKI c. Pengembangan Potensi Pemasaran - Pengembangan Potensi Pemasaran Koperasi - Pengembangan Potensi Pemasaran UKM	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Kemitraan dan Jaringan Usaha a. Kemitraan - Kemitraan Koperasi - Kemitraan UKM b. Jaringan Usaha - Jaringan Usaha Koperasi - Jaringan Usaha UKM c. Pengembangan Kerja sama Kelembagaan - Pengembangan Kerja sama Kelembagaan Koperasi - Pengembangan Kerja sama Kelembagaan UKM	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Informasi dan Publikasi Bisnis a. Pengumpulan Informasi - Pengumpulan Informasi Koperasi - Pengumpulan Informasi UKM b. Pengolahaan Informasi - Pengolahan Informasi Koperasi - Pengolahan Informasi UKM c. Publikasi dan Promosi - Publikasi dan Promosi Koperasi - Publikasi dan Promosi UKM	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	6. Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	G. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
	1. Pengembangan Kewirausahaan a. Lembaga Kewirausahaan - Pengembangan Jaringan Kewirausahaan - Peningkatan Sumber Daya Kewirausahaan b. Penumbuhan Kewirausahaan - Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan - Evaluasi Kewirausahaan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Sosialisasi Kewirausahaan - Perangkat Lunak - Promosi Kewirausahaan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM a. Diklat Formal dan Informal - Diklat Formal - Diklat Informal b. Diklat Non Formal - Perangkat Lunak - Sarana dan Prasarana Diklat c. Kerjasama Lembaga Diklat - Hubungan Lembaga Diklat Pemerintah - Hubungan Lembaga Diklat Non Pemerintah	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Peran Serta Masyarakat a. Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap Koperasi dan UKM - Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap Koperasi - Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap UKM b. Peningkatan Dukungan LSM Terhadap Koperasi dan UKM - Peningkatan Dukungan LSM terhadap Koperasi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	- Peningkatan Dukungan LSM terhadap UKM c. Peningkatan Dukungan Organisasi Profesi - Dukungan Organisasi Profesi terhadap Koperasi - Dukungan Organisasi Profesi terhadap UKM					
	4. Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM a. Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM - Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi - Monitoring dan Evaluasi Diklat UKM b. Monitoring dan Evaluasi Diklat Formal dan Informal - Monitoring dan Evaluasi Diklat Formal - Monitoring dan Evaluasi Diklat Informal c. Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat - Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat Pemerintah - Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat Non Pemerintah	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Advokasi a. Advokasi Organisasi dan Manajemen - Advokasi Organisasi - Advokasi Manajemen b. Advokasi Kemitraan dan Teknologi - Advokasi Kemitraan - Advokasi Teknologi c. Advokasi Peraturan Perundang-Undangan - Kajian Penerapan - Sosialisasi Perundang-Undangan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	H. PENGEMBANGAN DAN RESTRUKTURISASI USAHA					
	1. Produktifitas dan Mutu a. Produktifitas - Inkubator Teknologi - Pengembangan Klaster b. Peningkatan Mutu - Disain - Standarisasi c. Sertifikasi Produk - Sertifikasi - Label dan Merek	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Restrukturisasi Usaha a. Restrukturisasi Manajemen - Manajemen Koperasi - Manajemen UKM b. Restrukturisasi Pendanaan - Pendanaan Koperasi - Pendanaan UKM c. Restrukturisasi Kelembagaan - Restrukturisasi Kelembagaan Koperasi - Restrukturisasi Kelembagaan UKM	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Fasilitasi Investasi UKM a. Investasi Klaster UKM - Fasilitasi Investasi UKM Agro Bisnis - Fasilitasi Investasi UKM Non Agro Bisnis b. Pengembangan Kerja Sama Investasi Usaha - Pengembangan Pangan - Pengembangan Non Pangan c. Fasilitas Investasi Aneka Usaha UKM - Fasilitasi Investasi Usaha Koperasi - Fasilitasi Investasi Usaha UKM	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	I. PENGKAJIAN SUMBER DAYA UKM					
	1. Penelitian Koperasi a. Perencanaan dan Pengendalian - Perencanaan - Evaluasi dan Pelaporan b. Penyelenggaraan - Kelembagaan Koperasi - Bisnis Koperasi c. Tata Laksana Penelitian - Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi - Sarana dan Prasarana	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Penelitian UKM a. Perencanaan dan Pengendalian - Perencanaan - Evaluasi dan Pelaporan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Penyelenggaraan - Kelembagaan UKM - Bisnis UKM c. Tata Laksana Penelitian - Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi - Sarana dan Prasarana					
	3. Penelitian Sumber Daya a. Perencanaan dan Pengendalian - Perencanaan - Evaluasi dan Pelaporan b. Penyelenggaraan - Sumber Daya Manusia - Pembiayaan c. Tata Laksana Penelitian - Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi - Sarana dan Prasarana	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	4. Pengembangan Perkaderan UMK a. Penyuluhan - Penyelenggaraan - Materi Penyuluhan b. Perkaderan - Penilaian - Pengembangan c. Kerja Sama dan Jaringan - Lembaga Pemerintah - Lembaga Non Pemerintah	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
VIII	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK					
A.	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	I. KEBIJAKAN Kebijakan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	1. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Penyiapan Bahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Perumusan Kebijakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	4. Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	5. Penetapan Berbentuk NSPK	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	II. APLIKASI INFORMATIKA					
	a. E- Government					
	1. Tata Kelola e-Government a. Program e-Government b. Eevaluasi e-Government	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Teknologi dan Infrastruktur e-Government a. Teknologi e-government b. Infrastruktur e-government	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government a. Interoperabilitas e-government b. Interkonektivitas e-government	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	4. Aplikasi Layanan Kepemerintahan Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	III. INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
	A. Komunikasi Publik					
	1. Tata Kelola Komunikasi Publik a. Program Komunikasi Publik b. Monitoring dan Evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			serta penegak hukum		pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
	2. Pengelolaan Opini Publik a. Pengumpulan Opini Publik b. Pengolahan Opini Publik	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Layanan Komunikasi Publik a. Pengumpulan Data b. Pengolahan Data	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	B. Pengolahan dan Penyediaan Informasi					
	1. Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan a. Politik dan Keamanan b. Hukum dan Hak Asasi Manusia	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Informasi Perekonomian a. Keuangan, Perbankan, dan Jasa b. Industri dan Perdaganga	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Informasi Kesejahteraan Rakyat a. Agama, Sosial, dan Budaya b. Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	C. Pengelolaan Media Publik					
	1. Media Cetak 2. Media Online 3. Media Luar Ruang dan Audio Visual	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	D. Kemitraan Komunikasi					
	1. Kemitraan Media dan Dunia Usaha a. Program Kemitraan Media dan Dunia Usaha	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	b. Monitoring dan Evaluasi		serta penegak hukum		pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
	2. Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi a. Program Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi b. Monitoring dan Evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	E. Layanan Informasi Internasional					
	1. Layanan Informasi Media Asing a. Program Layanan Informasi Media Asing b. Monitoring dan Evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Layanan Informasi Perwakilan Negara Asing dan Lembaga Internasional a. Analisis Risiko Penyakit Eksotik b. Kesiagaan Darurat Penyakit Hewan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Layanan Informasi Masyarakat Luar Negeri a. Program Layanan Informasi Masyarakat Luar Negeri b. Monitoring dan Evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
B.	URUSAN PERSANDIAN					
	1. Kebijakan Kebijakan pembinaan dan pengendalian persandian yang meliputi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	A. Pengkajian dan pengusulan kebijakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	B. Penyiapan kebijakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	C. Perumusan kebijakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	D. Masukan dan dukungan kebijakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	E. Penetapan NSPK	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Kebijakan pengamanan persandian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Pembinaan Dan Pengendalian Persandian					
	A. Sumber Daya Manusia (SDM)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	B. Materiil dan jaring komunikasi sandi	Sangat Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, penegak hukum	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat menimbulkan kerugian yang sangat serius terhadap keamanan nasional	Sekretariat, Kamar Sandi
	C. Akreditasi dan Sertifikasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	4. Pengamanan persandian					
	A. Pengamanan sinyal : teknik sandi dan kripto	Sangat Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, penegak hukum	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat menimbulkan kerugian yang sangat serius terhadap keamanan nasional	Sekretariat, Kamar Sandi
	B. Analisis sinyal : teknis sandi dan kripto	Sangat Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, penegak hukum	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat menimbulkan kerugian yang sangat serius terhadap keamanan nasional	Sekretariat, Kamar Sandi
	C. Materi sandi : sistem dan peralatan	Sangat Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat menimbulkan kerugian yang	Sekretariat, Kamar Sandi

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			internal/eksternal, penegak hukum		sangat serius terhadap keamanan nasional	
	5. Pengkajian persandian : Kriptografi, Peralatan Sandi, Komuikasi Sandi	Sangat Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, penegak hukum	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat menimbulkan kerugian yang sangat serius terhadap keamanan nasional	Sekretariat, Kamar Sandi
C	URUSAN STATISTIK					
	A. Perumusan Kebijakan dibidang Statistik meliputi : Metodologi dan Informasi	Biasa	Pengawas	Terbuka	Tidak mengganggu berjalannya organisasi	Fungsi Statistik
	1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan	Biasa	Pengawas	Terbuka	Tidak mengganggu berjalannya organisasi	Fungsi Statistik
	2. Penyiapan kebijakan	Biasa	Pengawas	Terbuka	Tidak mengganggu berjalannya organisasi	Fungsi Statistik
	3. Perumusan kebijakan	Biasa	Pengawas	Terbuka	Tidak mengganggu berjalannya organisasi	Fungsi Statistik
	4. Masukan dan dukungan kebijakan	Biasa	Pengawas	Terbuka	Tidak mengganggu berjalannya organisasi	Fungsi Statistik
	5. Penetapan NSPK	Biasa	Pengawas	Terbuka	Tidak mengganggu berjalannya organisasi	Fungsi Statistik
	B. SENSUS PENDUDUK, PERTANIAN, DAN EKONOMI					
	1. Perencanaan					
	a. Master Plan dan Network planing	Biasa	administrator	Terbuka	Tidak mengganggu berjalannya organisasi	Fungsi Statistik
	b. Perumusan dan penyusunan bahan 1) Penyiapan bahan penyusunan rancangan sensus 2) Penyusunan metode pencacahan sensus 3) Penentuan volume sensus 4) Penyusunan desain penarikan sampel 5) Penyusunan kerangka sampel	Biasa	administrator	Terbuka	Tidak mengganggu berjalannya organisasi	Fungsi Statistik
	c. Studi pendahuluan (desk study)	Biasa	administrator	Terbuka	Tidak mengganggu berjalannya organisasi	Fungsi Statistik
	2. Persiapan	Biasa	administrator	Terbuka	Tidak mengganggu berjalannya organisasi	Fungsi Statistik
	a. Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus	Biasa	administrator	Terbuka	Tidak mengganggu berjalannya organisasi	Fungsi Statistik

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	b. Penyusunan Kuesioner	Biasa	administrator	Terbuka	Tidak mengganggu berjalannya organisasi	Fungsi Statistik
	c. Penyusunan konsep dan definisi	Biasa	administrator	Terbuka	Tidak mengganggu berjalannya organisasi	Fungsi Statistik
	d. Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur) 1. Inventarisasi, penyusunan dan pengembangan ukuran-ukuran yang digunakan dalam sensus ii. Inventarisasi, penyusunan dan pengembangan lapangan usaha, jabatan, komoditas, perdesaan, perkotaan iii. Penyusunan daftar nama dan kode pembagian wilayah administrasi	Biasa	administrator	Terbuka	Tidak mengganggu berjalannya organisasi	Fungsi Statistik
	e. Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan) 1) Buku pedoman pencacahan 2) Buku pedoman pengawasan 3) Buku pedoman pengolahan	Biasa	administrator	Terbuka	Tidak mengganggu berjalannya organisasi	Fungsi Statistik
	f. Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah	Biasa	administrator	Terbuka	Tidak mengganggu berjalannya organisasi	Fungsi Statistik
	g. Penyusunan pedoman sosialisasi	Biasa	administrator	Terbuka	Tidak mengganggu berjalannya organisasi	Fungsi Statistik
	h. Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan)	Biasa	administrator	Terbuka	Tidak mengganggu berjalannya organisasi	Fungsi Statistik
	i. Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern)	Biasa	administrator	Terbuka	Tidak mengganggu berjalannya organisasi	Fungsi Statistik
	j. Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT)	Biasa	administrator	Terbuka	Tidak mengganggu berjalannya organisasi	Fungsi Statistik
	k. Pelaksanaan pelatihan petugas	Biasa	administrator	Terbuka	Tidak mengganggu berjalannya organisasi	Fungsi Statistik
	l. Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi)	Biasa	administrator	Terbuka	Tidak mengganggu berjalannya organisasi	Fungsi Statistik

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	m. Pelatihan petugas pengolahan	Biasa	administrator	Terbuka	Tidak mengganggu berjalannya organisasi	Fungsi Statistik
	n. Perancangan tabel	Biasa	administrator	Terbuka	Tidak mengganggu berjalannya organisasi	Fungsi Statistik
	o. Pelaksanaan Ujicoba 1) Ujicoba kuesioner sensus (meliputi reliabilitas kuesioner dan sistem pengolahan) 2) Ujicoba metodologi sensus (meliputi ujicoba pelaksanaan pencacahan, organisasi lapangan dan jumlah sampel)	Biasa	administrator	Terbuka	Tidak mengganggu berjalannya organisasi	Fungsi Statistik
	3. Pelaksanaan Lapangan d. Pelaksanaan listing e. Pemilihan sampel f. Pengumpulan data g. Pemeriksaan h. Pengawasan Lapangan i. Monitoring kualitas	Biasa	administrator	Terbuka	Tidak mengganggu berjalannya organisasi	Fungsi Statistik
	4. Pengolahan j. Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/Batching) k. Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding) l. Perekaman data (entri, scanner) m. Tabulasi Data n. Pemeriksaan tabulasi o. Laporan konsistensi tabulasi	Biasa	administrator	Terbuka	Tidak mengganggu berjalannya organisasi	Fungsi Statistik
	5. Analisis dan Penyajian Hasil Sensus a. Pembahasan angka hasil pengolahan b. Penyusunan angka sementara c. Penyusunan angka tetap d. Penyusunan/pembahasan draft publikasi	Biasa	administrator	Terbuka	Tidak mengganggu berjalannya organisasi	Fungsi Statistik

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	e. Analisis data f. Penyusunan publikasi hasil sensus					
	6. Diseminasi hasil sensus a. Penyusunan bahan diseminasi 1) leaflet, booklet 2) website 3) Penyusunan CD dan sejenisnya d. Sosialisasi hasil sensus melalui berbagai media e. Layanan dan promosi statistik	Biasa	administrator	Terbuka	Tidak mengganggu berjalannya organisasi	Fungsi Statistik
	C. SURVEI					
	1. Perencanaan a. Master Plan dan Network planing b. Perumusan dan penyusunan bahan 1) Penyiapan bahan penyusunan rancangan survei 2) Penyusunan metode pencacahan survei 3) Penentuan volume survey 4) Penyusunan desain penarikan sampel 5) Penyusunan kerangka sampel c. Studi pendahuluan (desk study)	Biasa	administrator	Terbuka	Tidak mengganggu berjalannya organisasi	Fungsi Statistik
	f. Persiapan 1) Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus 2) Penyusunan Koesioner 3) Penyusunan konsep dan definisi 4) Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur. 1) Inventarisasi , penyusunan dan pengembangan ukuran-ukuran yang digunakan dalam sensus 2) Inventarisasi , penyusunan dan pengembangan lapangan usaha, jabatan, komoditas, perdesaan, perkotaan 3) Penyusunan daftar nama dan kode pembagian wilayah administrasi	Biasa	administrator	Terbuka	Tidak mengganggu berjalannya organisasi	Fungsi Statistik

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	5) Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan) 1) Buku pedoman pencacahan 2) Buku pedoman pengawasan 3) Buku pedoman pengolahan 6) Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah 7) Penyusunan pedoman sosialisasi 8) Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan) 9) Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan eksterm) 10) Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT) 11) Pelaksanaan pelatihan petugas 12) Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi) 13) Pelatihan petugas pengolahan 14) Perancangan tabel 15) Pelaksanaan Ujicoba 1) Ujicoba koesioner survei (meliputi reliabilitas koesioner dan sistem pengolahan) 2) Ujicoba metodologi survei (meliputi ujicoba pelaksanaan pencacahan, organisasi lapangan	Biasa	administrator	Terbuka	Tidak mengganggu berjalannya organisasi	Fungsi Statistik
	g. Pelaksanaan Lapangan a. Pelaksanaan listing b. Pemilihan sampel c. Pengumpulan data d. Pemeriksaan e. Pengawasan Lapangan f. Monitoring kualitas	Biasa	administrator	Terbuka	Tidak mengganggu berjalannya organisasi	Fungsi Statistik
	h. Pengolahan a. Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/ Batching) b. Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding) c. Perekaman data (entri, scanner)	Biasa	administrator	Terbuka	Tidak mengganggu berjalannya organisasi	Fungsi Statistik

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	d. Tabulasi Data e. Pemeriksaan tabulasi f. Laporan konsistensi tabulasi					
	i. Analisis dan Penyajian Hasil Survei a. Pembahasan angka hasil pengolahan b. Penyusunan angka sementara c. Penyusunan angka tetap d. Penyusunan/pembahasan draft publikasi e. Analisis data f. Penyusunan publikasi	Biasa	administrator	Terbuka	Tidak mengganggu berjalannya organisasi	Fungsi Statistik
	j. Diseminasi hasil Survei a. Penyusunan bahan diseminasi 1) leaflet, booklet 2) Website 3) Penyusunan CD dan sejenisnya b. Sosialisasi hasil survei melalui berbagai media	Biasa	administrator	Terbuka	Tidak mengganggu berjalannya organisasi	Fungsi Statistik
	D. KONSOLIDASI DAN STATISTIK					
	1. Kompilasi Data 2. Analisis data 3. Penyusunan Publikasi	Biasa	administrator	Terbuka	Tidak mengganggu berjalannya organisasi	Fungsi Statistik
	E. EVALUASI DAN PELAPORAN SENSUS, SURVEI, DAN KONSOLIDASI DATA STATISTIK	Biasa	administrator	Terbuka	Tidak mengganggu berjalannya organisasi	Fungsi Statistik

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
IX	URUSAN KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI					
A	KETENAGAKERJAAN					
	1. KEBIJAKAN					
	Kebijakan di bidang Perencanaan Tenaga Kerja, Pembinaan Pelatihan dan Produktiivitas, Pembinaan pemberdayaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	b. Penyiapan bahan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	c. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	d. Pengumpulan dan pengolahan data	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	e. Penetapan dalam bentuk pengaturan berupa norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK)	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	2. PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS					
	1. Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan					
	a. Pengembangan Standarisasi Kompetensi 1) Penerapan Standar Kompetensi 2) Bimbingan Penerapan Standar Kompetensi 3) Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan - Program Pelatihan Ketenagakerjaan - Penyusunan Materi Pelatihan Ketenagakerjaan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	4) Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan - Program pelatihan produktivitas dan kewirausahaan - Penyusunan Materi Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan 5) Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian - Program Pelatihan Ketransmigrasian - Penyusunan Materi Pelatihan Ketransmigrasian	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	b. Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja 1) Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan - Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja - Pengembangan Sistem Informasi Kelembagaan 2) Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan - Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan - Bimbingan Pengelolaan Sarana dan Fasilitas 3) Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan - Standar Mutu Lembaga Pelatihan - Bimbingan Penerapan Standar Mutu 4) Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga - Sistem Pendanaan Pelatihan - Kerjasama Antar Lembaga	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	3. BINA PEMAGANGAN 1) Pemagangan Dalam Negeri - Program Pemagangan Dalam Negeri - Bimbingan dan Penyuluhan Pemagangan Dalam Negeri	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2) Pemagangan Luar Negeri - Program Pemagangan Luar Negeri - Bimbingan dan Penyuluhan Pemagangan Luar Negeri 3) Perizinan dan Advokasi Pemagangan a. Perizinan dan Rekomendasi b. Advokasi dan Perlindungan 4) Promosi dan Jenjang Pemagangan c. Promosi dan Sistem Informasi Pemagangan d. Pemagangan Jejaring Pemagangan					
	4. PRODUKTIVITAS DAN KEWIRAUSAHAAN 1) Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan - Promisi Produktivitas dan Kewirausahaan - Kerjasama Peningkatan Produktivitas dan Kewirausahaan 2) Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas - Sistem dan Metode Produktivitas - Alat dan Teknik Peningkatan Produktivitas 3) Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas - Pengukuran Produktivitas - Kajian Produktivitas 4) Pengembangan Kewirausahaan - Pelatihan Manajemen Kewirausahaan - Bimbingan Konsultasi	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	5. PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA					
	1. Pengembangan Pasar Kerja					
	a. Informasi Pasar Kerja 1) Informasi Pasar Kerja Dalam Negeri 2) Informasi Pasar Kerja Luar Negeri	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	b. Analisis Pasar Kerja 1) Analisis Pasar Kerja Dalam Negeri 2) Analisis Pasar Kerja Luar Negeri	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	c. Bursa Kerja 1) Bursa Kerja Dalam Negeri 2) Bursa Kerja Luar Negeri	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	d. Analisis Jabatan 1) Analisis dan Informasi Jabatan 2) Pengembangan Sistem Analisis Jabatan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	2. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri					
	a. Antar Kerja 1) Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) /Antar Kerja Lokal (AKL) 2) Kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	b. Penempatan Tenaga Kerja Khusus 1) Penempatan Tenaga Kerja Khusus Muda dan Wanita 2) Penempatan Tenaga Kerja Khusus Penyandang Cacat dan Lansia	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	c. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 1) Penyuluhan Jabatan 2) Bimbingan Jabatan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	d. Pemberdayaan Pengantar Kerja 1) Pengembangan Kompetensi Pengantar Kerja 2) Kerjasama antar Lembaga	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	3. Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri					
	a. Kelembagaan Penempatan 1) Perizinan Kelembagaan 2) Evaluasi Kinerja	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	b. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 1) Penyiapan dan Dokumen Penempatan TKI 2) Fasilitasi Penyediaan TKI	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	c. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 1) Advokasi dan Kepulangan 2) Sarana dan Perlindungan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	d. Kerjasama Internasional 1) Kerjasama Bilateral 2) Kerjasama Regional dan Multilateral	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	4. Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal					
	a. Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal 3) Tenaga Kerja Mandiri 4) Tenaga Kerja Sektor Informal	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	b. Pengembangan Padat Karya 1) Padat Karya Perdesaan 2) Padat Karya Perkotaan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	c. Terapan Teknologi Tepat Guna 1) Pengembangan Teknologi Tepat Guna 2) Penyebarluasan Teknologi Tepat Guna	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	d. Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga 1) Pemberdayaan Pendampingan 2) Kerjasama Antar Lembaga	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	5. Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing					
	a. Analisis dan Perizinan Sektor Industri 1) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri 2) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	c. Analisis dan Perizinan Sektor Jasa 1) Rencana Pembangunan Tenaga Kerja Asing Sektor Jasa 2) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Jasa	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	d. Pengendalian dan Kerjasama Kelembagaan 1) Pengendalian 2) Kerjasama Kelembagaan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	6. Standardisasi Profesi					
	1. Sistem Informasi dan Registrasi 1) Dokumen yang behubungan dengan sistem informasi dan registrasi	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2) Dokumen yang behubungan dengan Sertifikasi kompetensi kerja					
	b. Pembakuan Akreditasi 1) Dokumen yang behubungan dengan kompetensi dan akreditasi kelembagaan sertifikasi 2) Dokumen yang behubungan dengan penyelenggaraan konvensi dan persidangan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	6. PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA					
	1. Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi					
	a. Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama 1) Peraturan Perusahaan 2) Perjanjian Kerja Bersama	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	b. Perjanjian Kerja	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	c. Kesejahteraan Pekerja 1) Program Kesejahteraan 2) Fasilitas Kesejahteraan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	d. Analisis Diskriminasi Syarat Kerja 1) Penanggulangan Diskriminasi Syarat Kerja 2) Evaluasi Diskriminasi Syarat Kerja	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	2. Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial					
	a. Organisasi Pekerja dan Pengusaha 1) Organisasi Pekerja 2) Organisasi Pengusaha	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	b. Kelembagaan Hubungan Industrial 1) Lembaga Kerjasama BIPARTIT 2) Lembaga Kerjasama TRIPARTIT	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	c. Pemasyarakatan Hubungan Industrial 1) Penyiapan Masyarakat Materi Penyuluhan Masyarakat Hubungan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	Industrial 2) Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial					
	3. Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial					
	1. Pengupahan 1) Penerapan Standar Pengupahan 2) Pengurusan Pengupahan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	b. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja 1) Pengurusan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja 2) Kepesertaan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	4. Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial					
	a. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial 1) Pencegahan Dini 2) Penanganan Mogok dan Penutupan Perusahaan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	b. Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 1) Pengurusan Perselisihan Hubungan Industrial 2) Evaluasi dan Pelaporan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	c. Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan 1) Fungsionalisasi Perantara dan Legitimasi Mediator, Konsiliator, dan Arbiter Hubungan 2) Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan di Luar Peradilan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	5. PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					
	1. Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	a. Pengawasan Norma Kerja 1) Pengawasan Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat 2) Pengawasan Norma Pengupahan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	b. Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat 1) Pengawasan Norma Hubungan Kerja 2) Pengawasan Norma Perlindungan Berserikat	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	c. Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja 1) Pengawasan Norma Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Dalam Negeri 2) Pengawasan Norma Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri 3) Pengawasan Norma Kerja dan Jamsostek	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	2. Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak					
	a. Pengawasan Norma Kerja Perempuan 1) Pengawasan Norma Penghapusan Diskriminasi 2) Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	b. Pengawasan Norma Kerja Anak 1) Pengawasan Norma Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak 2) Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Anak	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	c. Kerjasama Lintas Sektoral 1) Kerjasama Lintas Sektoral Tenaga Kerja Perempuan 2) Kerjasama Lintas Sektoral Tenaga Kerja Anak	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	d. Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak 1) Advokasi Tenaga Kerja Perempuan 2) Advokasi Tenaga Kerja Anak	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	3. Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	a. Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan 1) Pengawasan Norma Mekanik 2) Pengawasan Norma Pesawat Uap dan Bejana Tekan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	b. Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran 1) Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan 2) Pengawasan Norma Listrik dan Penanggulangan Kebakaran	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	c. Pengawasan Norma Kesehatan Kerja 1) Pengawasan Norma Pelayanan Kesehatan Kerja 2) Pengawasan Norma Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	d. Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya 1) Pengawasan Norma Lingkungan Kerja 2) Pengawasan Norma Bahan Berbahaya	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	e. Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3 1) Pengawasan Norma Kelembagaan dan Keahlian K3 2) Pengawasan Norma Sistem Manajemen K3	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	4. Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	5. Bina Penegakan Hukum					
	a. Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan 1) Teknis Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan 2) Penindakan Norma Ketenagakerjaan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	b. Penyidikan Norma Ketenagakerjaan 1) Teknis Penyedikan Norma Ketenagakerjaan 2) Administrasi Penyidikan Norma Ketenagakerjaan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	c. Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 1) Pemberdayaan PPNS 2) Sarana dan Prasarana PPNS	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	d. Kerjasama Penegakan Hukum 1) Kerjasama Lembaga Penegakan Hukum 2) Kerjasama Pemeriksaan dan Penyidikan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	6. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA					
	1. Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)					
	a. Pengkajian K3 1) Analisis dan Standardisasi bidang K3 2) Hasil kajian, perekayasaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K3 3) Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K3	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	b. Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	2. Pengembangan SDM dan Kompetensi K3					
	a. SDM K3 1) Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 2) Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	b. Kompetensi K3 1) Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 2) Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 3) Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	4) Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3					
B.	URUSAN TRANSMIGRASI					
	1. KEBIJAKAN Kebijakan di bidang Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Pembinaan Pengembangan	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	1. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	2. Penyiapan Bahan	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	3. Perumusan Kebijakan	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	4. Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	5. Penetapan Berbentuk NSPK	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	2. PEMBINAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
	1. Perencanaan Teknis Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	a. Perencanaan Kawasan 1) Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi 2) Perencanaan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT)/Lokasi Permukiman	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	b. Perencanaan Teknis Permukiman 1) Perencanaan Teknis Satuan Kawasan Pengembangan 2) Perencanaan Teknis Satuan Permukiman	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	d. Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana 1) Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Permukiman 2) Perencanaan Teknis Infrastruktur Kawasan	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	e. Perencanaan Sumber Daya Manusia 1) Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia 2) Penataan Persebaran	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	2. Penyediaan Tanah Transmigrasi					
	a. Fasilitasi Pengadaan Tanah 1) Identifikasi Status dan Penggunaan Tanah 2) Pengurusan Status Tanah	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	b. Pengurusan Legalitas Tanah 1) Pengurusan Hak Pengelolaan Tanah 2) Pengurusan Hak Milik Atas Tanah	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	c. Dokumentasi Pertanahan 1) Pengumpulan dan Pengolahan Data Pertanahan 2) Penyajian Informasi Pertanahan	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	d. Advokasi Pertanahan 1) Identifikasi Kasus Pertanahan 2) Rekognisi dan Kompensasi	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	3. Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi					
	a. Penyiapan Lahan 1) Bina Teknis Penyiapan Lahan 2) Evaluasi Penyiapan Lahan	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	b. Penyiapan Sarana 1) Bina Teknis Penyiapan Sarana 2) Evaluasi Penyiapan Saranz	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	c. Penyiapan Prasarana 1) Bina Teknis Penyiapan Sarana 2) Evaluasi Penyiapan Prasarana	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	d. Evaluasi Kelayakan Permukiman 1) Bina Teknis Kelayakan Permukiman 2) Penilaian Kelayakan Permukiman	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	4. Fasilitasi Penempatan Transmigrasi					
	a. Penyiapan Calon Transmigrasi 1) Pendaftaran dan Seleksi 2) Keterampilan Calon Transmigrasi	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	b. Penyiapan Perpindahan 1) Penyerahan Perpindahan 2) Administrasi Perpindahan	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	c. Pelaksanaan Perpindahan 1) Penampungan 2) Pengangkutan	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	d. Penataan dan Adaptasi 1) Penataan Persebaran 2) Adaptasi	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	5. Partisipasi Masyarakat					
	a. Promosi dan Motivasi 1) Promosi 2) Motivasi	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	b. Kerjasama Kelembagaan 1) Kerjasama Lembaga Pemerintah 2) Kerjasama Lembaga Non Pemerintah	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	c. Kerjasama Antar Daerah 1) Mediasi Kerjasama Antar Daerah 2) Pelayanan Kerjasama Antar Daerah	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	d. Pelayanan Investasi 1) Pelayanan Aplikasi Investasi 2) Evaluasi Pelaksanaan Investasi	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	3. PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
	1. Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	a. Bina Sistem Informasi 1) Sistem Informasi Permukiman 2) Sistem Informasi Kawasan	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	b. Perencanaan Pengembangan Kawasan 1) Penataan Ruang dan Infrastruktur Kawasan 2) Pengembangan Sosial dan Ekonomi	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	c. Perencanaan Pengembangan Masyarakat 1) Pengembangan Usaha Ekonomi 2) Pengembangan Sosial Budaya	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	d. Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan 1) Penataan Ruang dan Infrastruktur Pusat Pertumbuhan 2) Pengelolaan Kelembagaan Sosial dan Ekonomi	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	a. Bantuan Pangan dan Kesehatan 1) Penyediaan Bantuan Pangan 2) Penyediaan Bantuan Kesehatan	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	b. Fasilitas Sosial Budaya 1) Pendidikan dan Seni Budaya 2) Mental Spiritual	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	c. Pengembangan Kelembagaan 1) Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat 2) Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kawasan Transmigrasi	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	d. Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi 1) Penyediaan Tenaga Pendamping Non PNS 2) Bimbingan Teknis Tenaga Pendamping Non PNS	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	3. Pengembangan Usaha	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	a. Kewirausahaan 1) Pembangunan Usaha Mandiri 2) Pelayanan Investasi dan Kemitraan	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	b. Produksi 1) Tanaman Pangan 2) Non Tanaman Pangan	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	c. Pengolahan Hasil dan Pemasaran 1) Pengolahan Hasil 2) Pemasaran	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	d. Lembaga Ekonomi dan permodalan 1) Penguatan Kelembagaan 2) Kerjasama Kelembagaan	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	4. Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan					
	a. Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana 1) Analisis dan Standarisasi Sarana 2) Analisis dan Standarisasi Prasarana	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	b. Pengembangan Sarana 1) Bina Perencanaan Teknis Sarana 2) Bina Pelaksanaan Sarana	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	c. Pengembangan Prasarana 1) Bina Perencanaan Teknis Prasarana 2) Pemantauan Pengembangan Sarana dan Prasarana	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	d. Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana 1) Pemantauan Pengembangan Sarana dan Prasarana 2) Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	5. Penyerasian Lingkungan					
	a. Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 1) Persiapan Pengelolaan Lingkungan 2) Pemantauan Lingkungan	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	b. Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan 1) Adaptasi Lingkungan 2) Mitigasi Lingkungan	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	c. Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi 1) Pemantauan Perkembangan Permukiman Transmigrasi 2) Pengalihan Status Pembinaan Permukiman Transmigrasi	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	d. Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan 1) Analisis Perkembangan Pusat Pertumbuhan 2) Pemantauan Perkembangan Pusat Pertumbuhan	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
X	URUSAN BENCANA, KECELAKAAN, DAN KONDISI BAHAYA					
	1. KEBIJAKAN Kebijakan Penanggulangan Bencana meliputi kebijakan dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan Logistik dan Peralatan meliputi:	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Berdasarkan UU 14/2008 *juncto* Peraturan Komisi Informasi No 1/2010	Unit Pengolah Terkait
	a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Berdasarkan UU 14/2008 *juncto* Peraturan Komisi Informasi No 1/2010	Unit Pengolah Terkait
	b. Penyiapan kebijakan	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Berdasarkan UU 14/2008 *juncto* Peraturan Komisi Informasi No 1/2010	Unit Pengolah Terkait
	c. Perumusan kebijakan	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Berdasarkan UU 14/2008 *juncto* Peraturan Komisi Informasi No 1/2010	Unit Pengolah Terkait
	d. Masukan dan dukungan kebijakan	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Berdasarkan UU 14/2008 *juncto* Peraturan Komisi Informasi No 1/2010	Unit Pengolah Terkait
	e. Penetapan NSPK	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Berdasarkan UU 14/2008 *juncto* Peraturan Komisi Informasi No 1/2010	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2. PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN					
	a. Pengurangan Resiko Bencana					
	2. Pencegahan a. Pengkajian Resiko b. Pengelolaan Resiko	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Berdasarkan UU 14/2008 *juncto* Peraturan Komisi Informasi No 1/2010	Unit Pengolah Terkait
	3. Mitigasi a. Mitigasi Struktur b. Mitigasi Non Struktur	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Berdasarkan UU 14/2008 *juncto* Peraturan Komisi Informasi No 1/2010	Unit Pengolah Terkait
	b. Pemberdayaan Mayarakat					
	1. Peran Lembaga Usaha a. Usaha Padat Modal b. Usaha Padat Karya	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Berdasarkan UU 14/2008 *juncto* Peraturan Komisi Informasi No 1/2010	Unit Pengolah Terkait
	2. Peran Organisasi Sosial Masyarakat a. Organisasi Internasional b. Organisasi Sosial Masyarakat Nasional	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Berdasarkan UU 14/2008 *juncto* Peraturan Komisi Informasi No 1/2010	Unit Pengolah Terkait
	3. Peran Masyarakat a. Peningkatan Kesadaran Masyarakat b. Peningkatan Ketahanan Masyarakat	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Berdasarkan UU 14/2008 *juncto* Peraturan Komisi Informasi No 1/2010	Unit Pengolah Terkait
	c. Kesiapsiagaan					
	1. Peringatan Dini c. Pemaduan Sistem Jaringan d. Pemantauan dan Peringatan	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Berdasarkan UU 14/2008 *juncto* Peraturan Komisi Informasi No 1/2010	Unit Pengolah Terkait
	2. Perencanaan Siaga a. Kebutuhan dan Potensi Sumber Daya b. Penerapan Rencana Strategis	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Berdasarkan UU 14/2008 *juncto* Peraturan Komisi Informasi No 1/2010	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	3. Penyiapan Sumber Daya a. Penyediaan dan Penyiapan Sumber Daya b. Pengendalian	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Berdasarkan UU 14/2008 *juncto* Peraturan Komisi Informasi No 1/2010	Unit Pengolah Terkait
	3. PENANGANAN DARURAT					
	1. Tanggap Darurat					
	1 Perencanaan Darurat a. Pendataan Darurat b. Perencanaan Operasi	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Berdasarkan UU 14/2008 *juncto* Peraturan Komisi Informasi No 1/2010	Unit Pengolah Terkait
	b. Pengendalian Operasi 1. Pengorganisasian Pos Komando 2. Sarana dan Prasarana Pos Komando	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Berdasarkan UU 14/2008 *juncto* Peraturan Komisi Informasi No 1/2010	Unit Pengolah Terkait
	c. Penyelamatan dan Evakuasi 1. Penyelamatan 2. Evakuasi	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Berdasarkan UU 14/2008 *juncto* Peraturan Komisi Informasi No 1/2010	Unit Pengolah Terkait
	b. Bantuan Darurat					
	1. Bantuan Sandang Pangan a. Bantuan Sandang b. Bantuan Pangan	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Berdasarkan UU 14/2008 *juncto* Peraturan Komisi Informasi No 1/2010	Unit Pengolah Terkait
	2. Bantuan Kesehatan dan Air Bersih a. Bantuan Kesehatan b. Bantuan Air Bersih	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Berdasarkan UU 14/2008 *juncto* Peraturan Komisi Informasi No 1/2010	Unit Pengolah Terkait
	3. Bantuan Hunian Sementara a. Pembangunan Hunian Sementara b. Pendukung Hunian Sementara	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Berdasarkan UU 14/2008 *juncto* Peraturan Komisi Informasi No 1/2010	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	c. Perbaikan Darurat					
	1. Pembersihan Lingkungan a. Penyiapan Peralatan b. Angkutan	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Berdasarkan UU 14/2008 *juncto* Peraturan Komisi Informasi No 1/2010	Unit Pengolah Terkait
	2. Perbaikan Sarana Vital a. Prasarana Sosial b. Prasarana Ekonomi	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Berdasarkan UU 14/2008 *juncto* Peraturan Komisi Informasi No 1/2010	Unit Pengolah Terkait
	3. Pemantauan dan Pelaporan a. Pemantauan b. Pelaporan	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Berdasarkan UU 14/2008 *juncto* Peraturan Komisi Informasi No 1/2010	Unit Pengolah Terkait
	4. REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Berdasarkan UU 14/2008 *juncto* Peraturan Komisi Informasi No 1/2010	Unit Pengolah Terkait
	A. Penilaian Kerusakan					
	1. Inventarisasi Kerusakan a. Inventarisasi Fisik b. Inventarisasi Sosial Ekonomi	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Berdasarkan UU 14/2008 *juncto* Peraturan Komisi Informasi No 1/2010	Unit Pengolah Terkait
	2. Estimasi Pembiayaan a. Estimasi Pembiayaan Pembangunan b. Estimasi Pembiayaan Sosial Ekonomi	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Berdasarkan UU 14/2008 *juncto* Peraturan Komisi Informasi No 1/2010	Unit Pengolah Terkait
	B. Pemulihan dan Peningkatan Fisik					
	1. Rehabilitasi Rekonstruksi Fasilitas Umum a. Rehabilitasi Fasilitas Umum b. Rekonstruksi Fasilitas Umum	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Berdasarkan UU 14/2008 *juncto* Peraturan Komisi Informasi No 1/2010	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2. Rehabilitasi Rekonstruksi Fasilitas Sosial a. Rehabilitasi Fasilitas Sosial b. Rekonstruksi Fasilitas Sosial	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Berdasarkan UU 14/2008 *juncto* Peraturan Komisi Informasi No 1/2010	Unit Pengolah Terkait
	3. Rehabilitasi Rekonstruksi Perumahan a. Rehabilitasi Rekonstruksi Berat b. Rehabilitasi Rekonstruksi Ringan	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Berdasarkan UU 14/2008 *juncto* Peraturan Komisi Informasi No 1/2010	Unit Pengolah Terkait
	C. Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi					
	1. Pemulihan dan Peningkatan Sosial a. Pemulihan dan Peningkatan Sosial Budaya b. Pemulihan dan Peningkatan Kesehatan	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Berdasarkan UU 14/2008 *juncto* Peraturan Komisi Informasi No 1/2010	Unit Pengolah Terkait
	2. Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi a. Pemulihan Ekonomi b. Peningkatan Ekonomi	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Berdasarkan UU 14/2008 *juncto* Peraturan Komisi Informasi No 1/2010	Unit Pengolah Terkait
	D. Penanganan Pengungsi					
	1. Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi a. Perlindungan Pengungsi b. Pemberdayaan Pengungsi	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Berdasarkan UU 14/2008 *juncto* Peraturan Komisi Informasi No 1/2010	Unit Pengolah Terkait
	2. Kompensasi dan Pengembalian Hak Pengungsi a. Kompensasi b. Pengembalian hak	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Berdasarkan UU 14/2008 *juncto* Peraturan Komisi Informasi No 1/2010	Unit Pengolah Terkait
	3. Penempatan Pengungsi a. Pemulangan dan Repatriasi b. Relokasi/Pengalihan	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Berdasarkan UU 14/2008 *juncto* Peraturan Komisi Informasi No 1/2010	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	5. LOGISTIK DAN PERALATAN					
	A. Logistik					
	1. Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan a. Analisis Kebutuhan b. Pengadaan	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Berdasarkan UU 14/2008 *juncto* Peraturan Komisi Informasi No 1/2010	Unit Pengolah Terkait
	2. Penyimpanan dan Distribusi a. Penyimpanan b. Distribusi	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Berdasarkan UU 14/2008 *juncto* Peraturan Komisi Informasi No 1/2010	Unit Pengolah Terkait
	B. Peralatan					
	1. Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan a. Analisis Kebutuhan b. Pengadaan	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Berdasarkan UU 14/2008 *juncto* Peraturan Komisi Informasi No 1/2010	Unit Pengolah Terkait
	2. Penyimpanan dan Pemeliharaan a. Penyimpanan b. Pemeliharaan	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Berdasarkan UU 14/2008 *juncto* Peraturan Komisi Informasi No 1/2010	Unit Pengolah Terkait
	3. Pengerahan dan Distribusi a. Pengerahan b. Distribusi	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Berdasarkan UU 14/2008 *juncto* Peraturan Komisi Informasi No 1/2010	Unit Pengolah Terkait
	URUSAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN					
	1. KEBIJAKAN Kebijakan Pencarian Dan Pertolongan Meliputi Kebijakan Di Bidang Potensi Dan Pertolongan 1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2. Penyiapan kebijakan 3. Perumusan kebijakan 4. Masukan dan dukungan kebijakan 5. Penetapan NSPK	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Informasi yang wajib tersedia setiap saat berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf c UU 14/2008 "seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya" *juncto* Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi No 1/2010	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2. Potensi Pencarian dan Pertolongan					
	A. Sarana dan Prasarana					
	1. Rencana dan Standardisasi					
	a. Perencanaan dan analisa kebutuhan - Kajian Kebutuhan Peralatan - Spesifikasi Rencana Peralatan yang dibutuhkan	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Informasi yang wajib tersedia setiap saat berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf c angka 1 Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 "kajian yang mendasari terbitnya kebijakan"	Unit Pengolah Terkait
	b. Standardisasi, dan inventarisasi - Standarisasi Peralatan - Daftar Inventarisasi Peralatan	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Informasi yang wajib tersedia setiap saat berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf c angka 1 Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 "kajian yang mendasari terbitnya kebijakan"	Unit Pengolah Terkait
	2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Darat, laut, Udara dan Peralatan Pencarian dan Pertolongan	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 "ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik "	Unit Pengolah Terkait
	3. Pengawakan dan perbekalan					
	a. Pengawakan - Awak sarana Pencarian dan Pertolongan darat laut dan udara - Kebutuhan awak sarana Pencarian dan Pertolongan darat, laut dan udara - Bahan pembinaan awak sarana darat, laut dan udara	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 "ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik "	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	b. Perbekalan - Perbekalan dalam menunjang kegiatan operasi dan pembinaan potensi Pencarian dan Pertolongan - Daftar perbekalan - Inventarisasi sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan - Bahan pelaksanaan pembinaan inventarisasi sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 "ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik "	Unit Pengolah Terkait
	B. Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan					
	1. Rencana Pendidikan dan Pelatihan a. Kurikulum dan Silabus b. Evaluasi dan Monitoring	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 "ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik "	Unit Pengolah Terkait
	2. Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan a. Penyiapan Tenaga Pencarian dan Pertolongan - Pengolahan Data Tenaga b. Penyiapan Potensi Pencarian dan Pertolongan - Pengolahan Data Potensi	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 "ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik "	Unit Pengolah Terkait
	3. Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan a. Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan) b. Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 "ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik "	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	3. Operasi Pencarian dan Pertolongan					
	A. Operasi dan Latihan					
	1. Perencanaan dan Standardisasi a. Perencanaan dan Evaluasi b. Standardisasi Operasi dan Latihan SAR	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 "ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik "	Unit Pengolah Terkait
	2. Penyelenggaraan Operasi SAR a. Pengerahan Potensi SAR b. Pengendalian Operasi SAR c. Evaluasi Operasi	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta berdasarkan Pasal 10 UU 14/2008 juncto Pasal 12 Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 "Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum "	Unit Pengolah Terkait
	3. Siaga dan Latihan a. Siaga - Laporan harian - Laporan bulanan - Laporan tahunan - Evaluasi b. Latihan - Lokal - Nasional - Internasional	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta berdasarkan Pasal 10 UU 14/2008 juncto Pasal 12 Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 "Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum "	Unit Pengolah Terkait
	B. Komunikasi					
	1. Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi a. Perencanaan dan Pengembangan Sistem Komunikasi - Analisa Kebutuhan b. Standardisasi dan Evaluasi	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 "ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik "	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2. Operasi Komunikasi a. Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR) b. Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Informasi yang wajib tersedia setiap saat berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 "informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya"	Unit Pengolah Terkait
	C. Data dan Informasi					
	1. Pengembangan Sistem Informasi a. Perangkat Lunak b. Perangkat Keras	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Informasi yang wajib tersedia setiap saat berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 "informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya"	Unit Pengolah Terkait
	2. Pelayanan Informasi a. Penyajian dan pelayanan Data Informasi b. Laporan dan Pembuatan Dokumentasi (Data Base)	Biasa/terbuka	Penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal/ eksternal, penegak hukum, publik	Terbuka	Informasi yang wajib tersedia setiap saat berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 "informasi mengenai kegiatan	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
					pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya"	
XI	URUSAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
	A. KEBIJAKAN BERSIFAT PENGATURAN					
	1. Kebijakan tentang pendidikan dan kebudayaan meliputi: kurikulum, pendidikan anak usia dini, non formal dan informal, pendidikan dasar, menengah, atas, dan pendidikan tinggi.	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Penyiapan bahan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Perumusan kebijakan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Penetapan dalam bentuk NSPK	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Perumusan dan penerapan standar	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2. MOU (*Memorandum of Understanding*)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	B. KEBIJAKAN BERSIFAT PENETAPAN					
	1. Pengkajian dan pengusulan penetapan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Penyiapan bahan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Perumusan penetapan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Penetapan dalam bentuk keputusan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	C. PEMBINAAN PENDIDIKAN					
	3. Pendidikan anak usia dini, non formal dan informal	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	a. Paud a.1. Bahan ajar a.1.1. Alat Permainan Edukatif a.2. Pelatihan a.3. Block Grant a.4. Sosialisasi a.5. Peringatan hari anak nasional	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pendidikan masyarakat b.1. Penyelenggaraan program b.1.1. Bahan Ajar b.1.2. Penyusunan majalah b.2. Pemberian bantuan sosial b.2.1. Penilaian Proposal b.2.2. Pemberian Bansos	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b.3. Pembinaan program b.3.1. Temu Koordinasi b.3.2. Bintek Program/ Pendampingan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	b.3.3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan b.4. Lomba, penghargaan, dan anugerah b.5. Peringatan hari anak internasional b.6. Pameran/publikasi/sosialisasi					
	c. Kursus dan pelatihan c.1. Penyelenggaraan program c.1.1. Uji kompetensi (akreditasi) c.1.2. Penilaian dan Penetapan Kinerja c.1.3. Pendataan lembaga kursus dan pelatihan c.1.4. Penguatan kerja sama dengan lembaga/mitra c.2. Pemberian bantuan social c.3. Pembinaan program: bintek, orientasi teknis, dan temu karya c.4. Standar kursus dan pelatihan c.4.1. Kurikulum c.4.2. Bahan ajar c.5. Lomba lembaga kursus berprestasi c.6. Publikasi dan promosi kursus c.7. Sertifikasi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pendidik dan tenaga pendidikan d.1. Bahan ajar d.2. Block grant d.3. Sosialisasi (modul) d.4. Data pendidik dan tenaga pendidik	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Pendidikan dasar	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	a. Sekolah dasar a.1. Kurikulum a.2. Bahan ajar a.3. Pelatihan a.4. Block grant a.5. Bimbingan teknis/sosialisasi a.6. Lomba, sayembara, dan festival	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	a.7. Bantuan operasional sekolah (BOS) - Rencana pemberian BOS - Penetapan emberian BOS - Laporan dan Evaluasi a.8. Bantuan siswa miskin - Perencanaan - Penetapan - Laporan dan evaluasi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Sekolah menengah pertama b.1. Kurikulum b.2. Bahan ajar b.3. Pelatihan b.4. Block grant b.5. Bimbingan teknis/sosialisasi b.6. Lomba, sayembara, dan festival b.7. Bantuan operasional sekolah (BOS) - Rencana pemberian BOS - Penetapan emberian BOS - Laporan dan Evaluasi b.8. Bantuan siswa miskin - Perencanaan - Penetapan - Laporan dan evaluasi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pendidikan khusus-layanan khusus/PK-LK c.1. Bahan ajar c.2. Petunjuk teknis c.3. Block grant c.4. Sosialisasi c.5. Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore c.6. Kurikulum/bahan pembelajaran c.7. Alat bantu pembelajaran c.8. Pendataan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c.9. Kelembagaan c.9.1. Unit Kesehatan Sekolah c.9.2. Pendidikan Jasmani Adaptif c.9.3. Pendidikan Inklusi c.9.4. Block Grant	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	c.9.5. Bimbingan Teknis/sosialisasi c.9.6. Lomba, Sayembara, Festival, Gebyar					
	d. Pendidik dan tenaga pendidik d.1. Pendataan dan pemetaan d.2. Pembinaan guru dan tenaga pendidik d.3. Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik (standar, uji, dan sertifikasi kompetensi) d.4. Penilaian prestasi kerja (angka kredit) guru, dan pengawas sekolah d.5. Penghargaan guru dan tenaga kependidikan d.6. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan d.7. Block grant d.8. Bimbingan teknis/sosialisasi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	D. KEBUDAYAAN					
	1. Pelestarian cagar budaya dan permuseuman	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	a. Registrasi nasional a.1. Pendaftaran dan penetapan a.2. Pengelolaan data	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pelindungan b.1. Perizinan dan pengamanan b.2. Pemeliharaan dan pemugaran	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pengembangan dan pemanfaatan c.1. Pengembangan c.2. Pemanfaatan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Eksplorasi dan dokumentasi d.1. Eksplorasi cagar budaya d.2. Dokumentasi cagar budaya dan koleksi museum	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Pembinaan kesenian dan perfilman	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	a. Pembinaan seni pertunjukan a.1. Seni pertunjukan tradisional a.2. Seni pertunjukan tradisional	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pembinaan seni rupa b.1. Seni rupa murni b.2. Seni rupa terapan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pembinaan literasi dan apresiasi film c.1. Literasi c.2. Apresiasi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Dokumentasi dan publikasi d.1. Dokumentasi seni dan film d.2. Publikasi seni dan film	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	a. Kelembagaan dan kepercayaan a.1. Pemberdayaan lembaga a.2. Hubungan antar lembaga	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Komunitas kepercayaan b.1. Komunitas adat b.2. Upacara adat	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional c.1. Pengetahuan tradisional c.2. Ekspresi budaya tradisional	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Lingkungan budaya dan pranata sosial d.1. Lingkungan budaya d.2. Pranata sosial	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Sejarah dan nilai budaya	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	a. Sejarah a.1. Penggalian sumber sejarah a.2. Penggalian sumber sejarah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	b. Pemetaan nilai b.1. Pemetaan b.2. Klasifikasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Verfikasi dan perumusan nilai c.1. Verifikasi nilai c.2. Perumusan nilai	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	d. Dokumentasi dan publikasi d.1. Dokumentasi sejarah dan nilai budaya d.2. Publikasi sejarah dan nilai budaya	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Internalisasi nilai dan diplomasi budaya	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	1) Internalisasi nilai budaya a.1. Pengemasan nilai budaya a.2. Penanaman nilai budaya	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2) Kekayaan budaya b.1. Pencatatan kekayaan budaya b.2. Penetapan kekayaan budaya	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3) Warisan budaya nasional dan dunia c.1. Warisan budaya benda c.2. Warisan budaya takbenda	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4) Diplomasi budaya d.1. Diplomasi dalam negeri d.2. Diplomasi luar negeri	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	E. PERBUKUAN					
	1. Penyusunan standar mutu buku 2. Pengumpulan naskah 3. Penilaian mutu buku dan pemilihan 4. Persetujuan dan pengesahan naskah 5. Penerbitan dan percetakan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	6. Master buku dan naskah yang cetak 7. Distribusi buku 8. Pengembangan naskah 9. Pengkajian buku					
	F. PENILAIAN PENDIDIKAN					
	1. Penilaian akademik 2. Penilaian non akademik 3. Analisis dan sistem informasi penilaian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	G. PENGEMBANGAN SDM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN					
	1. Pengembangan profesi pendidik	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	a. Peningkatan kompetensi a.1. Pengembangan profesi pendidik paud, non formal, dan informal a.2. Pengembangan profesi pendidikan dasar a.3. Pengembangan profesi pendidik pendidikan menengah	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Sertifikasi b.1. Pengembangan profesi pendidik paud, non formal, dan informal b.2. Pengembangan profesi pendidikan dasar b.3. Pengembangan profesi pendidik pendidikan menengah b.4. Pengembangan profesi pendidik pendidikan tinggi (dosen)	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Pengembangan tenaga kependidikan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	a. Program a.1. Pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	a.2. Pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai					
	b. Evaluasi b.1. Pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik b.2. Pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Pengembangan SDM kebudayaan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	a. Program a.1. Peningkatan kompetensi a.2. Sertifikasi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Evaluasi b.1. Peningkatan kompetensi b.2. Sertifikasi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Penjaminan mutu pendidikan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	a. Pemetaan mutu a.1. Penjaminan mutu paud, nonformal, dan informal a.2. Penjaminan mutu pendidikan dasar a.3. Penjaminan mutu pendidikan menengah dan pendidikan tinggi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Sistem informasi b.1. Penjaminan mutu paud, nonformal, dan informal b.2. Penjaminan mutu pendidikan dasar b.3. Penjaminan mutu pendidikan menengah dan pendidikan tinggi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Penyusunan materi/SOP/instrumen/panduan/ pedoman a. Proposal/TOK/KAK	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	6. Penyelenggaraan pelatihan/diseminasi/sosialisasi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	7. Penyelenggaraan bimtek/monitoring dan evaluasi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	8. Penyaluran block grant pascabencana	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	9. Lomba/sayembara/festival/olimpiade pendidikan nasional internasional	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	H. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN					
	1. Pengembangan Teknologi pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film a. Perancangan dan produksi b. Aplikasi dan pengendalian	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Pengembangan jejaring a) Pengkajian dan perancangan b) Pemeliharaan dan pengendalian	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	I. DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN					
	1. Data peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan a. Validasi dan integrasi data peserta didik b. Validasi dan integrasi data peserta pendidik dan tenaga	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Data satuan pendidikan dan proses pembelajaran a. Validasi dan integrasi data satuan pendidikan b. Validasi dan integrasi data proses pembelajaran	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik a. Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik anak b. Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan dasar dan menengah c. Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan tinggi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	J. ARKEOLOGI					
	1. Program dan kerja sama penelitian a. Program b. Kerja sama	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Data dan Informasi Penelitian 1) Data 2) Informasi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	K. MONITORING DAN EVALUASI	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
XII	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
A.	URUSAN P3A					
	1. Kebijakan Kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak					
	a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Penyiapan kebijakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Perumusan kebijakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	d. Masukan dan dukungan kebijakan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Penetapan NSPK	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Pengarusutamaan gender Ekonomi, politik sosial dan hukum	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Unit pengolah terkait
	a. Data gender	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Advokasi dan fasilitasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan gender	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Perlindungan perempuan (kekerasan, masalah sosial, tenaga kerja, korban perdagangan)	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Unit pengolah terkait
	a. Data perlindungan perempuan	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	b. Advokasi dan fasilitasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	d. Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	e. Analisis dan penyajian informasi gender	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Perlindungan anak (hak sipil, masalah sosial, kekerasan terhadap anak, anak berkebutuhan khusus, anak berhadapan dengan hukum)	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Unit pengolah terkait
	a. Data perlindungan anak	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Advokasi dan fasilitasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
B.	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA					
	1. KEBIJAKAN Kebijakan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga					
	a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Unit pengolah terkait
	b. Penyiapan kebijakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Perumus	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	d. Masukan dan dukungan kebijakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	e. Penetapan NSPK	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. PENGENDALIAN PENDUDUK					
	1) PEMADUAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENDUDUK					
	1. Analisis pemaduan kebijakan pengendalian penduduk a. Pengumpulan dan pengolahan data b. Evaluasi dan pelaporan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2. Fasilitas pemaduan kebijakan pengendalian penduduk a. Penyiapan fasilitas b. Evaluasi dan pelaporan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2) PERENCANAAN PENGENDALIAN PENDUDUK					
	1. Profil dan proyeksi penduduk a. Data profil dan proyeksi penduduk b. Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Penetapan parameter pengendalian penduduk a. Penetapan sasaran parameter b. Evaluasi sasaran parameter	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk a. Pemanfaatan Profil dan Proyeksi b. Pemanfaatan Paremeter	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3) KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI					
	1. Bina kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah a. Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah b. Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana c. Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana d. Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah e. Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah f. Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2. Bina kesertaan keluarga berencana jalur swasta a. Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta b. Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta c. Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta - Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta - Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran khusus a. Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan - Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan - Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan - Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan - Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan c. Kesertaan keluarga berencana pria - Peningkatan akses keluarga berencana pria - Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria					

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	4. Kesehatan Reproduksi a. Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak b. Pencegahan PMS dan HIV/AIDS c. Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	4) KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA					
	1. Bina keluarga Balita dan Anak a. Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak - Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak - Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak b. Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak - Monitoring bina keluarga Balita dan anak - Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Bina ketahanan remaja a. Pelembagaan bina ketahanan remaja - Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan - Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakan b. Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja - Monitoring bina ketahanan remaja - Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan a. Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan - Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	- Pengembangan Program Bina Ketahanan keluaraga Rentan b. Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan - Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluaraga Lansia dan Rentan - Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan c. Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan - Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan - Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan					
	4. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga a. Pengembangan program usaha ekonomi keluarga b. Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga c. Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga - Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga - Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga d. Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	5. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera a. Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera b. Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera - Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	- Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera c. Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera - Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera - Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan eluarga Sejahtera					
	J. ADVOKASI DAN INFORMASI					
	1. Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi a) Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi - Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi - Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi b) Advokasi dan pencitraan c) Komunikasi, Informasi dan Edukasi - Promosi - Sarana produksi media komunikasi - Produk media komunikasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Bina hubungan antar lembaga	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Bina lini lapangan a) Tenaga lini lapangan - Pengembangan tenaga lini lapangan - Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan b) Bina Institusi Masyarakat Pedesaan - Pengembangan institusi masyarakat pedesaan - Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	c) Mekanisme Operasional lini lapangan - Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan - Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan					
XIII	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN					
	A. PERUMUSAN KEBIJAKAN Rencana Pembangunan Nasional meliputi : rencana pembangunan jangka panjang (RPJP)/Master Plan, rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan tahunan nasional.	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Unit pengolah terkait
	1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Penyiapan kebijakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Perumusan dan penyusunan bahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	4. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Penetapan dalam bentuk peraturan perundang-undangan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	B. MUSYARAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN/ MUSRENBANG					
	1. Musrenbang Kabupaten	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	C. PERENCAAAN PEMBANGUNAN OPD					
	1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah /Renstra-OPD	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Rencana Pembangunan Tahunan Renja-OPD	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Program Kerja Tahunan a. Usulan Unit Kerja beserta data pendukungnya b. Program kerja tahunan Unit Kerja c. Program Kerja Tahunan OPD	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Penetapan/Kontrak Kinerja a. Pimpinan OPD b. Kepala Daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Laporan 1. Berkala a.1. Laporan Triwulan a.2. Laporan Semesteran a.3. Laporan Tahunan Unit Kerja a.4. Laporan Tahunan OPD a.5. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daera 2. Laporan Insidental	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	6. Evaluasi Program a. Program OPD b. Program unit kerja	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	D. KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROVINSI	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	E. KONSULTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROVINSI	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	F. PEMANTAUAN, EVALUASI, PENILAIAN DAN PELAPORAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	G. AKSI STRATEGIS DAERAH (FORUM OPD) 1. Rancangan awal perencanaan aksi strategis Daerah 2. Rapat pembahasan rancangan awal dengan OPD 3. Sosialisasi dengan OPD 4. Rancangan akhir perencanaan aksi strategis daerah 5. Penetapan perencanaan aksi strategis daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	H. PERENCANAAN PENDANAAN PEMBANGUNAN 1. Pendanaan APBN 2. Pendanaan APBD	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
XIV	URUSAN PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN					
	1. Kebijakan Perumusan kebijakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan , penerapan serta pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi : kelembagaan, sumber daya dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	b. Penyiapan kebijakan	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	c. Perumusan kebijakan	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	d. Masukan dan dukungan kebijakan	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	e. Penetapan NSPK	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	2. Penelitian Dan Pengkajian	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	a. Rencana Kerja - Master plan/rencana strategis - Rencana kerja tahunan : proposal/idea concept paper (ICP) - Berkas/kontrak MoU kerjasama/material transfer agreement (MTA) - Perijinan penelitian	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	b. Administrasi penelitian : surat tugas/surat perintah, pembentukan tim kerja, dokumen/formulir pendukung/instruksi, persiapan survey, penggunaan peralatan (alat dan bahan), dan lain-lain.	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	c. Pelaksanaan penelitian/pengkajian - Prosedur/petunjuk - Data primer - Log Book - Studi kelayakan - Instrumen penelitian - Pelaksanaan survey - Laporan hasil pendataan/survey - Analisis/pengolahan data	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	d. Hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi - Laporan hasil penelitian dan hasil luaran - Rekomendasi	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	e. Hasil penelitian dan pengkajian hasil jasa layanan	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	3. Pengembangan dan Inovasi - Rencana kerja - Administrasi pengembangan dan inovasi - Pelaksanaan - Hasil pengembangan/inovasi	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	4. Dokumen penerapan / pemanfaatan/ pendayagunaan/ replikasi / prototipe hasil penelitian/pengkajian/ perekayasaan/pengembangan/inovasi : masyarakat, dunia industri, pemerintahan	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	5. Dokumen penerapan hasil peneliitian/pengkajian/ perekayasaan/pengembangan/inovasi masyarakat, dunia industri, pemerintahan	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	6. Dokumen pemanfaatanhasil penelitian/pengkajian/perekayasaan/pengembanga n/ inovasi : masyarakat, dunia industri, pemerintahan	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	7. Dokumen pendayagunaan hasil penelitian/ pengkajian/perekayasaan/pengembangan/ inovasi : masyarakat, dunia industri, pemerintahan	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	8. Dokumen replikasi / prototipe hasil penelitian/ pengkajian/perekayasaan/pengembangan/inovasi masyarakat, dunia industri, pemerintahan)	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	9. Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	10. Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi a. Promosi b. Pemasyarakatan	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	11. Pembinaan penelitian/pengkajian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi a. Pembinaan penelitian/pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi b. Pembinaan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	12. Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi a. Jaringan Sistem Nasional Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi b. Jaringan Sistem Nasional Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknolog c. Jaringan Sistem Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	13. Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu a. Data dan informasi hasil penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi b. Data dan informasi hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi c. Data dan informasi hasil penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	14. Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu 1) Penerbitan: jurnal/buletin ilmiah, bahan publikasi khusus 2) Leaflet dan booklet 3) Kamus istilah	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	15. Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	16. Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi a. Forum komunikasi penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi b. Forum komunikasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi c. Forum komunikasi penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	17. Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	a. Jasa laboratorium pengujian b. Jasa teknologi produksi c. Jasa stud d. Jasa penyewaan peralatan e. Jasa perbantuan tenaga ahli/profesi f. Jasa sertifikasi/kalibrasi dan sertifikasi g. Buku rekaman barang yang diuji/dikalibrasi					
	18. Sertifikasi personil peneliti	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	19. Akreditasi laboratorium	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
XV	URUSAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
I.	PERPUSTAKAAN					
	A. Kebijakan Kebijakan Perpustakaan meliputi kebijakan di bidang pengembangan bahan pustaka dan jasa informasi	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	1. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan	Terbatas	Penentu kebijakan, Pelaksana kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	2. Penyiapan Bahan	Terbatas	Penentu kebijakan, Pelaksana kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	3. Perumusan Kebijakan	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
	4. Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
	5. Penetapan Berbentuk NSPK	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
	B. Pengembangan Bahan Pustaka Dan Jasa Informasi					
	1. Deposit Bahan Pustaka a. Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam b. Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman c. Terbitan Internasional dan Regional d. Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam e. Bibliografi dan Katalog 1) Bibliografi Daerah (BD) 2) Katalog Induk Daerah (KID) 3) Katalog Dalam Terbitan (KDT)	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
	2. Pengembangan Koleksi a. Akuisisi 1) Pembelian 2) Hibah 3) Hadiah 4) Tukar Menukar 5) Implementasi Undang-Undang KCKR	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	6) Terbitan Internal 7) Pendistribusian bahan pustaka surplus 8) Inventarisasi koleksi (Buku Induk) b. Pengolahan Bahan Pustaka c. Pangkalan Data Katalog Koleksi					
	3. Jasa Perpustakaan dan Informasi a. Keanggotaan b. Sirkulasi c. Referensi d. Alih aksara, Alih Bahasa dan Kajian Naskah Nusantara e. Kerjasama Perpustakaan 1) MoU 2) Perjanjian kerjasama 3) Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional f. Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan 1) Pengembangan situs web 2) Pengembangan kemas ulang informasi multimedia 3) Pengembangan program aplikasi perpustakaan 4) Pengembangan pangkalan data kepustakaan digital g. Pangkalan Data Layanan Perpustakaan	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
	4. Preservasi Bahan Pustaka a. Konservasi 1. Perawatan Bahan Perpustakaan 2. Perbaikan Bahan Perpustakaan 3. Penjilidan Bahan Perpustakaan d. Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto) e. Transformasi Digital f. Kurasi Digital	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
	C. Sumber Daya Perpustakaan					
	1. Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca					

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	a. Pengembangan Perpustakaan 1) Perpustakaan Umum 2) Perpustakaan Khusus 3) Perpustakaan Sekolah 4) Perpustakaan Perguruan Tinggi	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
	b. Akreditasi Perpustakaan 1) Permintaan akreditasi 2) Pemberian akreditasi 3) Pangkalan Data Perpustakaan yang di akreditasi	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
	c. Pangkalan Data Perpustakaan 1) Nomor Pokok Perpustakaan 2) Perpustakaan Berbasis Wilayah	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
	d. Pemasyarakatan Minat Baca	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
	e. Organisasi Perpustakaan 1) Forum Perpustakaan Umum 2) Forum Perpustakaan Khusus 3) Forum Perpustakaan Sekolah 4) Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi 5) Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca 6) Organisasi Perpustakaan Lainnya	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	f. Pengembangan Pustakawan 1) Sertifikasi Tenaga Perpustakaan 2) Pembinaan Tenaga Perpustakaan 3) Penerbitan Jurnal 4) Penilaian Jabatan Fungsional Pustakawan a. Tim Penilai Instansi/Perpustakaan Nasional b. Tim Penilai Pusat 5) Pemasyarakatan 6) Evaluasi Tenaga Perpustakaan 7) Pangkalan data Tenaga Perpustakaan 8) Pangkalan data Tim Penilai Pustakawan	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
II.	URUSAN KEARSIPAN					
	A. Kebijakan Kebijakan tentang Pembinaan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip.	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Penyiapan kebijakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Perumusan kebijakan	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	4. Penetapan NSPK	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	B. Pengelolaan Kearsipan					
	1. Pengelolaan Arsip Dinamis					
	a. Penciptaan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	1) Pencatatan - Buku Agenda - Kartu Kendali - Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2) Pendistribusian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Penggunaan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	1) Pengklasifikasian Pengamanan dan Akses Arsip	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2) Peminjaman	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pemeliharaan					
	1) Pemberkasan - Daftar arsip aktif (daftar berkas dan isi berkas)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2) Penataan Arsip Inakti - Pengaturan fisik arsip - Pengolahan informasi arsip	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	- Penyusunan daftar arsip inaktif		penegak hukum		pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
	3) Penyimpanan arsip - Skema penyimpanan arsip - Pengamanan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	4) Alih Media	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	- Kebijakan alih media	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	- Autentikasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	- Berita acara	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	- Daftar arsip yang alih media	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5) Program Arsip vital - Identifikasi - Perlindungan dan Pengamanan - Penyelamatan dan pemulihan	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	d. Autentikasi Arsip Dinamis 1) Pembuktian Autentisitas 2) Pendapat tenaga ahli 3) Pengujian 4) Penetapan autentisitas arsip statis/surat pernyataan Pencipta Arsip	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	e. Penyusutan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	1) Pemindahan Arsip Inaktif - Berita acara Pemindahan - Daftar arsip yang di pindahkan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2) Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna - Panitia Penilai - Penilaian Panitia Penilai - Permintaan Persetujuan (Kepala ANRI, Kepala Lembaga Kearsipan) - Penetapan arsip yang dimusnahkan - Berita Acara Pemusnahan Arsip	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	- Daftar Arsip yang Dimusnahkan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3) Penyerahan arsip statis	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	- Pembentukan Panitia Penilai	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	- Notulen Rapat Panitia	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	- Surat Pertimbangan Panitia Penilai	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	- Surat Persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	- Surat Pernyataan Autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan dari pencipta arsip	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	- Keputusan Penetapan Penyerahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	- Berita Acara Penyerahan Arsip	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	- Daftar Arsip yang diserahkan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis 1) Data Base Pengelolaan Arsip Aktif 2) Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Pengelolaan Arsip Statis					
	a. Akuisisi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	1) Monitoring fisik dan daftar	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2) Verifikasi terhadap daftar arsip	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3) Menetapkan status arsip statis	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	4) Persetujuan untuk Penyerahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	5) Penetapan arsip yang diserahkan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	6) Berita Acara Penyerahan Arsip	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	7) Daftar arsip yang diserahkan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Sejarah Lisan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	1) Administrasi Pelaksanaan Sejarah Lisan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2) Hasil Wawancara Sejarah Lisan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	- Berita acara wawancara Sejarah Lisan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	- Laporan Kegiatan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	- Hasil wawancara (Kaset atau CD) dan transkrip	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Daftar Pencarian Arsip Statis 1) Pengumuman 2) Akuisisi daftar pencarian arsip statis	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Penghargaan dan Imbalan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Pengolahan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	1) Menata Informasi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2) Menata Fisik	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3) Menyusun Sarana Bantu Temu Balik	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	- Guide - Daftar Arsip Statis - Inventaris Arsip Statis	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Preservasi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	1) Preventif - Penyimpanan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	(-) Berita acara Alih Media (-) Daftar arsip yang dialih mediakan - Perencanaan dan Penanggulangan Bencana					terkait
	2) Kuratif - Perawatan Arsip	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3) Laporan hasil Pengujian Mutu Preservasi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	g. Autentikasi Arsip Statis	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	1) Pembuktian Autentisitas	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2) Pendapat tenaga ahli	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3) Pengujian	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4) Penetapan autentisitas arsip statis/surat pernyataan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	h. Akses Arsip Statis 1) Layanan Arsip 2) Penerbitan Naskah Sumber - Administrasi dan proses penyusunan - Hasil naskah sumber arsip 3) Pameran arsip	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	3. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	a. Perencanaan menjadi simpul jaringan SIKN melalui JIKN	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Pendidikan dan pelatihan materi simpul jaringan SIKN melalui JIKN	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pengelolaan informasi arsip simpul jaringan SIKN melalui JIKN	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	a. Perencanaan pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pelaksanaan pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Evaluasi dan pelaporan pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan kelurahan.	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	a. Persiapan Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan kelurahan.	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pelaksanaan Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan kelurahan.	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	c. Evaluasi dan Pelaporan Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan kelurahan.	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	a. Permohonan izin pengunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Kajian/Telaah izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Penolakan/Pemberian izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
XVI	URUSAN PARIWISATA					
A.	Kebijakan Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meliputi kebijakan dibidang Pengembangan	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Unit pengolah terkait
	1. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2. Penyiapan Bahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Perumusan Kebijakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	4. Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Penetapan Berbentuk NSPK	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
B.	Pengembangan Destinasi Pariwisata					
	1. Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata					
	a. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (Kawasan Strategis Pariwisata)	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Kawasan Pengembangan Destinasi Pariwisata (Perancangan Destinasi Pariwisata)	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pengembangan Zona Kreatif a. Zona Kreatif Berbasis Seni dan Budaya b. Zona Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Investasi Pariwisata 4) Pengembangan Potensi Investasi 5) Promosi Investasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2. Pengembangan Daya Tarik Wisata					
	a. Bimtek Daya Tarik Wisata	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Fasilitasi Pengembangan Daya Tarik Wisata	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pengembangan daya tarik wisata kota pusaka	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Penilaian Kelayakan Tugas Pembantuan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	e. Penghargaan Pengelolaan Daya Tarik Wisata (Cipta Award)	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Industri Pariwisata					
	a. Sarana Pariwisata 1) usaha daya tarik wisata dan kawasan pariwisata 2) penyediaan akomodasi, jasa makanan dan minuman, serta tirta dan spa	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Jasa Pariwisata: 1) jasa transportasi wisata 2) jasa informasi pariwisata 3) penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi 4) jasa perjalanan wisata 5) jasa konsultan pariwisata 6) jasa pramuwisata dan penyelenggaraan pertemuan 7) insentif 8) konvensi 9) pameran	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	c. Pengembangan Produk dan Pelayanan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata 1. Perancangan dan Pemantauan Pemberdayaan Pariwisata 2. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa 3. Kemitraan dan Kelembagaan Masyarakat	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event					
	1. Pengembangan Wisata Kulier dan Belanja	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Pengembangan Rekreasi dan Hiburan a. Pengembangan Wisata Spa dan Kesehatan b. Pengembangan Wisata Olah Raga	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Pengembangan Wisata Alam dan Budaya	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	4. Pengembangan Wisata Konvensi, Insentif dan Event	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
C.	Pemasaran Pariwisata					
	1. Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata					
	a. Informasi Pasar Dalam Negeri 1) Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri 2) Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Informasi Pasar Luar Negeri 1) Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri 2) Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	c. Hubungan Lembaga Pariwisata dan Widya Wisata 1) Hubungan Lembaga Pariwisata 2) Widya Wisata	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	d. Perancangan Pemasaran Pariwisata 1) Perancangan Pemasaran Dalam Negeri 2) Perancangan Pemasaran Luar Negeri	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Promosi Pariwisata Luar Negeri a. Wilayah ASEAN b. Wilayah Asia	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Promosi Pariwisata Dalam Negeri	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	4. Pencitraan Indonesia	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	a. Strategi Pencitraan Indonesi 1) Perencanaan Pencitraan Indonesia 2) Pemantauan dan Evaluasi Pencitraan Indonesia	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Komunikasi Media Cetak, Media Elektronik dan Digital, dan Media Ruang 1) Promosi Media 2) Sarana dan Distribusi Media	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Kerjasama dan Kemitraan 1) Kerjasama dan Kemitraan Antar Lembaga Pemerintah 2) Kerjasama dan Kemitraan Antar Lembaga Non-Pemerintah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	5. Promosi Konvensi, Insentif, Event, dan Minat Khusus					
	a. Promosi KIE Korporasi 1. Korporasi Dalam Negeri 2. Korporasi Luar Negeri	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Promosi KIE Pemerintah dan Non Pemerintah 1) Pemerintah 2) Non Pemerintah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Promosi Minat Khusus 1) Wisata Bahari 2) Wisata Non Bahari	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Pengembangan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif a. Program dan Evaluasi b. Penyelenggaraan dan Kerjasama	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	4. Kompetensi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif a. Program dan Evaluasi b. Evaluasi dan Kerjasama	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
D.	Kebudayaan					
	1. Pelestarian cagar budaya dan permuseuman	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	a. Registrasi nasional a.1. Pendaftaran dan penetapan a.2. Pengelolaan data	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pelindungan b.1. Perizinan b.2. Pemeliharaan dan pemugaran b.3. Pengembangan dan pemanfaatan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	c. Eksplorasi dan dokumentasi c.1. Eksplorasi cagar budaya c.2. Dokumentasi cagar budaya dan koleksi museum	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Pembinaan kesenian dan perfilman	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	a. Pembinaan seni pertunjukan a.1. Seni pertunjukan tradisional a.2. Seni pertunjukan non tradisional	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pembinaan seni rupa b.1. Seni rupa murni b.2. Seni rupa terapan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pembinaan literasi dan apresiasi film c.1. Literasi c.2. Apresiasi	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Dokumentasi dan publikasi d.1. Dokumentasi seni dan film d.2. Publikasi seni dan film	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Pembinaan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	a. Kelembagaan dan kepercayaan a.1. Pemberdayaan lembaga a.2. Hubungan antar lembaga	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Komunitas kepercayaan b.1. Komunitas adat b.2. Upacara adat	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional c.1. Pengetahuan tradisional c.2. Ekspresi budaya tradisional	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Lingkungan budaya dan pranata sosial d.1. Lingkungan budaya d.2. Pranata sosial	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Sejarah dan nilai budaya	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	a. Sejarah a.1. Penggalian sumber sejarah a.2. Penulisan sumber sejarah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Pemetaan nilai b.1. Pemetaan b.2. Klasifikasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Verfikasi dan perumusan nilai c.1. Verifikasi nilai c.2. Perumusan nilai	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	d. Dokumentasi dan publikasi d.1. Dokumentasi sejarah dan nilai budaya d.2. Publikasi sejarah dan nilai budaya	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Internalisasi nilai dan diplomasi budaya					
	a. Internalisasi nilai budaya a.1. Pengemasan nilai budaya a.2. Penanaman nilai budaya	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Kekayaan budaya b.1. Pencatatan kekayaan budaya b.2. Penetapan kekayaan budaya	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Warisan budaya nasional dan dunia c.1. Warisan budaya benda c.2. Warisan budaya takbenda	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Diplomasi budaya d.1. Diplomasi dalam negeri d.2. Diplomasi luar negeri	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
XVII	URUSAN SOSIAL					
1.	Kebijakan kebijakan Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Penyiapan Kebijakan	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy	Unit pengolah terkait
	c. Perumusan Kebijakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	d. Masukan dan Dukungan Kebijakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	e. Penetapan NSPK	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
2.	Rehabilitasi Sosial					
	a. Kesejahteraan Sosial Anak					
	1) Kesejahteraan Sosial Anak Balita a) Pengangkatan anak b) Pengasuhan anak	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2) Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar a) Pengasuhan anak Dalam Keluarga b) Pengasuhan Anak Dalam Lembaga	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3) Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum a) Perlindungan dan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum b) Pengembangan remaja	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4) Kesejahteraan Sosial AnakDengan Kecacatan a) Kelembagaan dan Penguatan Keluarga b) Aksessibilitas Anak Dengan Kecacatan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5) Kesejahteraan Sosial Anak yang membutuhkan perlindungan Khusus a) Kelembagaan Perlindungan Anak b) Advokasi dan perlindungan khusus	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia					
	1) Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Disabilitas a) Dalam Panti b) Luar panti	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2) Kelembagaan dan Advokasi Sosial	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3) Asistensi dan Pemeliharaan Kesejahteraan Sosial	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial					
	1) Gelandangan, Pengemis dan Pemulung	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2) Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang (Trafficking)	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3) Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan a) Penyiapan b) Reintegrasi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	4) Pelayanan Sosial orang dengan HIV/AIDS dan Kelompok Minoritas	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Rehabilitasi Sosial Korban Penyalagunaan NAPZA					
	1) Pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan pengembangan peran	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2) Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Dalam Istitusi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Pelayanan sosial lanjut usia					
	1) Pelayanan sosial dalam dan luar panti	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2) Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3) Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
3.	Perlindungan dan Jaminan Sosial					
	a. Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial 1) Bimbingan dan Standarisasi 2) Perizinan dan Pengumpulanm	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran 1) Perlindungan sosial korban tindak kekerasan meliputi pemulihan sosial, pemulangan dan reintegrasi 2) Perlindungan sosial pekerja migran meliputi penampungan dan pemulihan sosial, pemulangan dan reintegrasi 3) Evaluasi dan pelaporan meliputi kerjasama, pemantauan, evaluasi dan pelaporan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	c. Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 1) Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya 2) Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial 3) Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi social 4) Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 1) Kesiapsiagaan dan mitigasi 2) Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial 3) Pemulihan sosial dan penguatan social 4) Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Jaminan Sosial 1) Sseleksi dan vrifikasi 2) Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi 3) Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran 4) Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
4.	Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan					
	a. Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial (1) Ketahanan keluarga meliputi bimbingan kesejahteraan sosial keluarga, konsultasi dan advokasi keluarga (2) Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan (3) Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi social (4) Kemitraan dunia usaha meliputi kerjasama, bimbingan social (5) Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	b. Pemberdayaan komunitas adat terpencil (1) Persiapan pemberdayaan meliputi identifikasi, analis (2) Pemberdayaan sumber daya manusia meliputi pemberdayaan sumberdaya manusia adat terpencil, pemberdayaan pendamping sosial komunitas adat terpencil (3) Penggalian dan pengembangan potensi meliputi penggalian potensi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan, pengembangan potensi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan (4) Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil meliputi keserasian sosial, penguatan sosial (5) Kerjasama kelembagaan meliputi kerjasama kelembagaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 1) a) Keserasian sosial b) Penguatan sumber daya 2) Tanggap darurat a) Bantuan darurat b) Advokasi Sosial 3) Pemilihan Sosial a) Penguatan Sosial b) Reintegrasi Sosial 4) Kerjasama a) Kerjasama pemerintah b) Kerjasama Non pemerintah	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 1) Kesiapsiagaan Dan Mitigasi 2) Tanggap Darurat a) Bantuan darurat b) Advokasi Sosial 3) Pemulihan Sosial dan Penguatan Sosial 4) Kesejahteraan Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	a) Kelembagaan Perlindungan Anak b) Advokasi perlindungan Khusus					
	c. Jaminan Sosial Keluarga (PKH) 1) Seleksi dan Verifikasi 2) Kelembagaan dan Advokasi Sosial a) Pendampingan b) Penyaluran 3) Kerjasama a) Kerjasama Pemerintah b) Kerjasama Non Pemerintah	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
4.	Pemberdayaan Sosial					
	a. Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial					
	1) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) a) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) b) Tenaga Kesejahteraan Sosial Keluarga (TKSK) c) Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2) Tenaga kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Organisasi Sosial	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3) Kemitraan Dunia Usaha a) Kerjasama b) Bimbingan Sosial	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4) Karang Taruna a) Kelembagaan b) Pengembangan Fasilitas	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pemberdayaan Komunikasi Adat Terpencil					
	1) Persiapan Pemberdayaan a) Identifikasi b) Analisis	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia a) Pemberdayaan Sumber daya manusia adat terpencil b) Pemberdayaan Pendamping Sosial adat Terpencil	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	3) Penggalian dan Pengembangan Potensi a) Pengendalian Potensi Sosial , Budaya, Ekonomi, dan Lingkungan b) Pengembangan Potensi Sosial, Budaya, Ekonomi dan Lingkungan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4) Keserasian Dan Penguatan Komunikasi adat terpencil a) Keserasian social b) Penguatan Sosial	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5) Kerjasama Kelembagaan a) Kerjasama Kelembagaan b) Penguatan Sosial	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Kepahlawanan, Kesetiakawanan dan Pengelolaan					
	1) Sumber Dana Sosial Penghargaan dan kesejahteraan Keluarga Pahlawan a) Pengangkatan b) Penghargaan c) Kesejahteraan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2) Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan a) Identifikasi b) Pemberdayagunaan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3) Pengembangan Kesetiakawanan Sosial a) Penggalian Nilai b) Pelestarian Nilai	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4) Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional a) Pengelolaan Taman Makam Nasional Utama b) Standarisasi Taman Makam Pahlawan Dan Makam Pahlawan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5) Pengelolaan Sumber Dana Sosial a) Bimbingan dan standarisasi b) Pengumpulan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
5.	Penanganan Fakir Miskin					
	a. Penanganan Fakir Miskin Pedesaan 1) Identifikasi dan Analisa 2) Pengembangan Kapasitas a) Pengembangan Kapasitas Sumber daya Manusia b) Pengembangan kapasitas Usaha 3) Advokasi Sosial dan Pengembangan Aksibilitas 1) Advokasi Sosial 2) Pengembangan Aksebilitas	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Penanganan Fakir Miskin Perdesaan 1) Identifikasi dan Analisa 2) Pengembangan Kapasitas (a) Pengembangan Kapasitas Sumber daya Manusia (b) Pengembangan kapasitas Usaha 3) Advokasi Sosial dan Pengembangan Aksibilitas a. Advokasi Sosial b. Pengembangan Aksebilitas	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 1) Identifikasi dan Analisa 2) Pengembangan Kapasitas a) Pengembangan Kapasitas Sumber daya Manusia b) Pengembangan kapasitas Usaha 3) Advokasi Sosial dan Pengembangan Aksibilitas a) Advokasi Sosial b) Pengembangan Aksebilitas	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
XVIII	URUSAN KESEHATAN					
A.	Perumusan Kebijakan Kebijakan di bidang Bina Upaya Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Bina Kefarmasian dan Alat Kesehata	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Unit pengolah terkait
	1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Penyiapan bahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	4. Pengumpulan dan pengolahan data	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Penetapan dalam bentuk NSPK dan standarisasi	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
B.	Upaya Kesehatan					
	1. Upaya Kesehatan Dasar b. Pelayanan Kedokteran Keluarga c. Praktik Klinis Bagi Dokter di Fanyaskes Primer d. Pelaksanaan Kesehatan Primer e. Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas f. Kesehatan Gigi dan Mulut di Rumah Sakit g. ICD 10, Destistry & Stomatology h. Infeksi Menular Lewat Tranfusi Darah i. Penyakit Mulut di Tingkat Primer j. Pembiayaan Darah k. Penggunaan Darah Rasional l. Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Darah m. Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, sangat terpencil dan kepulauan n. Akreditasi Puskesmas o. Puskesmas Berprestasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Upaya Kesehatan Rujukan					
	a. Pelayanan Kesehatan Rujukan 1) Rumah Sakit Bergerak 2) Rumah Sakit Pratama 3) Rumah Sakit Publik 4) Rumah Sakit Privat 5) Rumah Sakit Khusus	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Pelayanan Kedokteran, Organisasi Profesi dan Konsorsium Upaya Kesehatan (KUK)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Pelayanan Rumah Sakit Privat 1) Akses Pelayanan SPGDT Call 119 2) Akses Pelayanan Rekayasa Jaringan dan Sel Punca 3) Pelayanan Geriartri 4) Pelayanan Medical Tourism 5) Pelayanan Hyperbarik	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	d. Pelayanan 1) Rumah Sakit Rujukan Regional Jejaring Pelayanan Kanker 2) Rumah Sakit Rujukan Nasional dan Rumah Sakit Rujukan Regional 3) Pencegahan Froud di Rumah Sakit	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	e. Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan 1) Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan 2) Biaya Klaim Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) dari Luar Negeri	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	f. Badan Pengawas di Rumah Sakit	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	g. Badan Pengawas di Rumah Sakit	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Keperawatan dan Keteknisian Medik a. Pelayanan Keperawatan Dasar b. Pelayanan Keperawatan Profesional di Rumah Sakit c. Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum d. Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus e. Bina Pelayanan Kebidanan f. Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterapian Fisik	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	4. Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan					
	a. Mikrobiologi dan Imunologi 1) Laboratorium Kesehatan 2) Laboratorium Klinik 3) Laboratorium Puskesmas 4) Laboratorium Mikrobiologi Kultur	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	b. Patologi dan Toksikologi 1) PNPME 2) Sarana Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Radiologi 1) Pelayanan Radiologi 2) Dosis Radiasi Nasional 3) Radiologi, Radioterapi dan Kedokteran Nuklir 4) Radioterapi di Rumah Sakit 5) Telemedicine 6) Radiologi Diagnostik 7) Teleradiologi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	d. Perijinan dan Sertifikasi 1) Perijinan Pelayanan Radiologi 2) Sertifikasi Peningkatan Kapabilitas	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	e. Sarana dan Prasarana Kesehatan 1) Prasarana Bangunan Rumah Sakit Kelas C 2) Prasarana Ruang Gawat Darurat 3) Prasarana Ruang Operasi 4) Prasarana Ruang Perawatan Intensif 5) Prasarana Ruang Rawat Inap 6) Prasarana Ruang Rehabilitasi Medik 7) Prasarana Ruang Instalasi Sterilisasi Sentral (CSSD) 8) Prasarana Ruang Yang Aman dalam Situasi Darurat Dan Bencana 9) Prasarana Instalasi Penyediaan Air Bersih untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan 10) Prasarana Instalasi Pengolahan Air Limbah pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	11) Prasarana Rumah Sakit Keselamatan Jiwa 12) Prasarana Rumah Sakit Sistem Instalasi Gas Medik Dan Vakum Medik 13) Prasarana Rumah Sakit Sistem Instalasi Tata Udara 14) Prasarana Rumah Sakit Sistem Proteksi Kebakaran Aktif					
	f. Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1) Kalibrasi BPFK/LPFK/UPFK 2) Kalibrasi Rumah Sakit 3) Kalibrasi Puskesmas 4) Pemeliharaan Peralatan kesehatan Rumah Sakit 5) Pemeliharaan Peralatan kesehatan Puskesmas	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	g. Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK) 1) ASPAK Rumah Sakit 2) ASPAK Puskesmas 3) ASPAK Dinas Kesehatan Kabupaten	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	5. Kesehatan Jiwa					
	a. Kesehatan Jiwa di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1) Kesehatan Jiwa di Desa Siaga 2) Kegawatdaruratan Psikiatrik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer 3) Promosi Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Bina Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1) Layanan Unggulan di RS Jiwa 2) Rehabilitasi Psikososial di RS Jiwa 3) Indikator Mutu RS Jiwa 4) Mutu Layanan Jiwa di RS Jiwa dan RSUD sesuai Penyelenggaraan RS	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	c. Etikolegal dan Asesmen 1) Penanggulangan Penelantaran dan Pemasungan Serta Penanganan Salah Lainnya 2) Visum Et Repertum	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	d. Pencegahan 1) Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) 2) Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gangguan Penggunaan Alkohol 3) Wajib Lapor Pecandu Narkotika 4) Pencegahan Masalah Akibat Penggunaan Tembakau 5) Rehabilitasi Medis terkait Hukum	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	e. Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko 1) Kesehatan Jiwa Di Sekolah 2) Kesehatan Jiwa dan Dukungan Psikososial Penanggulangan Bencana 3) Penanggulangan Autisme 4) Kesehatan Jiwa Pada Kelompok Berisiko 5) Psikologi Awal (PFA) Bagi Petugas Siaga Bencana	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
C.	Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan					
	1. Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra					
	a. Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa (KLB) 1) Difteri 2) Polio 3) Penyelenggaraan Kegiatan Survei Pre TAS filariasis 4) Surveilans influenza 5) Keracunan Pangan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Imunisasi 1) Pekan Imunisasi Nasional 2) Coldchain Bagi Petugas Imunisasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	3) Introduksi imunisasi DPT-HB-HIB (Pentavalen) pada bayi dan Balita 4) Imunisasi bagi Petugas Kesehatan 5) Imunisasi di Daerah Sulit 6) Imunisasi TT bagi wanita usia subur(WUS) 7) Imunisasi bagi masyarakat umum 8) Vaksin dan serum program imunisasi, Pencanangan vaksin baru DPT-HIB-Hib 9) Imunisasi Campak, Polio, Difteri, TT, DPT, Pertusis, Tetanus dan HIB B/ Haemophilis		serta penegak hukum		pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
	c. Kesehatan Matra 1) Mudik Sehat 2) Kesehatan bagi Penumpang Darat, Penumpang Kapal Laut dan Penumpang Pesawa 3) Kesehatan Migran 4) Upaya Kesehatan Penyelaman dan Hyperbarik 5) Penanggulangan Kesehatan akibat gangguan Kamtibmas 6) Kesehatan Transmigrasi bagi tenaga kesehatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Pengendalian Penyakit Menular Langsung					
	a. Pengendalian Tuberkulosis 1) Pengendalian Penyakit TB 2) TB Multi Drug Resitance, TB, DOTS, WARSOR TB, TB Anak, TB HIV, Keperawatan 3) Laboratorium TB	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual 1) Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) / Integrated Bio-Behavioural 2) Human Immuno Deficiency Virus (HIV)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	3) Infeksi Menular Seksual (IMS), Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP), 4) Obat Anti Retro Viral (ARV) dan reagen tes HIV					
	c. Pengendalian Infeksi Pengendalian Saluran Pernafasan Akut 1) Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS CoV) 2) Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	d. Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan 1) Diare 2) Tifoid 3) Hepatitis	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	e. Pengendalian Kusta dan Frambusia 1) Kusta 2) Frambusia 3) Alliansi Nasional Eliminasi Kusta dan Frambusia (ANEK)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang					
	a. Pengendalian Malaria 1) Kelambu berinsektisida (LLINs) 2) Eliminasi malaria 3) Crosscheker mikroskopis malaria	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Pengendalian Arbovirosisi 1) DBD 2) Chikungunya 3) Ebola	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	c. Pengendalian Zoonosis 1) Penyakit flu burung 2) Vaksin Anti Rabies (VAR) baru 3) Penyakit Pes 4) Penyakit flu baru Hemagglutinin tipe 1 dan Neuraminidase tipe 1 (H.1.N.1)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	d. Pengendalian Filariasis dan Kecacingan 1) Filariasis 2) Kecacingan 3) Schistosomiasis	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	4. Pengendalian Vektor					
	a. Pengendalian Penyakit Tidak Menular					
	1) Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah 2) Penyakit Jantung 3) Penyakit Pembuluh darah 4) Penyakit Hipertensi 5) Penyakit Stroke	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Pengendalian Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik 1) Penyakit Diabetes Mellitus 2) Penyakit gangguan Metabolik 3) Penyakit gangguan Tiroid 4) Gangguan Obesitas	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Pengendalian Penyakit Kanker	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	d. Pengendalian Penyakit Kronis dan Generatif 1) Penyakit Akibat produk tembakau 2) Asma, Lupus, Thalassemia	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	e. Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan 1) Pengendalian Cidera 2) Pengendalian Kecelakaan Lalu Lintas 3) Penanganan Kesehatan akibat Tindak Kekerasan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	5. Penyehatan Lingkungan					
	a. Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar 1) Pengawasan Kualitas Air Minum 2) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Penyehatan Pemukiman dan Tempat-Tempat Umum 1) Higiene sanitasi dan Bangunan Umum 2) Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan 3) Pengendalian faktor resiko di rumah dan tempat umum	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat 1) Penanggulangan kedaruratan bidang Kesehatan Lingkungan 2) Fasilitas Kesehatan Masyarakat di daerah terpencil perbatasan 3) Pelabuhan Sehat, Pasar Sehat, dan Kota Sehat 4) Penyehatan kawasan dan sanitasi dasar	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	d. Higiene Sanitasi Pangan 1) Makanan Jajanan 2) Restoran / Rumah Makan 3) Jasa Boga 4) Depot Air Minum	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	e. Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi 1) Medis Fasyankes 2) Limbah Medis (Free Mercury) 3) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	(Amdal) 4) Pengamanan Dampak kesehatan radiasi non pengion		serta penegak hukum		dan fungsi lembaga pemerintahan.	
	6. Pengembangan dan Penapisan Teknologi Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan					
	a. Pengembangan Teknologi dan Laboratorium 1) Laboratorium Pengendali Penyakit 2) Laboratorium Kesehatan Lingkungan 3) Laboratorium Kesehatan Matra 4) Model dan Teknologi Tepat Guna 5) Uji kendali mutu dan kalibrasi 6) Pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan pada instalasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	7. Sertifikasi Sanitasi Kesehatan dan Pengujian Kesehatan					
	a. Ship Sanitation 1) Ship Sanitation Control Exemption of Certificate (SSCEC) 2) Ship Sanitation Control of Certificate (SSCC) 3) 3) Sertifikat Pengawasan Obat/Alat P3K Kapal	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Sertifikat 1) Health Certificate 2) International Certificate of Vacination 3) Surat Keretangan Pengujian Kesehatan Nahkoda/Pilot dan Anak Buah Kapal. 4) Sertifikat Air Bersih 5) Sertifikat Penyelenggaraan Perusahaan Fumigasi di Kapal 6) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga 7) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan 8) Rekomendasi hasil uji laboratorium rujukan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
D.	Gizi Dan Kesehatan Ibu Dan Anak					
	A. Gizi					
	1. Gizi Makro a. Gerakan b. Pemantauan pertumbuhan Anak (Pos Yandu)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Gizi Mikro a. Upaya b. Manajemen Taburia c. Upaya penanggulangan masalah gizi mikro lainnya	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Gizi Klinik dan Dietetik a. Pelayanan Gizi di Puskesmas, Rumah Sakit, dan Instansi b. Tatalaksana Anak Gizi Buruk c. Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Lebih	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	4. Konsumsi Makanan dan Jasa Makanan a. Makanan Pendamping ASI b. ASI Eksklusif c. Pedoman Gizi Seimbang d. Makanan Bayi dan Anak e. Buffer Stock Makanan Pendamping ASI f. Makanan Tambahan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis dan Balita Gizi Kurang g. Makanan Tambahan Anak Sekolah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	5. Kewaspadaan Gizi a. Surveilans Gizi b. Epidemiologi Kasus Gizi Buruk c. Penanganan Bidang Gizi dalam Situasi Bencana d. Jejaring Informasi Pangan dan Gizi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	B. Kesehatan Ibu					
	1. Kesehatan Ibu Hamil a. Pelayanan Antenatal Terpadu b. Pelayanan Kelas Ibu Hamil	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	c. Pencegahan Penularan HIV AIDS dari Ibu ke Anak (PPIA)		serta penegak hukum		pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
	2. Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas a. Kemitraan Bidan dan Dukun b. Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) c. Supervisi Fasilit	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Kesehatan Maternal Dengan Pencegahan Komplikasi a. Audit Maternal Perinatal b. Program c. Tanda Bahaya pada Kehamilan d. Surveilans Kematian Ibu	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	4. Keluarga Berencana a. Pelayanan KB Pasca Persalinan b. Pelatihan KB Pasca Persalinan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	5. Perlindungan Kesehatan Reproduksi a. Pelayanan Kese b. Pelayanan c. Pencegahan da d. Pengarus Utamaan Gender Bidang Kesehatan (PUGBK)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	C. Kesehatan Anak					
	1. Kelangsungan Hidup Bayi a. Pelayanan Kesehatan Neonatal b. Manajemen Asfeksia c. Manajemen BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) d. Pencegahan Infeksi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Kelangsungan Hidup Anak Balita dan Pra Sekolah a. Pelatihan SDIDTK (Stimulasi Dini Interfensi Deteksi Tumbuh Kembang) b. Rujukan Tumbuh Kembang c. Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Komputer (ICATT)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	3. Kewaspadaan Penanganan Balita Berisiko a. Screening Hypotheroid Congenital b. Surveilance Kesehatan Anak c. Surveilance Kesehatan Bawaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	4. Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja a. Tempat Penanganan Kesehatan Remaja di Rumah Sakit b. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja c. Usaha Kesehatan Sekolah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	5. Perlindungan Kesehatan Anak a. Korban kekerasan terhadap anak b. Anak dengan disabilitas c. Anak terlantar/anak jalanan di panti d. Anak yang berhadapan dengan hukum di Lapas/Rutan e. Anak kelompok terasing/kelompok minoritas	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	D. Kesehatan Tradisional Alternatif, dan Komplementer					
	1. Kesehatan Tradisional Keterampilan a. Akupresure b. Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional c. Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan di Fasyankes d. Pelayanan Tradisional Keterampilan Lainnya	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Kesehatan Tradisional Ramuan a. Health Tourism b. Peningkatan Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA) c. Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA) d. Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional e. Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan di Fasyankes	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	3. Kesehatan Alternatif dan Komplementer a. Akupunktur b. Obat Herbal / Obat Tradisional c. Integrasi Yankestrad d. Pelayanan Alternatif Komplementer lainnya	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	4. Penapisan dan Kemitraan a. Sentra Penerapan dan Pengembangan Pengobatan Tradisional (SP3T) b. Kelompok c. Penapisan Pengobat Tradisional Asing d. Kemitraan Pengobatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer e. Pengobat Tradisional (Lokal) f. Asosiasi Pengobat Tradisional	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	E. Kesehatan Kerja dan Olahraga					
	1. Pelayanan Kesehatan Kerja a. Penyakit Akibat Kerja b. Pemeriksaan Kesehatan Pekerja c. Pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Kapasitas Kerja a. Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif b. Kapasitas Kesehatan Kerja c. TP ASI	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Lingkungan Kerja a. Pelayanan Kesehatan Kerja di KKP b. K3 Perkantoran c. K3 Rumah Sakit d. K3 Puskesmas e. Biomonitoring Efek Kesehatan f. Review Pedoman Pengendalian Risiko Kesehatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	4. Kemitraan Kesehatan Kerja a. Pengembangan Jabfung Pembimbing Kesehatan Kerja b. Kesehatan Nelayan b. Integrasi Pos UKK	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	c. Kabupaten/Kota Percontohan d. Penguatan Profesi					
	5. Kesehatan Perkotaan a. Kawasan Kumuh dan Miskin Perkotaan b. Forum Kota	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	6. Kesehatan Olahraga a. Kebugaran Jasmani bagi Karyawan/Pekerja b. Kebugaran Jasmani bagi Calon Jemaah Haji c. Kebugaran Jasmani bagi Usia Sekolah d. Olahraga bagi Ibu Hamil/Masa Nifas e. Olahraga Bagi Usia Lanjut f. Pelayanan Kesehatan Olahraga Masyarakat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
E.	KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN					
	1. Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Penyediaan, Pengelolaan,Analisis, Pemantauan & Evaluasi)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	a. Harga Obat Publik a.1. Harga Jual Obat Generik a.2. Harga Jual Obat Generik Berdagang a.3. Harga Eceran Tertinggi pada Label Obat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Pengadaan Obat b.1. Pengadaan Vaksin Reguler b.2. Obat Esensial b.3. Obat Pelayanan Kesehatan Dasar, Kabupaten Kota dan Nasional b.4. Obat Program Malaria b.5. Obat Program Kesehatan Anak b.6. Obat Program Kesehatan Ibu b.7. Obat Program Gizi b.8. Obat Anti Tuberkulosis	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	b.9. Obat dan Alat Kesehatan Haji Indonesia b.10. Obat Penderita Thalassemia b.11. Obat Psikotropika Generik b.12. Obat Anti Retro Viral					
	c. Perbekalan Kesehatan c.1. Gudang Farmasi c.2. Kelengkapan Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan c.3. Pemusnahan Obat, Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan c.4. Pengadaan Reagen Screening Darah c.5. Obat Buffer Stock c.6. Hasil Stock Opname Obat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	a. Alat Kesehatan a.1. Alat Kesehatan a.2. Kopendium Alat Kesehatan a.3. Pelabelan Alat Kesehatan Dan PKRT a.4. Post Market & Surveillance Alat Kesehatan a.5. Produk Alat Kesehatan Elektromedik a.6. Produk Alat Kesehatan Non Elektromedik	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Produsen dan Distributor Alat Kesehatan dan Obat b.1. Industri Farmasi b.2. Pedagang Besar Farmasi b.3. Pedagang Eceran Obat b.4. Penyalur Alat Kesehatan b.5. Toko Alat Kesehatan b.6. Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	c. Produk Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) c.1. Produk Diagnostik In Vitro c.2. Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) c.3. PKRT Klas III c.4. PKRT Klas I dan II c.5. Perusahaan Rumah Tangga PKRT c.6. Penggunaan Pestisida Di Rumah Tangga c.7. Post Market & Surveillance PKRT	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Kefarmasian (Standarisasi, klinis, komunitas dan Obat Tradisional)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	a. Pelayanan Kefarmasian a.1. Visite untuk Apoteker a.2. Tanggung Jawab Apoteker terhadap Keselamatan Pasien (Patient Safety) a.3. Penulisan Resep	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Farmasi Klinik b.1. Pharmaceutical Care untuk Penyakit Artritis Rematik b.2. Pharmaceutical Care untuk Penyakit Asma b.3. Pharmaceutical Care untuk Penyakit Flu Burung b.4. Pharmaceutical Care untuk Penyakit Hati b.5. Pharmaceutical Care untuk Penyakit Diabetes Mellitus b.6. Pharmaceutical Care untuk Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan b.7. Pharmaceutical Care untuk Penyakit Tuberculosis b.8. Pharmaceutical Care Lainnya b.9. Dispensing Sediaan Steril	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	b.10. Pencampuran Obat Suntikan Penanganan Sediaan Sitostatika b.11. Pharmaceutical Care untuk Pasien Penyakit Jantung Koroner : Fokus Sindrom					
	c. Farmasi Komunitas c.1. Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas c.2. Kefarmasian di Rumah (Home Pharmacy Care) c.3. Kefarmasian untuk Pasien Pediatri c.4. Kefarmasian untuk Penyakit Malaria c.5. Farmasi di Rumah Sakit	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	d. Penggunaan Obat Rasional d.1. Obat Rasiona d.2. Informasi Obat d.3. Kefarmasian untuk Terapi Antibiotik d.4. Pemantauan Terapi Obat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	4. Produksi dan Distribusi Kefarmasian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	a. Obat Tradisional a.1. Farmakope Indonesia a.2. Farmakope Herbal Indonesia a.3. Suplemen I Farmakope Indonesia a.4. Suplemen II Farmakope Indonesia a.5. Suplemen II Farmakope Indonesia a.6. Suplemen I Farmakope Herbal Indonesia a.7. Suplemen II Farmakope Herbal Indonesia a.8. Suplemen III Farmakope Herbal Indonesia a.9. Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) a.10. Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	a.11. Usaha Jamu Gendong (UJG) a.12. Usaha Jamu Racik (UJR) a.13. Farmakope Herbal Indonesia & Suplemennya Versi Bahasa Inggris					
	b. Kosmetik dan Makanan b.1. Keamanan Pangan b.2. Kosmetika bagi Petugas b.3. Industri Rumah Tangga bagi Petugas b.4. Makanan Jajanan Anak Sekolah b.5. Kodeks Kosmetika Indonesia b.6. Materia Kosmetika Bahan Alam Indonesia	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi dan Sediaan Farmasi Khusus c.1. Narkotika dan Psikotropika c.2. Prekursor Farmasi c.3. Sediaan Farmasi Khusus c.4. Persetujuan Impor dan Ekspor c.5. Pelaksanaan Perizinan Import dan Eksport Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	d. Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat Indonesian Pharmaceutical Industry Directory	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
F.	Surat Keterangan, Sertifikasi Dan Perijinan					
	1. Surat Keterangan a. Surat Keterangan Special Acces Scheme (SAS) b. Surat Keterangan Alat Kesehatan c. Sertifikasi Produksi PKRT d. Surat Keterangan PKRT	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Sertifikasi dan Perijinan a. Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan b. Sertifikasi Sarana Distribusi Alat Kesehatan c. Perijinan Dan Pengawasan Alat Kesehatan d. Perijinan Penyalur Alat Kesehatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
G.	Penanggulangan Krisis Kesehatan					
	1. Pencegahan, Mitigasi,Kesiapsiagaan a. Pencegahan dan Mitigasi b. Kesiapsiagaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Tanggap Darurat dan Pemulihan a. Tanggap Darurat b. Pemulihan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Pemantauan dan Informasi a. Pemantauan b. Informasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	4. Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	5. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
H.	Pengembangan Dan Jaminan Kesehatan					
	1. Tersedianya data NHA Setiap Tahun					
	2. Tersedianya dokumen Teknis Penguatan Pelaksanaan JKN					
I.	Inteligensia Kesehatan					
	1. Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Inteligensia Kesehatan a. Inteligensia Anak b. Inteligensia Remaja, Dewasa, dan Lanjut Usia 2. Penanggulangan Masalah Inteligensia Kesehatan	Terbatas Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum Penentu kebijakan, pengawas internal	Tertutup Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat	Unit pengolah terkait Unit pengolah

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	a. Inteligensia Akibat Gangguan Bawaan b. Inteligensia Akibat Gangguan Degeneratif dan Sistem Persyarafan		dan eksternal serta penegak hukum		mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	terkait
J.	Kesehatan Haji					
	1. Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji a. Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji b. Pelayanan Kesehatan jamaah Haji kab/kota c. Rekruitmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) d. Rekruitmen Tenaga Musiman	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji a. Advokasi dan Kemitraan Pembinaan Kesehatan Haji b. Kesehatan Haji di Kab/kota c. Kesehatan Haji Terpadu d. Pemeriksaan Jasa Boga Catering Jemaah Haji	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
K.	Promosi Kesehatan					
	1. Sarana Promosi Kesehatan a. Booklet b. Poster c. Leaflet d. Pamflet e. Lembar Balik f. Selebaran g. Buletin h. Festival i. Lomba j. Pameran k. Seminar l. Iklan Layanan Masyarakat m. Film n. Radio Spot	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2. Pembinaan Advokasi dan Kemitraan serta Pemberdayaan Peran a. Saka Bhakti Husada b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga c. Lembaga Sosial/Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Kesehatan d. Kawasan Tanpa Rokok	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	e. Kerjasama dengan Swasta dibidang Kesehatan f. Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan g. Koordinasi Lintas Program/Lintas Sektor di Bidang Kesehatan h. Peran Serta	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan a. Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan b. Kampanye Promosi Kesehatan c. Video Animasi Promosi Kesehatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	4. Hari Kesehatan a. Hari Kesehatan Nasional b. Hari Kesehatan Dunia c. Hari tanpa Tembakau se-Dunia d. Hari-hari Besar Kesehatan	Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh pihak tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
L.	Data Dan Informasi					
	1. Statistik Kesehatan a. Statistik Derajat dan Upaya Kesehatan b. Statistik Lingkungan dan Sumber Daya Kesehatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Analisis dan Diseminasi Informasi a. Analisis Data Kesehatan b. Diseminasi Informasi Kesehatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	3. Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data Kesehatan a. Pengembangan Sistem Informasi b. Bank Data	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
XIX	URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
1.	KEBIJAKAN Kebijakan Bidang Pendidikan dan Pelatihan yang terdiri dari Pengkajian dan pengusulan kebijakan, Penyiapan Kebijakan, Perumusan Kebijakan, dan Masukan dan Dukungan Kebijakan.	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	a. Penyiapan Kebijakan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	b. Perumusan Kebijakan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	c. Masukan dan Dukungan Kebijakan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
2.	PENGEMBANGAN PROGRAM DAN PEMBINAAN DIKLAT					
	a. Seleksi dan Pengembangan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	b. Sertifikasi	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	c. Monitoring dan Evaluasi	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	d. Penilaian	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	e. Konsultasi, advokasi dan asistensi	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	f. Sistem Informasi	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
3.	PENYELENGGARAAN DIKLAT					
	a. Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	b. Penyelenggaraan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	c. Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	d. Sistem Informasi Diklat	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
4.	Monitoring Dan Evaluasi					
	a. Penyelenggara	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	b. Pasca diklat	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	c. Data lemabaga diklat	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
5.	Alumni	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
XX	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
1.	Kebijakan Kebijakan Pemuda dan Olah Raga meliputi kebijakan dibidang Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan pemuda, Pembudayaan Olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga, dan Harmonisasi dan Kemitraan	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Unit pengolah terkait
	1. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Penyiapan Bahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Perumusan Kebijakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	4. Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Penetapan Berbentuk NSPK	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
2.	Pemberdayaan Pemuda					
	A. Peningkatan Tenaga Dan Sumber Daya Pemuda					
	1. Penelusuran (Duta kepemudaan) a. Potensi Lokal (Provinsi) b. Potensi Nasional c. Potensi Internasional	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2. Pengkajian (rekomendasi kepemudaan melalui forum kepemudaan) a. Potensi Lokal (Provinsi) b. Potensi Nasional c. Potensi Internasional	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Pengembangan a. Potensi Nasional b. Potensi Internasional (pertukaran pemuda)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	B. Peningkatan Wawasan Pemuda					
	1. Wawasan kebangsaan a. Program b. Evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Wawasan Lingkungan a. Program b. Evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Wawasan Sosial dan Hukum a. Program b. Evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	C. Peningkatan Kapasitas Pemuda					
	1. Kapasitas iman dan taqwa e. Program 8. Evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Kapasitas Iptek a. Program b. Evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	3. Pemanfaatan Iptek a. Program b. Evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	D. Peningkatan Kreativitas Pemuda					
	1. Pengkajian 1. Program 2. Evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Pengembangan a. Program b. Evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Pendayagunaan (fasilitasi) a. Program b. Evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
3.	Pengembangan Pemuda					
	A. Kepemimpinan Dan Kepeloporan Pemuda					
	1. Kepemimpinan : Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan a. Program b. Evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Kepeloporan pemuda : Kesukarelawanan, pengembangan kepedulian, pendampingan a. Program b. Evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	B. Kewirausahaan					
	1. Kelembagaan a. Program b. Evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Pengaderan a. Program b. Evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Perintisan a. Program b. Evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	C. Organisasi Kepemudaan Dan Pengawas Kepramukaan					
	1. Organisasi Kepemudaan					
	a. Pemberdayaan organisasi kepemudaan : kelembagaan dan sumberdaya - Program - Evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Pemberdayaan organisasi kepemahasiswaan: kelembagaan dan sumberdaya - Program - Evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Pemberdayaan organisasi kepelajaran : kelembagaan dan sumberdaya - Program - Evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Pengawasan kepramukaan : Kelembagaan, Program dan Sumberdaya a. Pengkajian b. Pengembangan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	D. Standarisasi Dan Infrastruktur					
	1. Standarisasi a. Organisasi kepemudaan b. Prasarana dan sarana kepemudaan c. Infrastruktur	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Infrastuktur pemuda a. Prasarana kepemudaan b. Sarana kepemudaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	E. Kemitraan Dan Penghargaan Pemuda					
	1. Kemitraan a. Lintas sektoral b. Daerah c. Luar negeri	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Penghargaan Pemuda a. Pengembangan Penghargaan Kepemudaan b. Pengembangan Promosi Kepemudaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
4.	Pembudayaan Olahraga					
	A. Pengelolaan Olahraga Pendidikan					
	1. Olahraga pendidikan dasar dan menengah a. Pengembangan b. Evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Olahraga pendidikan tinggi a. Pengembangan b. Evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Olahraga pendidikan nonformal dan informal a. Pengembangan b. Evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	B. Pengelolaan Olahraga Rekreasi					
	1. Olahraga massal a. Pengembangan b. Evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Olahraga tradisional a. Pengembangan b. Evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Olahraga petualangan,tantangan dan wisata a. Pengembangan b. Evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	C. Pengelolaan Pembinaan Sentra Dan Sekolah Khusus Olahraga					
	1. Sentra olahraga					
	a. Olahraga pendidikan - Pengembangan - Evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Olahraga rekreasi - Pengembangan - Evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Olahraga prestasi - Pengembangan - Evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	D. Pengembangan Olahraga Tradisional Dan Layanan Khusus					
	1. Olahraga tradisional a. Lokal b. Nasional	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Layanan khusus a. Olahraga usia dini dan lansia b. Olahraga penyandang cacat	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	E. Kemitraan Dan Penghargaan Olahraga					
	1. Kemitraan keolahragaan a. Lintas sektoral b. Daerah c. Luar Negeri	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Penghargaan olahraga a. Penelusuran b. Penyelenggaraan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
5.	Peningkatan Prestasi Olahraga					
	A. Pembibitan Dan Iptek Olahraga					
	1. Pembibitan olahraga a. Pemandu bakat - Penelusuran bakat - Penelaahan bakat b. Pengembangan olahragawan berbakat - Program - Evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Kompetisi - Daerah - Nasional	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Iptek olahraga a. Penerapan - Identifikasi dan kajian - Pendayagunaan - Evaluasi dan diseminasi b. Pengembangan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	B. Peningkatan Tenaga Dan Organisasi Keolahragaan					
	1. Tenaga keolahragaan a. Pengembangan pelatih dan instruktur - Daerah - Nasional b. Pengembangan wasit dan juri - Daerah - Nasional	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	c. Pengembangan tenaga pendidik dan pendukung					
	2. Organisasi keolahragaan a. Pendidikan dan rekreasi b. Olahraga prestasi - Kelembagaan - Sumberdaya c. Olahraga fungsional dan profesional	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	C. Industri Dan Promosi Olahraga					
	1. Industri olahraga a. Jasa olahraga b. Produk olahraga c. Manajemen industri olahraga	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Promosi olahraga 1. Penelusuran 2. Penyelenggaraan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	D. Olahraga Prestasi					
	1. Daerah a. Pengembangan b. Pekan dan kejuaraan olahraga	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Nasional a. Pengembangan b. Pekan dan kejuaraan olahraga	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	E. Standarisasi Dan Infrastruktur Olahraga					
	1. Standarisasi dan infrastruktur a. Olahraga prestasi b. Olahraga pendidikan dan rekreasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Akreditasi dan sertifikasi keolahragaan a. Olahraga prestasi b. Olahraga pendidikan dan rekreasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	3. Infrastruktur olahraga a. Prasarana dan sarana olahraga pendidikan b. Prasarana dan sarana olahraga rekreasi c. Prasarana dan sarana olahraga prestasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
XXI	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (ATR)					
	1. Bangunan : - Pendirian - Pemeliharaan - Pembahasan dan penertiban bangunan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	2. Tata Kota : - RIK (Rencana Induk Kota) - Rencana detail tata ruang kota - Rencana terinci kota	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Peta tanah bangunan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	4. Gambar Konstruksi (blue print)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	5. Data industri konstruksi bangunan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	6. Studi kelayakan : Studi pendahuluan, studi pra kelayakan dan analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	7. Standarisasi, kriteria tekhnis, spesifikasi, manual tekhnis dan prosedur	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	8. Pelaksanaan bidang PU 1) Pemberian izin bidang PU meliputi : Izin mendirikan bangunan (1MB), surat izin Pemborong Pembangunan (SIPP), penggunaan pembangunan, pembuatan panggul/ pembuatan panggul tambak pada pinggiran sungai, mendirikan bangunan diatas sungai, pengambilan dan pembangunan air, diatas sungai, pengambilan dan pembuangan air, pembangunan air minum, sumur bor/arteis, proyek, pemanfaatan tanah bantaran, pemanfaatan danpenggunaan jalan dan sejenisnya termasuk persyaratannya serta tata lingkungan. 2) Permohonan perizinan yang ditolak 3) Keringanan pemberian izin meliputi : permohonan pembebasan atas pemberian keringanan 4) Pembatalan izin meliputi : Pengaduan, hasil pemeriksaan/penijauan, pembebasan, pembatalan dan pelaksanaan bongkaran	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	9. Kontraktor dan pemborong (tender, penunjukan,prakualifikasi) - Daftar rekanan meliputi : Daftar rekanan golongan ekonomi lemah, daftar rekanan - Permohonan prakualifikasi dan klasifikasi perusahaan meliputi: Permohonan, - Kasus-kasus dalam pelaksanaan prakualifikasi perusahaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	10. Konsultasi bangunan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	11. Penertiban bangunan meliputi : Penertiban tanpa izin/tidak memenuhi sayat/ketentuan yang berlaku, bangunan yang sudah membahayakan/lapuk, peringatan/ teguran, penyegelan, pengosongan dan pelaksanaanya, kasus-kasus bangunan pengairan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengaturan lalu lintas air.	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	12. Inventarisasi bangunan kepunyaan dan atau yang dikuasai oleh pemerintah termasuk bukti kepemilikan dan cara perolehanya	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	13. Peta bangunan 1) Pembuatan, peta, blue print, pemeliharaan, perbaikan, peningkatan, bangunan pengairan meliputi: waduk, bendungan, bangunan pembagi, saluran dan tanggul 2) Pembuatan, pemeliharaan dan rehabilitasi saluran pembangunan air kotor dan limbah 3) Inventarisasi bangunan-bangunan pengairan Inventarisasi sungai dan mata air termasuk bukti-bukti kepemilikan. 4) Pemeliharaan dan pengelolaan pengairan oleh perkumpulan petani pemakai air (P3A) Meliputi : pengumpulan dana pemeliharaan, petunjuk tekhnis, pembinaan dan laporan 5) Laporan mengenai kerusakan bangunan pengairan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	14. Lingkungan hidup 1) Pembinaan dan penyuluhan lingkungan hidup 2) pengawasan dan pengendalian tata lingkungan hidup 3) pelestarian lingkungan hidup, cagar budaya, taman nasional, flora dan fauna 4) Pencemaran dan penanggulangan pencemaran lingkungan 5) Penghargaan bidang lingkungan hidup	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	6) Pemberian ijin berburu satwa, ijin galian golongan C dan ijin usaha tambang 7) Pembinaan dan penyuluhan lingkungan hidup.	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	15. Pelaksanaan dan pengawasan / pengendalian tata lingkungan hidup meliputi : d. Wilayah lingkungan hidup lingkungan industri,rekreasi, pertamanan, kawasan, lingkungan termasuk penertiban kasus e. Pelestarian lingkungan meliputi antara lain : Penetapan sebagai cagar budaya, taman nasional, flora dan fauna	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	16. Pencemaran lingkungan dan penanggulangannya meliputi : a. Pencemaran udara, limbah industri dan kebisingan b. Pemberian penghargaan kepada masyarakat dalam pemeliharaan c. Pelestarian lingkugan hidup	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	17. Pemberian ijin meliputi : a. Ijin berburu satwa yang dilindungi, ijin bahan galian golongan C. b. Data dan statistik lingkungan hidup daerah. c. Hasil-hasil seminar, simposium,lokakarya dan sejenisnya mengenai masalah lingkungan hidup.	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	d. Pengawasan di bidang lingkungan hidup e. Neraca Kependudukan dan Lingkungan hidup Daerah (NKLD)					
	18. Amdal meliputi : a. Kebijakan Teknis Amdal b. Pengkajian dan Penilaian Dokumen Amdal c. Evaluasi dan RKL dan RPL d. Penghargaan Adipura	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
XXII	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT					
	1. Standar kebijakan umum bidang PU : Pengairan, jalan, jembatan, bangunan dan tata kota	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Unit pengolah terkait
	2. Pengairan : - Pembangunan baru - Rehabilitasi - Pemeliharaan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Jalan : - Pembangunan baru - Rehabilitasi - Pemeliharaan - Peningkatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	4. Jembatan : - Pembangunan baru - Rehabilitasi - Pemeliharaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	5. Bangunan : - Pendirian - Pemeliharaan - Pembahasan dan penertiban bangunan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	6. Tata Kota : - RIK (Rencana Induk Kota) - Rencana detail tata ruang kota - Rencana terinci kota	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	7. Peta tanah bangunan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	8. Gambar Konstruksi (blue print)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	9. Data industri konstruksi bangunan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	10. Studi kelayakan : Studi pendahuluan, studi pra kelayakan dan analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL)	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	11. Standarisasi, kriteria tekhnis, spesifikasi, manual tekhnis dan prosedur	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	12. Pelaksanaan bidang PU 1) Pemberian izin bidang PU meliputi : Izin mendirikan bangunan (IMB), surat izin 2) Permohonan perizinan yang ditolak 3) Keringanan pemberian izin meliputi : permohonan pembebasan atas pemberian keringanan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	4) Pembatalan izin meliputi : Pengaduan, hasil pemeriksaan/penijauan, pembebasan, pembatalan dan pelaksanaan					
	13. Kontraktor dan pemborong (tender, penunjukan, prakualifikasi) - Daftar rekanan meliputi : Daftar rekanan golongan ekonomi lemah, daftar rekanan - Permohonan prakualifikasi dan klasifikasi perusahaan meliputi : Permohonan, - Kasus-kasus dalam pelaksanaan prakualifikasi perusahaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	14. Konsultasi bangunan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	15. Penertiban bangunan meliputi : Penertiban tanpa izin/tidak memenuhi sayat/ketentuan yang berlaku, bangunan yang sudah membahayakan/lapuk, peringatan/ teguran, penyegelan, pengosongan dan pelaksanaanya, kasus-kasus bangunan pengairan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengaturan lalu lintas air.	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	16. Inventarisasi bangunan kepunyaan dan atau yang dikuasai oleh pemerintah termasuk bukti kepemilikan dan cara perolehanya	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	17. Peta bangunan 1) Pembuatan, peta, blue print, pemeliharaan, perbaikan,peningkatan, bangunan pengairan 2) Pembuatan, pemeliharaan dan rehabilitasi saluran pembangunan air kotor dan limbah 3) Inventarisasi bangunan-bangunan pengairan Inventarisasi sungai dan mata air termasuk	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	4) Pemeliharaan dan pengelolaan pengairan oleh perkumpulan petani pemakai air (P3A) Meliputi : pengumpulan dana pemeliharaan, petunjuk tekhnis, pembinaan dan laporan 5) Laporan mengenai kerusakan bangunan pengairan					
	18. Pengelolaan air minum 1) penyediaan fasilitas air bersih 2) distribusi pemakaian air bersih 3) pengawasan penggunaan air besih 4) data dan statisktik air bersih	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	19. Pengelolaan Jalan 1) Pemeliharaan dan perbaikan jalan 2) Penyediaan lokasi/area jalan 3) pelebaran dan pemindahan jalan 4) inventarisasi jalan 5) data lalu lintas dan penggunaan jalan 6) laporan penelitian jalan 7) laporan kerusakan jalan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
XXIII	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
	A. KEBIJAKAN Kebijakan dan Standardisasi Teknis di Bidang Politik Dalam Negeri, Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah, Bina Pembangunan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Keuangan Daerah.	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	1. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	2. Penyiapan Kebijakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	3. Perumusan Kebijakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	4. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	5. MOU	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	B. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan					
	a. Ketahanan Ideologi Negara 1) Penguatan Ideologi Negara 2) Implementasi Ideologi Negara	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	b. Wawasan Kebangsaan 1) Penguatan Kebangsaan 2) Produksi Bibit Aneka Ternak 3) Implementasi	Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh pihak tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	c. Bela Negara 1) Pendidikan Bela Negara 2) Pemberdayaan Bela Negara	Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh pihak tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	d. Nilai-Nilai Sejarah Kebangsaan 1) Penguatan Nilai-Nilai Sejarah 2) Implementasi Nilai-Nilai Sejarah 3) Penerbitan Rekomendasi Penelitian	Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh pihak tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	e. Pembauran dan Kewarganegaraan 1) Pembinaan Pembauran Kebangsaan 2) Pembinaan Kewarganegaraan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	2. Kewaspadaan Nasional					
	a. Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit Pengolah Terkait
	b. Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit Pengolah Terkait
	c. Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	d. Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial 1) Pedoman Kewaspadaan Nasional	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit Pengolah Terkait
	e. Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing 1) Pelaksanaan pengawasan kegiatan orang asing dan lembaga asing 2) Suratpemberitahuan penelitian orang asing	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit Pengolah Terkait
	3. Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan					
	a. Ketahanan Seni 1) Fasilitasi pelaksanaan pelestarian kesenian 2) Pelaksanaan dan perkembangan nilai-nilai kesenian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Ketahanan Budaya 1) Fasilitasi pelaksanaan pelestarian budaya 2) Pelaksanaan dan perkembangan nilai-nilai kebudayaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Agama dan Kepercayaan 1) Fasilitasi 2) Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi/ Kabupaten/Kota 3) Pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan 4) Pelestarian nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	d. Organisasi Kemasyarakatan 1) Pelaksanaan identifikasi dan kompilasi organisasi masyarakat a) Pendaftaran ormas b) Database ormas 2) Laporan hasil kerjasama kegiatan dengan Ormas/LNL 3) Evaluasi aktifitas Ormas : sanksi administrasi 4) Fasilitasi sengketa Ormas 5) Fasilitasi Ormas	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	e. Masalah Sosial Kemasyarakatan 1) Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika 2) Masalah sosial kemasyarakatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	4. Politik Dalam Negeri					
	a. Implementasi Kebijakan Politik 1) Implementasi Kebijakan Politik a) Sosialisasi dan publikasi best practice dan inovasi 2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan 1) Evaluasi Kelembagaan Politik Pemerintahan di Pusat a) Pendampingan kunjungan kerja DPR RI 2) Evaluasi Kelembagaan Politik Pemerintahan di Daerah a) Orientasi Anggota DPRD Provinsi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Fasilitasi Kelembagaan Partai Politiik 1) Verifikasi dan evaluasi partai politik yang memperoleh kursi 2) Partai Politik yang tidak memperoleh kursi 3) Pemerintah Daerah 4) Database Parpol	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	d. Pendidikan Budaya Politik 1) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik 2) Penyelenggaraan pendidikan budaya politik 3) Modul sebagai sarana penyelenggaraan pendidikan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	5. Ketahanan Ekonomi					
	a. Ketahanan Sumber Daya Alam dan Kesenjangan Perekonomian 1) Fasilitasi ketahanan di bidang sumber daya alam a) Sosialisasi dan publikasi best practice dan inovasi 2) Penanganan kesenjangan ekonomi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter 1) Failitasi identifikasi ketahanan di bidang perdagangan, investasi fiskal dan moneter 2) Penyiapan Bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi monitoring dan evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Perilaku Perekonomian Masyarakat 1) Pembinaan organisasi kemasyarakatan perekonomian 2) Evaluasi cinta produk dalam negeri dan perlindungan konsumen	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	d. Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi 1) Evaluasi pelaksanaan hubungan kerjasama penanganan kejahatan lembaga perekonomian 2) Evaluasi pelaksanaan koordinasi kebijakan lembaga perekonomian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	C. PEMERINTAHAN UMUM					
	1. Dekonsentrasi dan Kerjasama					
	a. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi tugas Kepala Daerah sebagai Wakil Pemerintah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan evaluasi Kerjasama Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	d. Fasilitasi Kecamatan 1) Fasilitasi (database pembentukan Kecamatan) 2) Koordinasi 3) Pembinaan dan pengawasan 4) Monitoring dan evaluasi (evaluasi kinerja kecamatan)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	e. Fasilitasi Pelayanan Umum 1) Fasilitasi pelayanan administrasi Kecamatan 2) Koordinasi pelayanan administrasi Kecamatan 3) Pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi Kecamatan 4) Monitoring dan evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	2. Wilayah Administrasi dan Perbatasan					
	a. Toponimi dan Data Wilayah 1) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan toponimi	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara,	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembakuan nama rupabumi unsur alami dan unsur buatan 3) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemindahan ibu kota daerah dan pemindahan pusat pemerintahan daerah 4) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi kode dan data wilayah administrasi pemerintahan 5) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penghitungan luas wilayah 6) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pengembangan sarana dan prasarana pelayanan umum pemerintahan di wilayah perbatasan negara 7) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penguatan kelembagaan di daerah dan kerjasama internasional antar perbatasan				sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	
	b. Batas Antar Daerah Wilayah 1) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penetapan batas antar daerah 2) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelesaian sengketa batas antar daerah	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	3. Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat					
	a. Tata Operasional dan Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja 1) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata operasional polisi pamong praja 2) standardisasi sarana prasarana polisi pamong praja a) fasilitasi (data pengajuan DAK) b) koordinasi c) pembinaan dan pengawasan d) monitoring dan evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja 1) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyusunan program peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja 2) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pengembangan dan evaluasi peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Perlindungan Masyarakat 1) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan masyarakat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	2) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan aparatur dan kelembagaan perlindungan masyarakat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil 1) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan operasional penyidik pegawai negeri sipil 2) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan dan evaluasi administrasi aparatur penyidik pegawai negeri sipil	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	e. Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia 1) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan supervisi hak asasi manusia 2) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi konvensi internasional	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	D. OTONOMI DAERAH					
	1. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah					
	a. Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi 1) Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah 2) Penyusunan standar pelayanan minimal	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	2. Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	3. Fasilitasi, Monitoring, dan EvaluasiKepala Daerah, DPRD, dan Hubungan					
	a. Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	b. Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Penyiapan perumusan kebijakan pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di bidang Pemerintahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	d. Hubungan antar lembaga daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	e. Asosiasi Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	4. Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi					
	a. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Pengembangan Kapasitas Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	E. BINA PEMBANGUNAN DAERAH					
	1. Perencanaan Pembangunan Daerah / Per Wilayah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	2. Pengembangan Wilayah					
	a. Penyusunan pedoman penyerasian pengembangan wilayah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Penyusunan dan pemutakhiran basis data dan informasi pengembangan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Penyusunan dan laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	d. Kawasan Strategis dan Andalan 1) Evaluasi pengembangan data 2) Pengembangan kawasan strategis dan andalan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	e. Wilayah Tertinggal 1) Penyusunan data dan pemutakhiran basis dan data informasi pengembangan 2) Penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	f. Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-Pullau Kecil 1) Penyusunan masterplan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan 2) Penyusunan dan pemutakhiran basis data dan informas pengembangan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	3. Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup					
	a. Evaluasi perencanaan, pemanfaatan tata ruang wilayah 1) Evaluasi perencanaan, pemanfaatan tata ruang wilayah 2) Evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian tata ruang wilayah 3) Implementasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Penataan Ruang Kawasan 1) Evaluasi tata ruang 2) Pembinaan tata ruang kawasan 3) Implementasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Konservasi dan Rehabilitasi 1) Evaluasi pelaksanaan konservasi 2) Evaluasi pelaksanaan rehabilitasi 3) Implementasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	d. Perencanaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air 1) Evaluasi pengembangan potensi sumber daya air 2) Evaluasi pemanfaatan sumber daya air 3) Implementasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	e. Pengendalian Lingkungan Hidup 1) Pengembangan instrumen kelembagaan lingkungan hidup 2) Analisis dan audit pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	4. Pengembangan Ekonomi Daerah					
	a. Pengembangan potensi Ekonomi Daerah 1) Identifikasi produk unggulan dan analisis potensi ekonomi daerah 2) Pengembangan produk unggulan dan pemanfaatan potensi ekonomi daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	b. Promosi dan Investasi Daerah 1) Pelaksanaan promosi ekonomi daerah 2) Pelaksanaan investasi daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah 1) Pelaksanaan pengembangan perdagangan daerah 2) Pelaksanaan perindustrian daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	d. Kemitraan Usaha 1) Perencanaan dan pengembangan kemitraan usaha ekonomi daerah 2) Pengelolaan kemitraan usaha ekonomi daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	e. Kelembagaan Ekonomi Daerah 1) Pelaksanaan pengembangan kelembagaan ekonomi daerah 2) Penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	5. Penataan Perkotaan					
	a. Perencanaan Pengendaliajn Perkotaan 1) Evaluasi perencanaan perkotaan 2) Pengendalian penataan perkotaan 3) Fasilitasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Penataan Kota Besar dan Metropolitan, Kota Menengah, dan Kota Kecil 1) Pengendalian pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana perkotaan 2) Pengendalaian Pelaksanaan Pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan Perkotaan 3) Fasilitasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Kerjasama Perkotaan 1) Pengendalian kerjasama perkotaan antar negara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2) Pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan Perkotaan 3) Fasilitasi					
	F. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					
	1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan					
	a. Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan 1) Pelaksanaan Pengembangan Desa 2) Pelaksanaan Pengembangan Kelurahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 1) Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa 2) Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Fasilitasi Permusyawaratan Desa 1) Pelaksanaan Penataan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa 2) Pelaksanaan Penataan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	d. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa 1) Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa 2) Pelaksanaan Pengelolaan Aset Desa	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	e. Pengembangan Kapasitas Desa 1) Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, dan 2) Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2. Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat					
	a. Lembaga Masyarakat 1) Pembinaan Penataan Lembaga Masyarakat di Desa 2) Pelaksanaan Kerjasama Lembaga Masyarakat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Pembangunan Partisipatif 1) Pelaksanaan Pengembangan Metode Pembangunan Partisipatif 2) Pelaporan Kinerja Pembangunan Desa	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Pendataan Potensi Masyarakat 1) Inventarisasi Potensi Masyarakat a) Profil desa 2) Evaluasi Perkembangan Masyarakat Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa a) Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa b) Pelaksanaan Pengelolaan Aset Desa	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	d. Pengembangan Kawasan Pedesaan 1) Pelaksanaan Identifikasi dan Analisa Penataan Ruang Kawasan 2) Pelaksanaan Penataan Pengembangan Terpadu Kawasan Pedesaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	e. Pelatihan Masyarakat 1) Pelaksanaan Penyusunan dan Pengembangan a) Grand design pelatihan masyarakat b) Pedoman pelatihan masyarakat c) Fasilitasi d) Monitoring dan evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2) Evaluasi Pelatihan Masyarakat a) penyelenggaraan pelatihan monitoring dan evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	3. Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat					
	a. Budaya Nusantara 1) Pelaksanan Pemberdayaan Masyarakat 2) Pelaksanaan Kerjasama Adat Istiadat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Pemberdayaan Perempuan 1) Pelaksanaan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan 2) Pembinaan, Perlindungan hak-hak perempuan dan ketidak setaraan gender	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 1) Pelaksanaan Pemberdayaan Keluarga 2) Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	d. Kesejahteraan Sosial 1) Pelaksanaan Peningkatan Kesejahteraan Sosial 2) Pelaksanaan Penanganan Masalah Sosial	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	e. Tenaga Kerja Pedesaan 1) Fasilitasi dan Evaluasi Pembinaan dan Pembinaan Tenaga Kerja 2) Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	4. Usaha Ekonomi Masyarakat					
	a. Usaha Pertanian dan Pangan 1) Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pertanian, Agribisnis dan Lumbung Pangan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	a) Identifikasi data pertanian b) Fasilitasi c) Monitoring dan evaluasi				lembaga pemerintahan.	
	b. Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam 1) Pelaksanaan Peningkatan Kerjasama dan Permodalan Usaha Perkredritan dan Simpan Pinjam a) inventarisasi lembaga keuangan mikro yang belum berbadan hokum b) inventarisasi dan pemetaan potensi desa c) inventarisasi badan usaha milik desa d) usaha ekonomi desa simpan pinjam e) fasilitasi pembinaan, pendampingan dan pengawasan f) monitoring dan evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Produksi dan Pemasaran 1) Pelaksanaan pengembangan informasi pasar a) identifikasi produk unggulan pedesaan b) Fasilitasi c) monitoring dan evaluasi 2) Pelaksanaan Difersifikasi Pasar a) fasilitasi pengelolaan pasar desa b) fasilitasi sarana dan prasarana desa c) sistem penilaian kinerja pasar desa/lomba pasar desa d) monitoring dan evaluasi desa e) data pasar desa	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	d. Usaha Ekonomi dan Keluarga 1) Pelaksanaan peningkatan kewirausahaan dan perkoperasian a) fasilitasi pengembanganusaha ekonomi keluarga b) monitoring dan evaluasi 2) Pelaksanaan Pengembangan Usaha Jasa dan Industri Kecil a) penyusunan modul b) fasilitasi c) monitoring dan evaluasi.	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	e. Ekonomi Pedesaan dan Masyarakat Tertinggal 1) Ekonomi Pedesaan a) identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi b) fasilitasi pengembangan usaha ekonomi pedesaan c) monitoring dan evaluasi 2) Masyarakat Tertinggal a) identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal b) fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal c) monitoring dan evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	5. Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Pedesaan					
	a. Fasilitasi Konservasid dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan 1) Pembinaan pengelolaan konservasi kawasan 2) Pelaksanaan Rehabilitasi lingkungan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Pedesaan 1) Pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya lahan pedesaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2) Pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya pesisir pedesaan					
	c. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pedesaan 1) Pembinaan pengelolaan prasarana air dan sanitasi lingkungan 2) Pembinaan pengelolaan prasarana dan sarana pemukiman	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	d. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi pedesaan 1) Pelaksanaan pemetaan kebutuhan teknologi pedesaan 2) Pelaksanaan pengkajian pemanfaatan teknologi pedesaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	e. Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan 1) Pelaksanaan pemasyarakatan teknologi pedesaan 2) Pelaksanaan kerjasama pengelolaan teknologi pedesaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	G. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
	1. Pendaftaran Penduduk					
	a. Identitas Penduduk 1) Fasilitasi pelaksanaan pelayanan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk 2) Penyiapan pemberian nomor kendali kartu keluarga dan kartu tanda penduduk 3) Fasilitasi pencetakan dan distribusi blanko dokumen kependudukan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah NKRI 1) Fasilitasi pelaksanaan pindah datang penduduk WNI	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2) Fasilitasi pelaksanaan pindah datang penduduk orang asing 3) Fasilitasi pelaksanaan perubahan alamat					
	c. Pindah Datang Penduduk Antar Negara 1) Fasilitasi Pelalsanaan Pendaftaran Perpindahan Penduduk Indonesia ke Luar Negeri dan WNI dari Luar Negeri 2) Fasilitasi Pelaksanaan Perubahan Alamat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	d. Pendataan Penduduk Rentan 1) Fasilitasi Pelaksanaan Pendataan Penduduk Korban Bencana 2) Fasilitasi Pelaksanaan Pendataan Penduduk Daerah Terbelakang 3) Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	e. Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi 1) Monitoring Pelaksanaan Program Pendaftaran Pendudukan 2) Evaluasi Pelaksanaan Program Pendaftaran Penduduk 3) Pelaksanaan Dokumentasi Kebijakan Pendaftaran Penduduk	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	2. Pencatatan Sipil					
	1) Kelahiran dan Kematian 1) Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Kelahiran 2) Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Kematian 3) Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian 4) Pelaksanaan Hubungan Antar Lembaga Dalam Rangka Pencatatan Kelahiran dan Kematian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	b. Perkawinan dan Perceraian 1) Fasilitasim Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian Agama Islam 2) Fasilitasim Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian Agama Non Islam 3) Pencatatan Perkawinan dan Perceraian 4) Pelaksanaan Hubungan Antar Lembaga Dalam Rangka Pencatatan Perkawinan dan Perceraian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Pengangangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta 1) Pelayanan Perubahan dan Pembatalan Akta 2) Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta 3) Pelaksanaan Hubungan Antar Lembaga Dalam Rangka Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	d. Pencatatan Kewarganegaraan 1) Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Kewarganegaraan Akibat Kelahiran 2) Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Kewarganegaraan Akibat Non Kelahiran Kelahiran 3) Pelaksanaan Hubungan Antar Lembaga Dalam Rangka Pengangkatan Pelayanan Pencatatan Kewarganegaraan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	e. Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi 1) Penyusunan Program dan Kegiatan Direktorat Pencatatan Sipil 2) Monitoring Pelaksanaan Program Pencatatan Sipil	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	3) Evaluasi Pelaksanaan Pencatatan Sipil 4) Pelaksanaan Dokumentasi Kebijakan Pencatatan Sipil					
	3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					
	a. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 1) Perencanaan Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan 2) Pengembangan Aplikasi 3) Pengembangan Pemanfaatan Infrastruktur	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Kelembagan Informasi Administrasi Kependudukan 1) Pengembangan Sistem Kelembagaan 2) Pengembangan Sumber Daya Manusia 3) Kelembagaan Informasi Kependudukan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan 1) Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan 2) Pemeliharaan Database Administrasi Kependudukan 3) Pengembangan Database Administrasi Kependudukan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	d. Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan 1) Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan 2) Pelaksanaan Pelayanan Informasi Melalui Media Elektronik 3) Pelaksanaan Layanan Informasi Melalui Media Cetak	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	e. Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi 1) Pengembangan Materi Wawasan Kependudukan melalui jalur sekolah dan jalur luar sekolah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2) Kebijakan Kependudukan dan Pengembangan Wawasan Kependudukan 3) Pelaksanaan Hubungan Antar Lembaga Dalam Rangka Pengembangan Wawasan Kependudukan 4) Pelaksanaan Dokumentasi Pelayanan Informasi Kependudukan					
	4. Pengembangan Kebijakan Kependudukan					
	a. Kuantitas Penduduk 1) Pelaksanaan Penyusunan Analis Jumlah, Struktur dan Komposisi Penduduk 2) Pelaksanaan nalisis Pertumbuhan Penduduk 3) Kebijakan Kuantitas Penduduk	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Kualitas Penduduk 1) Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Penduduk usia anak, remaja dan pemuda 2) Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Penduduk usia produktif dan lanjut usia 3) Pelaksanaan Hubungan Antar Lembaga Dalam Rangka Kebijakan Kualitas Penduduk	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Mobilitas Penduduk 1) Pelaksanaan Penataan Persebaran Penduduk Antarwilayah 2) Pelaksanaan Penataan Urbanisasi dan Migrasi Non Permanen 3) Kebijakan Mobilitas Penduduk	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	d. Proyeksi Penduduk 1) Pelaksanaan Analisis Proyeksi Penduduk 2) Pelaksanaan Penyusunan Proyeksi Penduduk 3) Pelaksanaan Perumusan Implikasi Proyeksi Penduduk 4) Penyusunan Penetapan dan Perumusan Implikasi Proyeksi Penduduk	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	e. Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	H. KEUANGAN DAERAH					
	1. Anggaran Daerah					
	a. Anggaran Daerah Wilayah I, II, III, dan IV 1) Fasilitasi anggaran daerah antara laij : konsultasi, narasumber, bimbingan teknis 2) Evaluasi rancangan Perda, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan anggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten 3) Monitoring	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Dukungan Teknis Anggaran Daerah 1) Penyiapan bahaj perumusan sinkronisasi kebijakan anggaran daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2) Penyusunan tatalaksana anggaran daerah 3) Penyiapan dukunga teknis anggaran daerah 4) Penyiapan data, informasi dan penyusunan laporan keuangan daerah					
	2. Pendapatan dan Investasi Daerah					
	a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 1) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan standarisasi pajak daerah dan retribusi daerah 2) Penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah retribusi daerah 3) Penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah 4) Penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 1) Fasilitasi serta bimbinga teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan 2) Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang BUMD lembaga non keuangan 3) Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi BUMD	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	c. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 1) Analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang polla pengelolaan keuangan BLU Daerah 2) Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan BLU Daerah 3) Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan daerah BLU Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	d. Pengelolaan Kekayaan Daerah 1) Fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan 2) Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah 3) Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaankekayaan dan investasi daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	e. Pinjam dan Obligasi Daerah 1) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan atau BUMD 2) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah 3) Fasilitasi pelaksanaan kebijkan dana bergulir yang bersumber dari APBN	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	4) Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah 5) Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah					
	3. Fasilitasi Dana Perimbangan					
	a. Fasilitasi Dana Alokasi Umum 1) Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum 2) Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum 3) Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Fasilitasi Dana Alokasi Khusus 1) Koordinasi penyiapan data dasar 2) Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus 3) Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam 1) Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam 2) Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam 3) Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	d. Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya 1) Sosialisasi dan Supervisi dana otonomikhusus 2) Soaialisasi dan supervisi dan transfer lainnya 3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonoi khusus dan dana transfer lainnya	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	e. Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan 1) Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan 2) Penyiapan dukungah teknis dana perimbangan 3) Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	4. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah					
	a. Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 1) Fasilitasi serta bimbinhanteknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah 2) Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Pembinaan kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 1) Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah 2) Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Pembinaan dan Evaluasi pengelolaan Keuangan Daerah 1) Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah 2) Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	d. Kajian Kebijakan dan Bantuaj Keterangan Ahli	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	1) Penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah 2) Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah				lembaga pemerintahan.	
	e. Data Informasi dan Pengelolaan keuangan Daerah 1) Penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah 2) Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah 3) Pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	I. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN					
	1. Perlindungan Masyarakat					
	a. Tata Operasional dan Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja 1) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaantata operasional Polisi Pamomg Praja 2) Standarisasi sarana prasarana Polisi Pamong Praja a) Fasilitasi (data pengajuan DAK) b) koordinasi c) pembinaan dan pengawasa d) monitoring dan evaluasi e) laporan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	b. Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja 1) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyusunan program peningkatan kapasitas Aparatur Polisi Pamong Praja 2) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pengembangan dan evaluasi peningkatan kapasitas Aparatur Polisi Pamong Praja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Perlindungan Masyarakat 1) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan masyarakat 2) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan aparatur dan kelembagaan perlindungan masyarakat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil 1) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan operasional penyidik pegawai negeri sipil 2) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi administras aparatur penyidik pegawai negeri sipil	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	e. Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia 1) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan supervisi hak asasi manusia 2) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi konvensi internasional	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	2. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana					
	a. Identifikasi Potensi Bencana 1) Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan Bencana dan Mitigasi Bencana	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Organisasi Sistem dan Prosedur 1) Pengembangan Kerjasama Kelembagaan Serta Penanggulangan Bencana a) Fasilitasi (database daerah rawan bencana) b) Koordinasi c) Fasilitasi serta koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Sarana dan Prasarana 1) Evaluasi standardisasi aplikasi peralatan pemyelenggaraan penanggulangan bencana 2) Evaluasi pengembangan informasi dan teknologi penyelenggaraan penanggulangan bencana	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	d. Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran 1) Evaluasi pengembangan pemberdayaan masyarakat di bidang pencegahan kebakaran 2) Evaluasi peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	e. Keamanan 1) Pembinaan dan pengaturan mengenai larangan, pencegahan, dan penanggulangan gangguan / ancaman keamanan / ketertiban 2) Tata cara penanggulangan gangguan keamanan 3) Laporan mengenai situasi keamanan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	f. Ketertiban 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum 2) Operasi penanggulangan/pencegahan adanya gangguan/ancaman, ketentraman dan ketertiban umum 3) Tata cara tentang penyelenggaraan rapat umum, seminar, muktamar, dan kongres	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	3. Pertahanan Sipil a. Pengangkatan dan pemberhentian anggotan hansip dan linmas b. Pembinaan pengembangan potensi hansip / linmas	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	c. Bimbingan dan pengarahan tenaga hansip / linmas d. Laporan umum pelaksanaan tugas hansip / linmas e. Penghargaan terhadap anggota hansip / linmas					
	4. Kenakalan Remaja a. Pembinaan anak remaja b. Penanggulangan kenakalan remaja c. Laporan tentang penanggulangan kenakalan remaja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	5. Pornografi, Pornoaksi, dan Tuna Susila a. Pembinaan dan penyuluhan tentang pencegahan dan penanggulangan pornografi pornoaksi dan tuna susila b. Pencegahan dan penanggulangan pornografi pornoaksi dan tuna susila c. Laporan tentang Pencegahan dan penanggulangan pornografi pornoaksi dan tuna susila	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	6. Pemadam Kebakaran a. Penyusunan perencanaan kegiatan b. Pengumpulan, pengolahan, penganalisaa, dan penyajian data c. Penyusunan petunjuk teknis d. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan e. Pembinaan dan pengembangan partisipasi masyarakat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	f. Fasilitasi penanggulanganbencana g. Kerjasama dengan satuan kerja , unit kerja, dan instansi terkait h. 8. Pemantauan, pencegahan, dan penanggulangan bencana					
	J. PENDAPATAN DAERAH					
	1. Pendapatan					
	a. Pendapatan Asli Daerah 1) Surat Ketetapan Pajak Daerah 2) Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah antara lain : - Pajak kendaraan bermotor (PKB) - Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - Pajak Air Permukaan - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - Pajak Rokok	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Dokumen Penerimaan Dana Perimbangan : 1) Laporan Pembayaran Royalty dan iuran tetap dari : a) Izin Usaha Pertambangan (IUP) b) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan (PKP2B)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	c. Dokumen Penerimaan Lain-lain Perimbangan yang sah 1) Laporan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Jasa Raharja 2) Laporan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Dealer	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	K. SEKRETARIAT DPRD					
	1. Penyusunan rencana kerja tahunan 2. Data keanggotaan DPRD meliputi unsur pimpinan dewan, komisi dewan dan fraksi dewan 3. Data proses penggantian antar waktu anggota DPRD 4. Kumpulan produk - produk DPRD 5. Laporan - laporan insidentil 6. Laporan tahunan 7. Persidangan / Rapat (Paripurna / Pleno Komisi / Fraksi lainnya) 8. Kegiatan Badan Perlengkapan Dewan (seperti Badan Kehormatan, Tim Kerja dan Perlengkapan Dewan) 9. Tata tertib DPRD	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	L. KESEJAHTERAAN RAKYAT (Agama)					
	1. Kebijakan keagamaan meliputi kebijakan di bidang Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik,Bimas Hindu, Bimas Budha, Kerukunan Umat Beragama, dan penyelenggaraan Haji dan Umroh.	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Penyiapan Kebijakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Perumusan dan penyusunan bahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan.	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	e. Penetapan dalam Bentuk Norma Standar Prosedur dan Kriteria	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	2. Bimbingan Masyarakat Islam					
	a. Wakaf 1) Permohonan Izin tukar menukar Tanah Wakaf (Ruislah) 2) Permohonan penunjukan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Uang Wakaf 3) Bantuan Pengembangan Wakaf Produktif 4) Bantuan Sertifikasi Tanah Wakaf 5) Pendataan Wakaf 6) Akta Ikrar Wakaf 7) Formulir Wakaf 8) Surat Pengesahan Nadzir Wakaf	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	b. Zakat 1) Bimbingan dan pembinaan Lembaga Zakat 2) Pembinaan Lembaga Pengelola Zakat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Rumah Ibadah 1) Bantuan pengelola rumah ibadah 2) Penyuluhan dan Bimbingan Kemasjidan 3) Sertifikat Aset-aset Badan Kesejahteraan Masjid (BKM)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR